VERSI 2.0

KERANGKA KERJA SUARA, PILIHAN DAN AKSI

Panduan Praktisi Konservasi untuk Konservasi oleh Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal

The Nature Conservancy

Penghormatan

“Kerangka Kerja Suara, Pilihan dan Aksi (SPA): Panduan Praktisi Konservasi untuk Konservasi oleh Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal Lokal, Versi 2.0” mengembangkan Versi 1.0 (2017). Panduan ini disusun untuk menghormati dan mendukung Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal di seluruh dunia. Para penulis dan The Nature Conservancy (TNC) mengakui pemilik tradisional, penjaga, dan pengelola tanah dan perairan yang didukung oleh Kerangka SPA dan mereka yang wilayah tradisionalnya diikutsertakan oleh penulis yang tersebar secara geografis saat menulis laporan ini.

Versi 1.0 (2017) *disunting dan dikurasi oleh Nicole R. DeMello and Erin Myers Madeira. Masukan, keahlian, tinjauan sejawat, penyediaan dan pengecekan alat dan sumber daya, serta penyediaan studi kasus oleh Matt Brown, Laurel Chun, Rane Cortez, Eric Delvin, James Fitzsimmons, Herlina Hartanto, David Hinchley, Andrew Ingles, Allison Martin, Patricia Mupeta -Muyamwa, Luke Preece, Helcio Souza, dan Heather Wishik. Pemeriksaan naskah oleh Claire Peters. Dirancang oleh Epstein Creative.*

Saran kutipan: The Nature Conservancy (2017). Suara yang Kuat, Pilihan yang Aktif: Kerangka Kerja Praktisi TNC untuk Memperkuat Hasil bagi Manusia dan Alam, Versi 1.0. Arlington, VA.

Versi 2.0 (2022) *disunting dan dikurasi oleh Nicole R. DeMello. Tim Penulis Utama—Nicole R. DeMello, Brandie Farris, Lisa Ferguson, Shiteng Kang (康诗腾), Allison Martin, Yuta J. Masuda, Jessica Musengezi, Luke Preece, dan Chrissy Schwinn. Penelitian terbitan oleh Carol Bogezi, Nicole R. DeMello, Caitlin Doughty, Brandie Fariss, Christina Oraftik, Luke Preece, and Geoffrey Whittle-Walls. Kontribusi terhadap studi kasus oleh Colin Apse, Javkhlan Ariunbaatar, Gankhuyag Balbar, Eduardo Barnes, Andrea Akalleq Burgess, Julie A. Damon, Gala Davaa, Eric Delvin, Meghan Gombos, Celene Hawkins, Robert Jones, Luciana Lima, Peter Limbu, Philipo Lukumay, George Maina, Alphonce Mallya, Yedityah Mella, IFPRI, dan EcoAdvisors. Pemeriksaan naskah oleh Claire Peters. Rancangan oleh Macarena Soto Olivares dan dilengkapi oleh Agency MABU.*

Saran kutipan: The Nature Conservancy (2022). Kerangka Kerja Suara, Pilihan dan Aksi: Panduan Praktisi Konservasi untuk Konservasi oleh Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal, Versi 2,0. Arlington, VA.

Kami mengucapkan terima kasih kepada orang-orang berikut ini atas panduan dan kontribusinya:

Tim Penasihat yang memberikan panduan, tinjauan dan suntingan draf—Allison Aldous, Rane Cortez, Erin Myers Madeira, Andrea Akalleq Burgess, dan Chrissy Schwinn.

Kelompok Kerja yang memberikan ide, umpan balik, contoh, tinjauan, dan masukan, —Awaludinnoer, Javkhlan Ariunbaatar, Fernando Bittencourt, Rony Brodsky, Corissa Busse, Jaime Camacho, Eric Delvin, Rynal Fadli, Natalio Godoy, Berna Gorong, Celene Hawkins, A. Kusworo, Caroline Lumosi, George Maina, Patricia Mupeta-Muyamwa, Alexis Nakandakari, Crystal Nelson, Karen Oliveira, Felipe Torres, Francisco Torres, dan Sherie Simms.

Mitra Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal yang terlibat dalam dialog untuk menyampaikan sudut pandang dan masukan berdasarkan kebenaran dan memperkuat Kerangka Kerja SPA—Leah Armstrong, Nikoosh Carlo, tish carr, Kristian Thebu, Darren Ranco, dan Chrissy Warren.

Anggota TNC Native Network yang ambil bagian dalam sesi mendengarkan untuk menyampaikan sudut pandang dan masukan atas kebenaran dan memperkuat Kerangka Kerja SPA—Marshall Birch, Faith Cherop, Amy Croover, Caroline Gitari, Sam Gon, Kristina Jenkins, Nohealani Ka’awa, Ericka Moussavou, Crystal Nelson, Cheryl Martinez Thibodeau, Peter Van Kampen, Tracey Williams, and Ulalia Woodside.

Pendanaan murah hati untuk Kerangka Kerja SPA 2.0 disediakan oleh donor anonimus.

Isi

Penghormatan 3

Terima kasih dan Penghormatan kepada Pribumi 6

Prinsip-Prinsip yang Berpusat pada Mitra 7

Apa yang Baru dalam Versi Dua? 8

Pengantar Kepada Kerja Suara, Pilihan dan Aksi (SPA) 9

- Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal 9
- Hubungan Manusia/Alam 11
- Teori Naratif Perubahan 12
- Simbolisme Representasi Visual 12
- Representasi Visual SPA 13
- Pilar Kerangka Kerja SPA 14
- Unsur Landasan Kerangka Kerja SPA 16
- Pemantauan dan Evaluasi Implementasi Kerangka SPA 17
- Memahami Karakteristik Sumber Daya Air Tawar dan Implikasinya 20

Kerangka Kerja SPA: Memahami dan Melaksanakan Pilar-Pilar dan Unsur Landasan 21

Pilar 1: Mengamankan Hak Atas Tanah, Air dan Sumber Daya 22

- Pengetahuan, Bukti dan Pelaksanaan 22
- Studi Kasus 28
- Alat dan Sumber Daya 33

Pilar 2: Kepemimpinan yang kuat, tata kelola dan Kapasitas Manajemen 34

- Pengetahuan, Bukti dan Pelaksanaan 34
- Studi Kasus 41
- Peralatan dan Sumber Daya 45

Pilar 3: Dialog dan Pengambilan Keputusan Multi-Stakeholder yang Efektif 45

Pengetahuan, Bukti dan Pelaksanaan 45

Studi Kasus 50

Peralatan dan Sumber Daya 51

Pilar 4: Peluang Sumber Pendapatan Berkelanjutan 52

Pengetahuan, Bukti dan Pelaksanaan 52

Studi Kasus 57

Peralatan dan Sumber Daya 59

Unsur Landasan 1: Keadilan Manfaat, Dampak, dan Inklusi 60

Pengetahuan, Bukti dan Pelaksanaan 60

Studi Kasus 67

Peralatan dan Sumber Daya 70

Unsur Landasan 2: Hubungan Kuat terhadap Pengetahuan dan Tempat 71

Pengetahuan, Bukti dan Pelaksanaan 71

Studi Kasus 78

Peralatan dan Sumber Daya 81

Unsur Landasan 3: Hasil yang lestari untuk Masyarakat dan Alam 82

Pengetahuan, Bukti dan Pelaksanaan 82

Studi Kasus 89

Peralatan dan Sumber Daya 91

Lampiran: Peralatan dan Sumber Daya 92

Referensi 99

Untuk mengakses Kerangka Kerja SPA sebagai versi web interaktif, kunjungi www.tncvoicechoiceaction.org

Terima kasih dan Penghormatan kepada Pribumi

The Nature Conservancy (TNC) adalah organisasi konservasi yang berkomitmen untuk menciptakan masa depan di mana alam dan manusia berkembang, dan upaya mencapai misi kami harus memasukkan inklusi, kolaborasi, dan dukungan terhadap penjaga asli dan saat ini dari sistem alami Bumi. Kami menyadari bahwa sebagai organisasi yang memiliki dan mengelola tanah, sistem dan peraturan kepemilikan pribadi, perlindungan, dan pengelolaan tanah dan perairan yang menjadi inti pekerjaan kami menimbulkan kerugian yang mengerikan bagi Masyarakat Adat. Bersama ini, kami mengakui peran pelayan tradisional, dulu, sekarang, dan yang akan muncul, dan mengakui sejarah, tanggung jawab, dan komitmen kelembagaan kami. Kami berkomitmen untuk menumbuhkan kesadaran mendalam tentang sejarah dan dampak abadi kolonialisme—termasuk kontribusi kami sebagai sebuah organisasi terhadap sejarah ini—dan tanggung jawab yang dihasilkan, termasuk membangun kemitraan berdasarkan rasa hormat, kesetaraan, dialog terbuka, integritas, dan akuntabilitas bersama.

© AMI VITALE

Prinsip-Prinsip yang Berpusat pada Mitra

Kerja TNC dengan Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal didasarkan pada membangun hubungan, menghormati penentuan nasib sendiri, membangun kepercayaan, dan berfokus pada kepentingan bersama. Prinsip-prinsip yang berpusat pada mitra TNC meliputi:

- **Oleh Masyarakat Adat dan komunitas:** Kami berupaya memahami peran apa yang diinginkan komunitas dari kami. Bersama dengan masyarakat, kami menyusun rencana-rencana yang selaras dengan prioritas masyarakat dan pengalaman serta misi TNC.
- **Beragam dan inklusif:** Kami mengakui dan menghormati keberagaman Masyarakat Adat dan komunitas lokal, serta keberagaman yang hidup di tengah masyarakat. Kami bekerja menuju keadilan gender dan kepemimpinan antar generasi.
- **Didasarkan pada timbal balik:** Kemitraan kami dengan Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal adalah peluang untuk saling belajar, berbagi, dan saling menguntungkan antara masyarakat dan TNC. Kami mengupayakan kemitraan transformasional—bukan transaksional—dalam semangat timbal balik.
- **Berdasarkan komunikasi dan akuntabilitas:** Kami mendengarkan dengan seksama dan membuka jalur komunikasi yang jelas. Kami berkomitmen memenuhi peran dan tanggung jawab yang disepakati, dan menjaga akuntabilitas kami dalam kemitraan dan komitmen jangka panjang.
- **Fleksibel, adaptif dan sabar:** Kami berupaya bersikap fleksibel terhadap kebutuhan, realita dan prioritas yang bersaing di tengah masyarakat. Kami menyadari keterkaitan dari semua hal. Dan kami belajar dari pengalaman terdahulu.

Kami berkomitmen untuk dan mengajak semua organisasi dan praktisi konservasi untuk menghormati dan menjunjung tinggi standar HAM termasuk **Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat** dan konvensi terkait lainnya, menerapkan dan memantau pengamanan sosial dan lingkungan, serta mendukung tata kelola, sistem pengetahuan dan visi berkelanjutan penentuan nasib sendiri generasi sekarang dan masa depan Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal secara memadai.

Kami berkomitmen untuk menjunjung tinggi dan menghormati sepenuhnya hak-hak berbeda dan istimewa **Masyarakat Adat dan komunitas lokal** dan berkolaborasi seiring prinsip dan praktik terbaik untuk mendukung pemberdayaan diri Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal serta kepemimpinan dan bimbingan mereka dalam konservasi keanekaragaman hayati yang inklusif dan efektif, pembangunan berkelanjutan, dan mitigasi perubahan iklim dengan mencurahkan kemampuan terbaik kami.

Apa yang Baru dalam Versi Dua?

Suara yang Kuat, Pilihan yang Aktif: Kerangka Kerja Praktisi TNC untuk Memperkuat Hasil untuk Manusia dan Alam, Versi 1.0" awalnya dikembangkan bersama dan dirilis pada tahun 2017 oleh keanekaragaman kelompok staf TNC dari berbagai wilayah geografis dan peran, dan dengan mempertimbangkan pengalaman program, keahlian pada materi khusus, dan literatur ilmiah. Selama lima tahun terakhir, kerangka kerja tersebut mendapatkan daya tarik dan telah diterapkan di dalam organisasi sebagai pendekatan bersama dalam bermitra dengan Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal dalam tujuan bersama menjaga lingkungan dan kesejahteraan manusia. Tanggapannya positif, ditunjukkan dengan peningkatan penerapan dan penggunaan. Sejak penulisan awal tersebut, telah bermunculan studi dan analisis baru yang dikembangkan secara internal dan eksternal. Upaya ini, bersama dengan perubahan sosial dan lingkungan secara global, telah meningkatkan pemahaman dan pendekatan kami di bidang ini. Sekarang adalah waktu yang tepat untuk "menyegarkan" kembali kerangka kerja tersebut. Pembaca akan melihat bahwa banyak isi dari dokumen praktisi konservasi asli dipertahankan, dengan beberapa penyesuaian dan tambahan. Ini mencakup:

- Tinjauan dan masukan masyarakat adat dan anggota komunitas lokal tentang teori dan narasi kerangka kerja, memastikan relevansi alat yang digunakan untuk memajukan aspirasi dan visi masyarakat adat dan komunitas lokal
- Mengedepankan pandangan holistik tentang sistem alam dengan memperluas cakupan kerangka kerja dan isi, bahasa, contoh, serta bukti terkait agar inklusif dan dapat diterapkan pada ekosistem air tawar dan pesisir, selain pada ekosistem darat,
- Penambahan bukti dan kutipan baru, serta alat dan sumber daya dari berbagai studi serta sumber internal dan eksternal,
- Pembaruan dan penyempurnaan bagian "Alat dan Sumber Daya" untuk memasukkan jumlah alat yang lebih sedikit tetapi lebih dapat ditindaklanjuti, yang paling berguna untuk praktisi konservasi yang melaksanakan kerangka kerja,
- Hubungan yang jelas antara kerangka kerangka kerja dan tindakan terkait serta metrik organisasi TNC, dan
- Penambahan resmi tiga unsur landasan lintas sektor yang menyentuh setiap pilar kerangka kerja sebagai kondisi pendukung yang penting untuk mencapai keberhasilan:
    - Keadilan Manfaat, Dampak, dan Inklusi,
    - Hubungan yang Kuat dengan Pengetahuan dan Tempat, dan
    - Hasil Lestari untuk Manusia dan Alam.

Sebagai praktisi dan organisasi konservasi yang bekerja untuk menerapkan dan membangun konsep bersama yang sekarang dikenal sebagai **"Kerangka Kerja Suara, Pilihan dan Aksi.: Sebuah Penduan Praktisi Konservasi untuk Konservasi oleh Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal lokal Versi 2.0"**—atau pendeknya Kerangka Kerja SPA—kami berharap pembaharuan ini bermanfaat dan membantu Anda meningkatkan pekerjaan konservasi yang bermakna dan lestari. Saat kami secara kolektif tumbuh, berkembang, dan menjaga pendekatan berbasis hak kami terhadap konservasi yang dipimpin masyarakat, kami berusaha untuk mendukung dan memperkuat suara, pilihan, dan aksi Masyarakat Adat dan komunitas lokal.

Pengantar Kerangka Kerja Suara, Pilihan dan Aksi (SPA)

Masyarakat Adat dan komunitas lokal

Kerangka Kerja SPA paling tepat diterapkan kepada orang-orang yang:

- terhubung dengan tanah, perairan, dan sumber daya alam di daerah atau tempat mereka termasuk melalui ikatan keluarga yang kuat, budaya bersama (misalnya, bahasa, agama, tradisi, spiritualitas, suku), dan praktik bersama (misalnya, bertani, memancing, memelihara ternak).
- memiliki saling ketergantungan pada sistem ini dalam hal kebutuhan ekonomi, keluarga, budaya, agama, dan/atau kesehatan dan gizi,
- memiliki ketertarikan pada upaya mempengaruhi kesehatan sumber daya hidup di daerah tersebut di masa mendatang,
- memiliki preseden historis atau tradisi melaksanakan tata kelola mandiri di daerah tersebut, dan
- yang memiliki beberapa tingkatan pengelolaan milik bersama atau secara komunal terhadap sumber daya alam daerah tersebut.

Orang-orang yang disebutkan di atas mungkin mengalami keterbatasan alternatif peluang ekonomi, atau pekerjaan, mungkin menghadapi tekanan pembangunan eksternal secara signifikan, mungkin mengalami dampak kasat mata perubahan iklim yang mempengaruhi kemampuan mereka untuk mengelola, menjaga dan mempergunakan sumber daya alam mereka, dan dapat mencakup penduduk asli suatu tempat dan/atau orang yang baru saja menetap di suatu tempat dan mempunyai hubungan erat dengan tanah, perairan, dan sumber daya alam daerah tersebut. Masyarakat Adat dan Manusia Adat adalah kelompok masyarakat yang menjadi penduduk asli suatu tempat dan karena itu menganggap diri mereka berbeda dari sektor-sektor lain di masyarakat yang juga mendiami wilayah-wilayah yang awalnya didiami oleh masyarakat adat sebelum penjajahan.[1]

Atribut utama Masyarakat Adat:

Masyarakat, Warga, dan Bangsa-Bangsa Adat adalah kelompok yang memiliki kesinambungan sejarah dengan masyarakat pra penyerangan dan pra penjajahan yang berkembang di wilayah mereka, menganggap diri mereka berbeda dari sektor masyarakat lain yang sekarang berada di wilayah tersebut, atau bagian lain dari sektor tersebut. Mereka terbentuk pada sektor masyarakat yang tidak dominan saat ini dan berketetapan untuk melestarikan, mengembangkan dan mewariskan wilayah nenek moyang dan identitas suku kepada generasi mendatang sebagai dasar keberadaan berkesinambungan mereka sebagai manusia, sesuai dengan pola budaya, kelembagaan sosial dan sistem legal mereka sendiri (Martinez Cobo, 1982). Selanjutnya, kami mengakui dan menegaskan bahwa para individu Adat berhak mendapatkan hak asasi manusia yang diakui dalam peraturan internasional tanpa diskriminasi, dan bahwa Masyarakat Adat memiliki hak kolektif yang sangat diperlukan untuk keberadaan, kesejahteraan, dan perkembangan integral mereka sebagai masyarakat. [2]

Perbedaan Komunitas Lokal:

Komunitas lokal seringkali memiliki hubungan yang serupa dengan dan ketergantungan pada tanah, perairan,, dan sumber daya untuk budaya dan mata pencaharian mereka, serta sistem komunal atau tata kelola sumber daya alam bersama. Namun, anggota komunitas lokal belum secara kolektif mengidentifikasi diri mereka sebagai Masyarakat Adat. Dengan demikian, hak kolektif berdasar hukum internasional yang berlaku untuk Bangsa Masyarakat Adat mungkin tidak berlaku atau tersedia untuk komunitas lokal. Terlepas dari itu, kami menjaga komitmen untuk menegakkan hak asasi manusia dari semua komunitas lokal yang bermitra dengan kami.

Masyarakat Adat (IPs) dan komunitas lokal (LCs) seringkali disebut bersamaan sebagai "IPLCs" dalam berbagai konvensi internasional (misalnya, Konvensi Keanekaragaman Hayati, Konvensi Kerangka Kerja PBB untuk Perubahan Iklim). Kami mengakui pembedaan antara "IPs" dan "LCs" dengan IPs yang memegang hak kolektif sebagaimana dicantumkan dalam Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat.[3] Pada dokumen ini, kami tidak menggunakan akronim "IPLC" untuk menghormati perbedaan antara Masyarakat Adat dan komunitas lokal, dan sebaliknya menyebutkan nama lengkap dengan huruf kapital yang sesuai untuk "Masyarakat Adat" untuk memberikan pengakuan atas komunitas yang beragam dan berdaulat yang tinggal di wilayah tertentu. ketika orang Eropa pertama kali mencoba memberikan nama, mengkategorikan, dan menjajah mereka.

Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal adalah pemimpin utama dalam upaya mencari solusi abadi untuk mengatasi tantangan lingkungan dan kesejahteraan manusia yang paling mendesak di dunia. Mereka mengelola atau memiliki hak tenurial atas lebih dari 25 persen tanah di dunia[4] dan atas lebih dari dua kali lipat jumlah itu yang diklaim tetapi belum diakui secara sah,[5] termasuk sistem yang saling berhubungan dari hutan, padang rumput, lahan basah, sungai, danau, air tanah di bawahnya, dan pesisir. Wilayah mereka menyimpan lebih dari 24 persen karbon hutan tropis dunia,[6] serta banyak keragaman hayati global,[7] dan dengan sembilan dari 10 dari 32 juta nelayan di seluruh dunia adalah nelayan skala kecil atau artisanal,[8] Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal menjadi salah satu mitra terpenting kami, dan telah terbukti sebagai penjaga alam paling efektif di dunia— dengan keberhasilan mencapai hasil konservasi yang lebih besar dan mempertahankan lebih banyak keanekaragaman hayati dibandingkan wilayah yang dilindungi pemerintah.[9-10]

Dikarenakan warisan dan tindakan kolonialisme yang berkelanjutan, ketidakadilan yang terus hadir, dan peningkatan konsolidasi kekuatan ekonomi, Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal seringkali menghadapi tantangan dalam mencapai komunitas dan lingkungan yang sehat dan berkembang. Dengan perkembangan di luar paradigma ini, jika upaya pihak otoritas beserta Masyarakat Adat dan komunitas lokal[a] untuk menjaga tanah, perairan dan sumber daya mereka diperkuat, kemudian peluang penghidupan yang ada diselaraskan dengan nilai-nilai, dan ketika peluang dan manfaat ini didistribusikan secara adil, maka solusi yang tahan lama dan lestari bagi manusia dan alam akan memberikan hasil. Oleh karena itu, kami bekerja dalam kemitraan untuk mendukung pengelolaan dan penjagaan sumber daya alam yang ditetapkan, dipimpin, dan dilaksanakan oleh Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal; berdasarkan pada nilai-nilai, pengetahuan, dan perspektif komunitas; dan berfokus pada isu-isu yang saling terkait dalam mendukung komunitas yang dinamis, budaya yang kuat, ekonomi lokal yang layak, dan ekosistem yang sehat.

---

a. Untuk kepentingan Kerangka Kerja SPA, otoritas didefinisikan sebagai persepsi pengguna dan pemegang hak sumber daya alam bahwa kelompok tata kelola benar-benar mewakili kepentingan mereka dan memiliki yurisdiksi hukum atau adat untuk mengatur sumber daya alam "mereka"[11]. Kapasitas adalah konsep multi-segi yang umumnya dikonseptualisasikan sebagai "memiliki kemampuan untuk bertindak," dan berbagai jenis modal seperti modal manusia, sosial, kelembagaan, alam, dan ekonomi harus dimanfaatkan untuk melaksanakannya.[12-13]

Hubungan Manusia/Alam

Kerangka Kerja SPA didasarkan pada pemahaman bahwa kesehatan alam dunia dan kesejahteraan manusia saling terhubung dan tak terpisahkan. Hal ini melampaui konsep jasa ekosistem (yaitu, penyediaan, pengaturan, dan fungsi pendukung yang disediakan lingkungan bagi manusia) hingga pandangan holistik terpadu yang menggabungkan berbagai hubungan dan putaran umpan balik dalam sistem sosial-ekologis.[b] (Gambar 1).

Pada diagram di bawah, **jalur biru** mewakili salah satu strategi konservasi lingkungan yang mengarah pada perubahan dalam integritas ekosistem—dan selanjutnya jasa ekosistem—yang kemudian berdampak pada kesejahteraan manusia. Ini adalah jalur yang paling sering dikenal dan dijadikan rujukan oleh para organisasi konservasi. Jalur lain, yang sama pentingnya dalam konservasi oleh masyarakat, diwakili oleh **jalur oranye**—program yang diikutsertakan dalam strategi konservasi berorientasi sosial (mis., peningkatan kapasitas, mata pencaharian berkelanjutan, dll.) yang mengarah pada perubahan sosial, yang mempengaruhi kesejahteraan manusia dan integritas ekologis secara langsung. Pada saat yang sama, kesejahteraan manusia mempengaruhi kemampuan, kapasitas dan kehendak mereka untuk mengambil bagian dalam tindakan pengelolaan seperti ditunjukkan dalam **jalur hijau**. Terakhir, di tempat-tempat yang memiliki hubungan erat dengan tanah, perairan, dan sumber daya, persepsi masyarakat tentang kesehatan tempat-tempat tersebut dapat berdampak langsung pada kesehatan dan identitas mereka. (**jalur merah**).

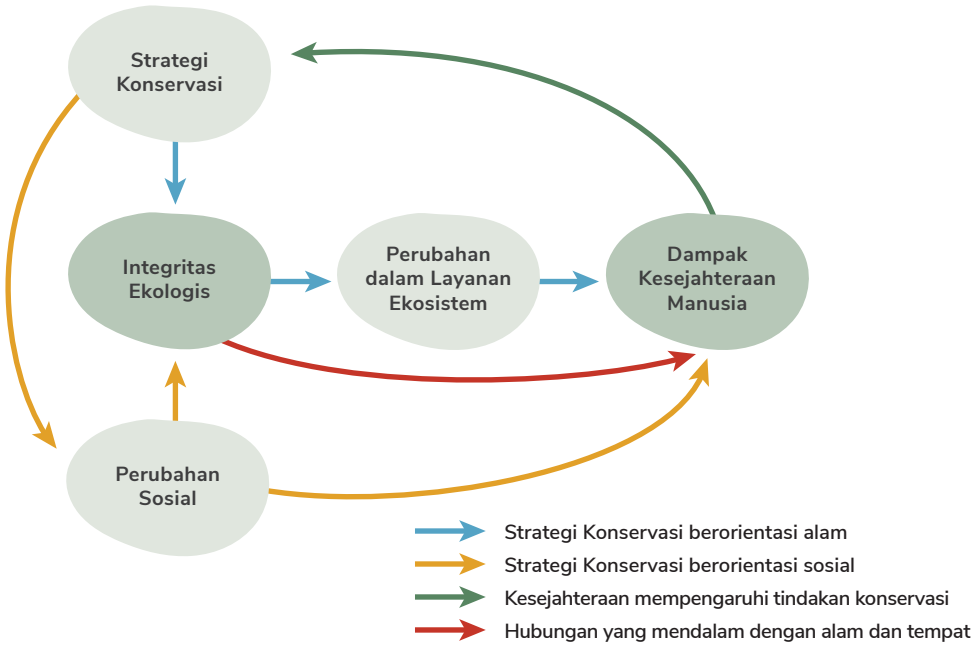

Gambar 1: *Diagram hubungan Manusia/Alam*[14]

b. Sistem sosial ekologi mengacu kepada konsep terpadu tentang manusia di alam, dan menekankan pada keterkaitan antara lingkungan alam dan sistem sosial yang menangani hak milik, sistem tenurial sumber daya, sistem pengetahuan yang sesuai dengan lingkungan dan sumber daya, serta pandangan dunia dan etika terkait lingkungan dan sumber daya.[15]

Narasi Teori Perubahan

Pendekatan bersama kami dalam mendukung otoritas dan kapasitas Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal dalam pengelolaam sumber daya alam dan pembuatan keputusan dalam Kerangka Kerja SPA. Kerangka kerja SPA ditujukan untuk situasi-situasi seperti ketika kesejahteraan manusia dan hasil lingkungan saling terkait dan bergantung, kepemimpinan Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal sangat penting untuk mencapai tujuan bersama, ketidakseimbangan kekuatan dapat menghalangi pencapaian hasil positif bagi manusia dan alam, dan proyek dapat berdampak signifikan terhadap komunitas lokal.

Hasil positif yang adil dan lestari bagi manusia dan alam umumnya membutuhkan kehadiran empat pilar dan tiga unsur landasan Kerangka Kerja SPA yang saling bergantung dan saling memperkuat (Gambar 2). Empat pilar kerangka (hak, kapasitas, pembuatan keputusan, dan mata pencaharian) mewakili karakteristik yang diperlukan untuk konservasi oleh masyarakat yang berhasil. Faktanya, tinjauan dan analisis sistematis terbaru menunjukkan bahwa semakin banyak keempat pilar ini hadir, maka semakin tinggi kesuksesan hasil lingkungan dan sosial ekonomi yang muncul.[16] Tiga unsur landasan (keadilan, pengetahuan dan tempat, dan daya tahan) mewakili kondisi pendorong yang penting untuk pelestarian yang dipimpin oleh masyarakat.

Mengingat sifat kerangka kerja SPA yang saling berkaitan, kami tidak menuliskannya dalam urutan pilar dan unsur landasan. Semua aspek diperlukan untuk mencapai hasil positif yang lestari bagi manusia dan alam, dan seringkali beberapa aspek diterapkan secara bersamaan. Selanjutnya, konteks (misalnya, kapasitas masyarakat yang ada, kebijakan dan lembaga yurisdiksi, tipe ekosistem, pendorong perubahan, sejarah, dll.), berdasarkan analisis situasi menyeluruh, akan menentukan aspek mana yang harus diprioritaskan dalam strategi program.

Simbolisme Representasi Visual

Karya seni ini menyerupai **penyu**, yang merupakan makhluk yang hidup dengan baik di semua bioma utama. Penyu juga merupakan bagian penting dalam berbagai cerita yang dibuat oleh Masyarakat Adat. Kanvas mewakili **gendang tangan**, yang melambangkan detak jantung alam semesta. Dalam banyak budaya Masyarakat Adat, gendang tangan adalah alat suci yang menghubungkan langit dan bumi, sekaligus menjaga ritme tatanan dunia.

Empat (4) pilar tersebut menyatu dalam bentuk kaki penyu. Tapak kaki **beruang** adalah simbol perlindungan, sedangkan Cahaya Utara yang mengelilinginya adalah simbol hubungan abadi dengan nenek moyang kita. Burung **Elang** dikenal sebagai simbol kepemimpinan. Api **adalah** adalah simbol tempat berkumpul dan dikelilingi oleh nyala api yang menari yang melambangkan orang-orang yang berinteraksi secara serempak bersama-sama. Terakhir, **matahari** adalah simbol kehidupan yang abadi, dan pancaran cahaya yang memancar darinya melambangkan kegembiraan, energi, dan vitalitas.

Unsur landasan terintegrasi dalam bentuk citra keterwakilan dalam tiga (3) daerah berbeda di punggung kura-kura. Daerah-daerah ini dipisahkan oleh lambang air yang di tengahnya dihubungkan oleh sebuah **lingkaran suci**. Lingkaran suci tersebut kadangkala disebut sebagai roda pengobatan, menjadi pengingat bahwa semua hal saling berhubungan, dan semua hal berada dalam proses pertumbuhan dan kemajuan berkesinambungan.

Kepala penyu dibuat menggunakan unsur air mengalir, mewakili perjalanan kehidupan. Berdasarkan sifat aslinya, kepala mewakili kebijaksanaan, sementara hati di bawahnya menunjukkan keterhubungan dengan hati dan jiwa.

Representasi Visual Kerangka Kerja SPA

"SEMUA pilar dan unsur landasan saling terhubung dan bergantung dan dibutuhkan untuk mencapai hasil positif berkelanjutan bagi manusia dan alam"

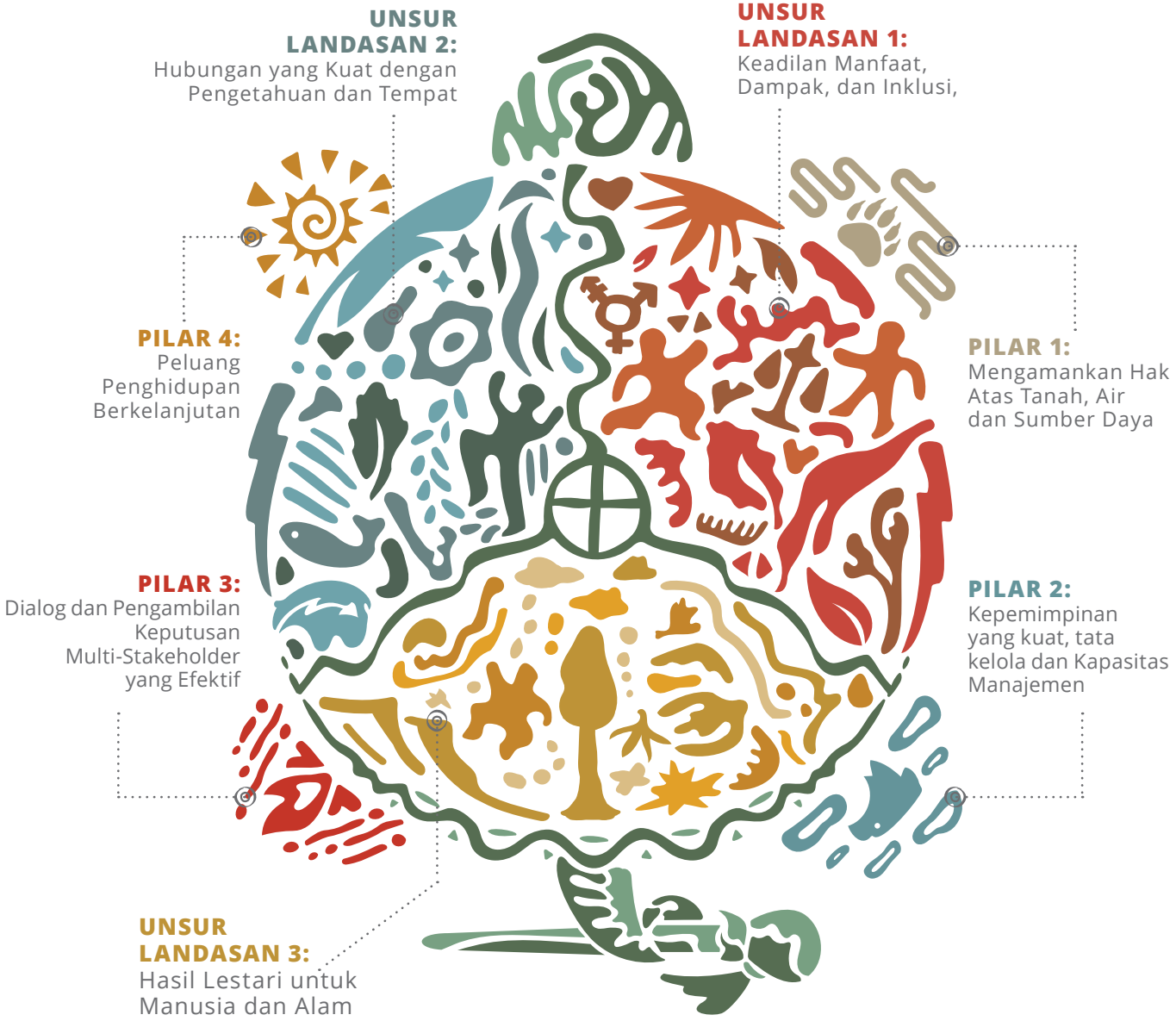

Gambar 2: *Representasi Visual Kerangka Kerja SPA*

Pilar Kerangka Kerja SPA

PILAR 1:

Menjamin Hak Atas Tanah, Air dan Sumber Daya

Mengacu pada status hukum aktual serta persepsi Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal bahwa hak mereka atas tanah, air, dan sumber daya akan dijunjung tinggi oleh anggota masyarakat lainnya, termasuk komunitas luar, perusahaan, dan pemerintah. Hal ini bergantung pada jenis (seperti, kepemilikan, pengelolaan, penarikan, penggunaan, atau akses) dan bentuk (seperti, komunal, publik, atau pribadi) hak yang dimiliki, dan pengakuan serta penegakan hak-hak tersebut oleh adat dan lembaga resmi. Ketika Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal memiliki hak atas tanah, perairan, dan sumber daya yang diakui dan ditegakkan oleh masyarakat dan pemerintah, mereka lebih mampu menegaskan kepentingan mereka terkait bagaimana sumber daya tersebut digunakan dan dikelola. Pada gilirannya, hal ini membawa keamanan dan keterlibatan masyarakat yang lebih kuat dalam pengelolaan sumber daya alam dan penggunaan sumber daya alam yang berkelanjutan, terutama dalam situasi di mana masyarakat memiliki etika kepengurusan yang tangguh, struktur tata kelola yang kuat, kepemimpinan yang bertanggungjawab, dan peluang ekonomi yang terkait erat dengan penjagaan lingkungandan pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan.

PILAR 2:

Kepemimpinan yang kuat, tata kelola dan Kapasitas Pengelolaan

Mengacu pada berbagai kapasitas Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal dalam memimpin pengambilan keputusan terkait tanah, perairan, dan sumber daya; memastikan aturan dan proses yang jelas dan adil untuk pengelolaan sumber daya alam; dan keterampilan, pengetahuan, dan teknologi untuk terlibat dalam forum, mengelola bisnis dan keuangan, dan mengelola sistem alam. Ketika Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal memiliki individu, pemimpin dan lembaga dengan kapasitas yang kuat, mereka dapat lebih mudah mencapai tindakan kolektif, kesatuan komunitas dan tata kelola efektif yang diperlukan untuk pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan, merespon ancaman dari luar terhadap tanah, perairan dan sumber daya, mengejar, menjalankan, dan membela hak-hak mereka; mengembangkan peluang mata pencaharian yang berkelanjutan; dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada tanah, perairan, dan sumber daya tempat mereka bergantung.

PILAR 3:

Dialog dan Pengambilan Keputusan Multi-Stakeholder yang Efektif

Mengacu pada kemampuan Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal untuk mengorganisir atau hadir, menyuarakan pemikiran dan pengetahuan, dan melihat penyerapan ide dan keinginan mereka dalam forum yang menyatukan banyak aktor yang memiliki kepentingan dengan tanah, perairan, atau sumber daya. Forum semacam ini dapat dilakukan pada skala lokal, regional, nasional, atau internasional, dapat memiliki mandat atau kewenangan yang tumpang tindih, dan dapat memiliki tujuan untuk bertukar pengetahuan, menyelesaikan konflik, dan/atau pengambilan keputusan. Ketika Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal terlibat dalam dialog multi-stakeholder dan pengambilan keputusan secara efektif dan bermakna, dan mendirikan struktur lestari untuk mempertahankan keterlibatan itu, keputusan pengelolaan sumber daya alam akan lebih mencerminkan perspektif yang beragam tentang keberlanjutan, menggabungkan wawasan unik tentang pengelolaan dan ketahanan, dan manfaat dari pemahaman mendalam tentang keterkaitan manusia dan alam. Selain itu, pemegang hak masyarakat adat dan lokal menerima manfaat dari peningkatan suara dan visibilitas, posisi negosiasi yang lebih kuat untuk memajukan visi mereka untuk mencapai kemakmuran ekonomi, dan dinamika kekuatan yang merata.

PILAR 4:

Peluang Penghidupan Berkelanjutan

Mengacu kepada kemampuan Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal untuk mengejar peluang mata pencaharian yang selaras secara budaya (mis., menambahkan nilai atau kestabilan mata pencaharian yang ada, mengadopsi mata pencaharian atau bisnis baru, dibantu oleh akses ke pinjaman, kredit, dan pembiayaan lainnya, atau memperoleh pekerjaan atau kompensasi karena melaksanakan pengelolaan yang baik) yang sesuai dengan visi masa depan mereka dan memungkinkan untuk berkembang di tempat mereka berada. Ketika Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal memiliki peluang mata pencaharian yang berkelanjutan lingkungan dan selaras dengan budaya, mereka lebih mampu menegaskan kepentingan lingkungan dan ekonomi seraya mempertahankan posisi negosiasi yang lebih kuat terhadap pilihan pembangunan yang tidak berkelanjutan yang merusak lingkungan dan tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya mereka.

Unsur Landasan Kerangka Kerja SPA:

UNSUR LANDASAN 1

Keadilan Manfaat, Dampak, dan Inklusi

Mengacu kepada kemampuan Masyarakat Adat dan komunitas lokal, serta identitas sosial yang saling berpotongan dalam masyarakat, untuk menerima manfaat setara dari kemitraan, memaksimalkan dampak positif dan meminimalkan dampak negatif (khususnya bagi identitas sosial yang rentan dan kurang terwakili), dan mencapai keterlibatan setara dalam pembuatan keputusan, pelatihan dan peluang ekonomi. Ketika Masyarakat Adat dan komunitas lokal, serta identitas sosial bersimpangan dalam masyarakat dapat berpartisipasi dan menerima manfaat setara dari inisiatif konservasi, kegiatan pengelolaan akan diperkuat oleh sudut pandang dan pengetahuan unik para anggota masyarakat dan keputusan dan tindakan komunitas akan berusia panjang, mengarah pada hasil yang lebih baik bagi manusia dan alam.

UNSUR LANDASAN 2

Hubungan yang Kuat dengan Pengetahuan dan Tempat

Mengacu pada keberadaan, penggunaan, dan penyebaran berkelanjutan dari pengetahuan, bahasa, budaya, cerita, dan praktik tradisional berbasis tempat milik Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal yang penting bagi kesejahteraan, dan merupakan dasar bagi keberhasilan tata kelola, pengelolaan, dan mata pencaharian sumber daya alam. Ketika Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal dapat mempertahankan, menghidupkan kembali, memperkuat, menggunakan, dan memindahtangankan pengetahuan mereka—yang seringkali berakar pada waktu, budaya, dan tempat—mereka lebih mampu memusatkan keputusan pengelolaan sumber daya alam pada prinsip-prinsip timbal balik, dan memastikan generasi mendatang mendapatkan manfaat dari cara-cara tradisional untuk mencari tahu dan melaksanakan.

UNSUR LANDASAN 3

Hasil Lestari untuk Manusia dan Alam

Mengacu kepada kondisi eksternal yang memungkinkan yang mempengaruhi keberhasilan jangka panjang kepengurusan oleh masyarakat, termasuk keberadaan pembiayaan konservasi untuk mendanai biaya operasional dan pengelolaan jangka panjang, ruang kebijakan lokal, regional, nasional, dan internasional yang memihak; dan difusi inovasi melalui jaringan dan perluasan tanpa mengorbankan norma-norma. Ketika Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal memiliki akses ke pembiayaan yang meliputi keseluruhan biaya kegiatan kepengurusan, lembaga pemerintah yang memihak dan meningkatkan hak kolektif dan keikutsertaan mereka dalam pembuatan kebijakan, dan kemampuan untuk mencapai skala dampak yang dibutuhkan melalui perluasan, replikasi serta difusi berbagai model konservasi yang dipimpin oleh masyarakat, upaya untuk tumbuh kembang di daerah memiliki kemungkinan lebih besar untuk mencapai keberlanjutan sosial, ekonomi, dan lingkungan jangka panjang.

Pemantauan dan Evaluasi Implementasi Kerangka SPA

Lihat **"Alat 1: Dokumen Panduan Tindakan dalam Kerangka Kerja SPA"** sebagai panduan dalam pemantauan pelaksanaan Kerangka Kerja SPA

Kami mengembangkan pendekatan pemantauan, evaluasi, dan pembelajaran (PEP) untuk dipergunakan oleh program yang melaksanakan Kerangka Kerja SPA, yang mencakup ukuran umum. Ukuran tersebut memfasilitasi kemampuan kami untuk berbicara tentang hasil dari seluruh program dan geografi tempat bukti, membangun basis bukti untuk strategi konservasi yang berorientasi sosial, mendorong pembelajaran bersama, dan memungkinkan pengelolaan adaptif. Pendekatan ini bertujuan untuk mencapai keseimbangan antara konsistensi dan fleksibilitas—dengan 10 ukuran tingkat hasil umum dan kemampuan untuk memilih dari menu indikator khusus konteks untuk memberikan masukan. Lima dari 10 ukuran umum diselaraskan langsung dengan metrik organisasi TNC (ditunjukkan dengan tanda bintang pada Tabel 1), dan oleh karena itu menawarkan peluang untuk meningkatkan efisiensi dan dampak upaya pemantauan. Tabel 1 menggambarkan Tindakan SPA secara umum seiring dengan pilar atau unsur landasan SPA terkait.

Tabel 1 *Tindakan Umum SPA.*

Pilar Kerangka Kerja atau Unsur Landasan SPA	Tindakan Umum SPA
Mengamankan Hak Atas Tanah, Air dan Sumber Daya	*1) Jumlah orang dengan keamanan hak atas tanah, perairan, atau sumber daya tradisional yang meningkat
Kepemimpinan yang kuat, Tata Kelola, dan Kapasitas Manajemen	2) Jumlah orang dengan kapasitas tata kelola yang meningkat 3) Jumlah orang dengan kapasitas tata kelola sumber daya alam yang meningkat
Dialog dan Pengambilan Keputusan Multi-Stakeholder yang Efektif	*4) Jumlah orang yang kemampuannya untuk berpartisipasi secara bermakna dalam pembuatan keputusan tentang lahan, air dan sumber daya tradisional telah meningkat
Peluang Penghidupan Berkelanjutan	*5) Jumlah orang dengan peningkatan peluang ekonomi berbasis tempat yang berkelanjutan
Keadilan Manfaat, Dampak, dan Inklusi	Pertimbangan keadilan yang diusulkan untuk setiap tindakan bersama (lihat masing-masing-masing bagian **dokumen panduan**)
Hubungan yang Kuat dengan Pengetahuan dan Tempat	6) Jumlah orang yang telah meningkat hubungannya dengan pengetahuan dan tempat
Tanah, perairan, atau sumber daya tradisional yang dikelola secara sehat dan berkelanjutan[c]	*7) Jumlah hektar lahan atau perairan/ sungai km/km garis pantai yang dilindungi *8) Jumlah hektar lahan atau perairan/sungai km/km garis pantai di bawah pengelolaan yang lebih baik 9) Jumlah hektar lahan atau perairan/sungai km/km garis pantai dengan kondisi ekologi yang lebih baik 10) Jumlah hektar lahan atau perairan/sungai km/ km garis pantai dengan peningkatan kesehatan tempat atau spesies yang penting secara budaya

**Tindakan SPA yang ditandai dengan tanda bintang diselaraskan dengan metrik organisasi TNC.*

c. Catatan, "tanah, air, atau sumber daya tradisional yang dikelola secara sehat dan berkelanjutan" bukanlah pilar Kerangka Kerja SPA, melainkan hasil lingkungan yang nyata dari kerangka kerja tersebut, dan terkait erat dengan kesejahteraan manusia dalam Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal. Oleh karena itu, kami menyertakan langkah-langkah ini agar dapat memahami hasil pada lingkungan dari strategi kami.

ALAT 1: PANDUAN — DOKUMEN PANDUAN TINDAKAN KERANGKA KERJA SPA

Mengingat Kerangka SPAawal memperoleh daya tarik pada seluruh program, kami merespon permintaan dari praktisi konservasi untuk menyusun panduan yang sederhana, umum, dapat disesuaikan, dan layak untuk memantau hasil penerapan Kerangka SPA. Mengingat fokus kerangka kerja ini adalah pada strategi berorientasi sosial yang didasarkan hubungan manusia/alam, dan didukung oleh bukti yang semakin lengkap, panduan ini menegaskan perlunya pelacakan indikator kesejahteraan manusia sebagai tambahan dari kesejahteraan lingkungan. Panduan ini disusun agar dapat ditautkan secara eksplisit ke **Agenda Konservasi Bersama (AKB) TNC** dan **Konservasi dengan Desain 2.0**, dan membantu program mengadopsi Kerangka SPA yang menyediakan informasi untuk memantau kemajuan pada bidang kesejahteraan manusia dan hasil di lingkungan untuk memberikan masukan atas upaya TNC yang lebih luas.

Sebagai tambahan **kurikulum pelatihan daring mandiri tentang Pemantauan, Evaluasi, dan Pembelajaran Kerangka Kerja SPA (PEP)** tersedia pada **conservationtraining.org**, yang meliputi pengembangan rencana PEP; etika, hak asasi manusia, dan kesetaraan dalam PEP; desain wawancara kelompok terfokus dan informan kunci; desain survei sosial; alat pengumpulan data dan implementasinya; sistem dan proses manajemen data; dan visualisasi dan komunikasi data. Untuk mengakses kurikulum pelatihan, hubungi **conservationtraining@tnc.org**.

Semua bahan “Alat dan Sumber Daya” yang diacu dalam dokumen ini dapat diakses pada **www.tncvoicechoiceaction.org**

© BRIDGET BESAW

Memahami Karakteristik Sumber Daya Air Tawar dan Implikasinya

Kerangka kerja SPA disusun sedemikian rupa agar dapat diterapkan di seluruh ekosistem darat, air tawar, dan pesisir. Sumber Daya air tawar[d] memiliki karakteristik unik tertentu yang tidak dimiliki oleh ekosistem darat atau pesisir. Menghargai karakteristik unik dari sumber daya air tawar sangatlah penting dalam memahami nuansa untuk menerapkan kerangka kerja dengan sukses.

Mobilitas: Sumber daya air tawar secara terpadu bergerak, menciptakan potensi kemajemukan tinggi dalam aliran dan ketersediaan sumber daya melintasi ruang dan waktu, dan meningkatkan kecepatan penyebaran dampak pada sumber daya. Selanjutnya, dikarenakan pergerakan ini, keterhubungan menjadi sangat penting untuk banyak spesies dan proses. Oleh karena itu, pengelolaan sumber daya air tawar harus dapat disesuaikan dikarenakan ketersediaannya berubah dari waktu ke waktu, dan dapat menyediakan sumber daya air tawar kapan dan ketika dibutuhkan manusia dapat membutuhkan biaya besar.

Dampak pada mutu dan jumlah: Kondisi sumber daya air tawar di satu lokasi mencerminkan efek kumulatif dari semua penggunaan air dan darat di hulu (termasuk pertanian, pemeliharaan ternak, manufaktur, pembangkit listrik, dan transportasi) dan tata kelola di kawasan hulu, selain tentu saja faktor iklim dan faktor lainnya. Oleh karena itu, ketersediaan air untuk pengguna di hilir dan kualitas sumber daya air tidak dapat dijamin, seringkali dalam rentang waktu sangat singkat antara terjadinya sebab dan akibat karena pergerakan air yang tinggi. Selanjutnya, pendekatan pengelolaan sumber daya air tawar mungkin akan berbeda tergantung pada lokasi seseorang di daerah aliran sungai.

Tantangan dalam observasi: Sumber daya air tawar seringkali sulit untuk diamati dan dipantau (misalnya, air tanah, stok ikan yang bermigrasi), dan hal ini menimbulkan tantangan lebih besar untuk mengembangkan pemahaman yang akurat tentang sumber daya ini, menetapkan batasan seputar hak dan tata kelola, dan memberikan umpan balik yang dibutuhkan pengguna untuk mengelolanya. Hal ini semakin menantang seiring dengan perkembangan perubahan iklim.

Eksternalitas: Eksternalitas—atau biaya/manfaat yang tidak tercermin dalam harga yang dikenakan untuk barang dan jasa, membentuk dan memengaruhi dinamika kekuatan di antara pengguna sumber daya air tawar. Lokasi di hulu memberikan keuntungan tertentu dibandingkan mereka yang berada di hilir, dan ada ketidakseimbangan kekuatan untuk bertindak melawan atau memperkuat dinamika ini. Hal ini telah menjadi masalah di banyak sistem perairan lintas batas, ketika pengguna di hulu membangun infrastruktur dan mengalihkan sumber daya air dari anak sungai atau sungai, membuat ketersediaan air bagi pengguna hilir berkurang dan alirannya tidak menentu. Perselisihan akan meningkat saat kelangkaan air meningkat disebabkan seperti pertumbuhan penduduk yang cepat, kemajemukan iklim, dan keresahan masyarakat.

Tidak tergantikan dan sangat penting: Tidak ada pengganti air tawar. Air tawar sangat penting untuk semua kehidupan di Bumi. Dikarenakan statusnya sebagai hak asasi manusia dasar, jarang sekali ada orang yang memiliki hak kepemilikan atas air. Sebaliknya, jenis hak yang paling relevan terkait dengan air tawar adalah hak akses, penarikan, dan pengecualian (hal ini dibahas lebih lanjut pada bagian “hak aman”). Air adalah pendorong di balik banyak sektor ekonomi (misalnya, pertanian, produksi energi, manufaktur) dan dengan demikian, distribusi dan manajemen air seringkali sangat kontroversial.

---

d. Ekosistem air tawar meliputi air di bawah tanah dan mata air, sungai dan alirannya, danau dan kolam, serta lahan basah. Isitilah ‘sumber daya air tawar menyiratkan bahwa air itu sendiri adalah sebuah sumber daya selain dari organisme akuatik yang hidup di dalam air.

Kerangka Kerja SPA: Memahami dan Melaksanakan Pilar-Pilar dan Unsur Landasan

Bagian ini menjabarkan pengetahuan dan bukti yang mendasari Kerangka SPA, bagaimana hal ini dilaksanakan dalam praktik, dan seperangkat kecil alat dan sumber daya tindakan yang telah dipilih sebagai hal kunci dalam mendukung penerapan Kerangka SPA. Diawali dengan empat pilar, diikuti dengan tiga unsur landasan. ***Pilar*** kerangka kerja (hak, kapasitas, pembuatan keputusan, dan mata pencaharian) mewakili karakteristik yang dibutuhkan untuk keberhasilan konservasi yang dipimpin oleh masyarakat. Unsur ***landasan*** (keadilan, pengetahuan dan tempat, dan daya tahan) mewakili kondisi pendorong yang penting untuk melaksanakan konservasi yang dipimpin oleh masyarakat. Masing-masing bagian pilar dan unsur landasan meliputi sub-bagian tentang "Pengetahuan, Bukti dan Pelaksanaan", "Studi Kasus", dan "Alat dan Sumber Daya". Informasi ini berasal dari praktisi konservasi dan pengalaman program, pengetahuan dan pengalaman mitra masyarakat adat dan komunitas lokal, pakar materi pelajaran, dan literatur ilmiah. Kutipan dan referensi tersebut dapat digunakan untuk mengangkat dan menjadikan kasus ke dalam pendekatan strategis bersama berbasis bukti dan pengalaman untuk membantu otoritas dan kapasitas masyarakat adat dan komunitas lokal dalam pengelolaan sumber daya alam dan pengambilan keputusan di hadapan para pemimpin, penyandang dana, organisasi sejawat, dan mitra. Praktisi konservasi mungkin memandang alat dan sumber daya yang disoroti akan berguna pada setiap tahap pengembangan proyek—mulai dari perencanaan dan analisis situasi; sampai tahap implementasi; pemantauan, evaluasi, dan pembelajaran.

Kami mengakui bahwa bukti yang disajikan di bagian berikut sangat bergantung pada ilmu pengetahuan Barat dan mungkin mengkotak-kotakkan dan menyederhanakan hubungan dan dinamika yang kompleks antara manusia dan alam di tempat-tempat tertentu yang mendorong terciptanya sistem yang unik dan berkembang pesat. Dalam banyak Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal, keberlanjutan merupakan hasil dari cara hidup yang berakar pada peran dan tanggung jawab manusia dalam menjaga keseimbangan semua kehidupan,[17] yang secara mendasar bertentangan dengan pengelompokan yang menjadi ciri khas ilmu pengetahuan Barat. Dalam konteks saat ini, kami menyadari bahwa upaya konservasi yang dipimpin oleh masyarakat masih hidup dalam masyarakat yang dipengaruhi pemikiran ilmiah Barat dalam membentuk keputusan dan norma lingkungan di tingkat mikro dan makro. Pengetahuan dan Sains Adat adalah keseluruhan sistem pengetahuan itu sendiri, setara dengan lainnya.[18] Hasil yang diinginkan dari menyediakan sintesis ilmu pengetahuan Barat adalah untuk mendukung praktisi konservasi yang menggunakan berbagai cara untuk mengetahui dan bekerja agar lebih dari sekadar mengandalkan ajaran dan praktik ilmiah Barat, untuk memperluas cara mendapatkan pengetahuan yang memberikan masukan kepada konservasi. Bagian ini dimaksudkan untuk membantu orang-orang yang bekerja di persimpangan ini, memanfaatkan alat-alat sistem pengetahuan Barat beriringan dengan cara-cara menggali pengetahuan secara Adat dan lainnya.

Selain itu, TNC berkomitmen pada pendekatan berbasis hak asasi manusia untuk konservasi, berdiri bersama Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal saat mereka melindungi dan menggunakan hak-hak mereka. Komitmen tersebut dicerminkan dalam **Visi, Nilai, Kode Etik kami** serta pendekatan fundamental terhadap konservasi, termasuk Kerangka Kerja SPA ini. Kami menyadari pentingnya Persetujuan Dengan Informasi Awal Tanpa Paksaan. Menghormati dan mengedepankan hak asasi manusia Masyarakat Adat dan komunitas lokal merupakan kewajiban moral dan kondisi yang memungkinkan untuk terciptanya konservasi berkelanjutan dan kesejahteraan manusia. Untuk informasi lebih lanjut tentang pendekatan berbasis hak TNC, lihat **Panduan HAM TNC** (juga dibahas dalam bagian "Keadilan Manfaat, Dampak, dan Inklusi").

Pilar 1

Mengamankan Hak Atas Tanah, Air dan Sumber Daya

Pengetahuan, Bukti dan Pelaksanaan

POIN-POIN PENTING

- Pengakuan resmi atas hak dapat menjadi hal penting dalam konteks tertentu, tetapi tidak selalu berarti sama dengan mengamankan hak. Jenis hak milik yang dipegang, pengetahuan masyarakat atas hak mereka, kemampuan mereka melaksanakan hak-hak tersebut, serta pengakuan atas dan penghormatan hak oleh aktor lain berkontribusi terhadap terciptanya kepastian kepemilikan.

- Mengamankan hak dapat membantu menselaraskan insentif untuk penggunaan berkelanjutan dan pengelolaan tanah, perairan dan sumber daya dengan mendorong masyarakat, termasuk yang memegang teguh pengetahuan dan norma kepengurusan dan keberlanjutan untuk menggunakan suara dan kelembagaan mereka dalam keputusan pengelolaan sumber daya tersebut.

- Secara umum, kepastian kepemilikan dikaitkan dengan kesejahteraan positif manusia dan hasil pada lingkungan, akan tetapi seringkali ada hal-hal yang harus dipertukarkan. Pengetahuan kita mengenai bagaimana kepastian kepemilikan bersimpangan dengan faktor-faktor lain yang membentuk penggunaan berkelanjutan dan pengelolaan sumber daya masih terus berkembang, mengarah kepada pentingnya melakukan anasis situasi dan pemantauan dengan berhati-hati.

- Hak atas sumber daya pesisir dan air tawar sangatlah kompleks, terus berkembang dan membutuhkan pertimbangan ekstra dibandingkan dengan hak atas tanah. Fitur unik dalam sumber daya ini berkontribusi pada kompleksitas hak, tata kelola dan keamanan, dan hak penggunaan seringkali lebih umum daripada hak pengendalian dalam konteks ini.

ISTILAH UTAMA

Hak Milik—kewenangan untuk melakukan tindakan tertentu terkait dengan domain khusus. Hak Milik mencakup akses, penarikan (mis., ekstrasi), pengelolaan, pengecualian, pemindahtanganan (yaitu, pengalihan hak), dan proses dan kompensasi yang semestinya. Hak Milik seringkali digabungkan menjadi hak penggunaan (akses, penarikan) dan hak pengendalian (pengelolaan, kepemilikan, pengecualian, pengasingan).[19]

Hak Kolektif—Masyarakat Adat memiliki hak kolektif yang sangat penting untuk keberadaan, kesejahteraan dan pengembangan integral mereka sebagai manusia. Dalam hal itu, Negara mengakui dan menghormati hak Masyarakat Adat untuk mengambil tindakan kolektif, terhadap sistem atau institusi yuridis, sosial, politik, dan ekonomi mereka; dengan budaya mereka sendiri; untuk mengakui dan mempraktikkan keyakinan spiritual mereka; menggunakan bahasa dan bahasa mereka sendiri; dan terhadap tanah, wilayah, dan sumber daya mereka. Negara-negara harus memajukan, disertai partisipasi penuh dan efektif Masyarakat Adat, koeksistensi yang harmonis hak-hak dan sistem dari berbagai kelompok penduduk dan budaya.[20]

Bentuk Kepemilikan—menentukan siapa yang dapat mempergunakan sumber daya apa, untuk berapa lama dan dengan syarat apa.[21] Beberapa contoh mencakup publik, swasta, komunal, adat kolektif atau biasa.[22]

Kepastian kepemilikan—persepsi atau keyakinan yang dipegang oleh pemegang hak bahwa hak milik akan dijunjung oleh masyarakat—termasuk komunitas, pemerintah, dan pelaku lainnya.[23] Ini hasil dari interaksi antara bentuk kepemilikan, hak milik, dan lembaga.

Hak Milik

> Lihat **"Alat 2: Pemetaan Pemegang Hak dan Pemangku Kepentingan Tenurial"** untuk membuat pola yang membantu mengidentifikasi pemegang hak dan pemangku kepentingan di suatu wilayah, sekaligus apakah hak dipegang secara formal atau informal.

Faktor-faktor yang mempengaruhi apakah seseorang atau komunitas memiliki jaminan kepemilikan adalah faktor yang rumit. Hak Milik menegaskan jenis tindakan yang dapat diambil oleh pemegang hak terkait tanah, perairan atau sumber daya. Hak Milik meliputi *menggunakan hak* —akses dan penarikan—dan *hak kendali*—pengelolaan, pengecualian, dan hak untuk membagi atau menjual[19, 24]—selain proses hukum dan kompensasi.
Jenis hak yang diberikan kepada orang dan komunitas mungkin berbeda di dalam dan pada seluruh wilayah. Misalnya, sebuah komunitas mungkin memiliki hak penggunaan dan kendali penuh atas tanah penggembalaan dan dapat memberikan akses ke tanah kepada komunitas tetangga pada waktu tertentu dalam setahun atau selama kekeringan. Suatu wilayah danau dapat dimiliki oleh pemerintah, dan masyarakat yang tinggal di sekitarnya bisa mendapatkan akses dan hak penarikan (misalnya, memancing) sepanjang tahun, kecuali selama musim pemijahan. Sebuah wilayah laut utamanya adalah akses terbuka, dengan hak pengelolaan tradisional yang diakui dan ditegakkan oleh komunitas lokal dan tetangga, dan akses ke wilayah tersebut hanya diperbolehkan bergantung pada musim atau hak penarikan hanya diperbolehkan untuk spesies tertentu.

Yang terpenting, *hanya memegang hak saja tidaklah cukup*. Hak-hak tersebut harus diakui dan dilaksanakan (contohnya, dihormati). Individu, rumah tangga, komunitas, bisnis, dan pemangku kepentingan lainnya dapat secara informal mengakui dan menegakkan hak milik bahkan jika hak tersebut tidak diakui secara resmi oleh pemerintah (mis., hak de facto). Secara resmi, pemerintah dapat menyediakan dokumentasi dan pengakuan hukum atas hak dari pemegang hak (mis., hak de jure). Bergantung pada konteksnya, komunitas dapat membutuhkan baik pengakuan dan penegakan informal dan formal yang memadai untuk menyediakan kepastian kepemilikan pada saat ini. Apakah hak-hak formal diperlukan pada akhirnya bergantung pada apakah pemerintah atau pelaku lain menjunjung tinggi atau menentang sistem tersebut. Interaksi antara pengakuan formal dan informal dan penegakan hak milik merupakan faktor kunci dalam menentukan kepastian kepemilikan.

Kepastian kepemilikan

> Lihat **"Alat 3: Penilaian kepastian kepemilikan"** untuk memeriksa guna membantu memahami kepastian kepemilikan dalam konteks tertentu, serta bagaimana keamanan tersebut dapat didukung dalam kemitraan dengan Masyarakat Adat dan komunitas lokal.

Kepastian kepemilikan adalah persepsi atau keyakinan pemegang hak bahwa hak milik akan dijunjung oleh masyarakat, termasuk komunitas, pemerintah, dan pelaku lainnya.[23,25-26] Pada akhirnya hal ini merupakan pandangan subjektif seseorang atas hak atas tanah, air, dan sumber daya, dan merupakan interaksi antara hak milik dan lembaga formal dan informal yang menentukan penggunaan dan akses terhadapnya. Sebagai akibatnya, mungkin saja ada kepastian kepemilikan tanpa hak formal seperti yang disebutkan di atas, dan banyak orang mungkin merasa tenurial adat mereka aman jika tidak dipertanyakan. Misalnya, ada beberapa kasus di mana hak legal atas air dipegang oleh individu atau komunitas, tetapi banyak pengguna air sering merasa memiliki kepastian atas akses dan penggunaan air. Kami berfokus pada kepastian kepemilikan karena persepsi keamanan atas tanah, air, dan sumber daya merupakan faktor kunci dalam keputusan yang dibuat terkait cara menggunakan dan mengelola apa yang mereka miliki. Misalnya, jika pemegang hak merasa bahwa mereka memiliki ketidakpastian kepemilikan, kemungkinan kecil mereka akan melakukan investasi jangka panjang (misalnya, mengelola panen kayu mereka secara berkelanjutan, berinvestasi dalam praktik konservasi tanah dan air) karena manfaat apa pun dari keputusan ini tidak akan diperoleh selama bertahun-tahun dan tidak ada jaminan bahwa hak akan tetap dipegang pada saat itu. Sebagai perbandingan, pemegang hak dengan kepastian kepemilikan mungkin memiliki kepastian lebih besar bahwa mereka sendiri akan mendapat manfaat dari setiap investasi atau keputusan penggunaan sumber daya karena ada sedikit kekhawatiran akan perambahan, konflik, atau tindakan lain yang akan mengakibatkan hilangnya penggunaan atau kendali atas tanah, perairan, atau sumber daya. Sederhananya, semakin aman masyarakat dalam kepemilikan mereka, semakin besar kemungkinan mereka akan terlibat dalam pemanfaatan dan pengelolaan yang berkelanjutan.[27-30]

Tabel 2: *Contoh-contoh ilustratif dari isu-isu kepastian kepemilikan umum dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan untuk mengatasinya.*[27] *Penilaian risiko penuh diperlukan untuk memahami potensi konsekuensi yang tidak diinginkan dari tindakan kepastian kepemilikan (seperti meningkatnya konflik atau pembalasan) karena hak dapat diperdebatkan. Pada akhirnya, kesesuaian (dan kemungkinan keberhasilan atau kegagalan) setiap strategi untuk memperkuat kepastian kepemilikan akan bergantung pada konteks, sumber dan pemicu ketidakpastian, dan kondisi yang memungkinkan. Lihat Alat 3 untuk informasi lebih lanjut.*

Permasalahan Kepastian Kepemilikan	Contoh-Contoh Kegiatan untuk Memperkuat Kepastian Kepemilikan
Komunitas memegang hak informal atau hak biasa namun tidak diakui atau dijunjung oleh pemerintah atau pelaku lainnya.	Memetakan dan merencanakan dukungan, bantuan hukum untuk mengarahkan sistem legal dan birokratis, dibarengi dengan peningkatan kapasitas untuk menjalankan hak, dan meminta dukungan pemerintah untuk mengakui dan menegakkan hak-hak komunitas.
Masyarakat memegang hak resmi akan tetapi tidak menyadarinya	Kampanye peningkatan kesadaran, diikuti dengan peningkatan kapasitas untuk melaksanakan hak tersebut
Komunitas memegang dan mengetahui hak-hak formal tetapi tidak mengetahui bagaimana menjalankannya.	Bantuan hukum untuk mengarahkan sistem legal dan birokratis, dibarengi dengan peningkatan kapasitas untuk menjalankan hak
Beragam pelaku melaksanakan hak formal dan informal atau mengklaim tanah, perairan dan sumber daya yang sama.	Memfasilitasi penyelesaian konflik antara pemegang hak, bantuan hukum untuk memperjelas hak, dan mengupayakan dukungan pemerintah dalam menegakkan hak-hak masyarakat
Instrumen hukum tersedia agar masyarakat dapat mengupayakan hak formal, tetapi mereka tidak memiliki hak formal	Pemetaan dan perencanaan dukungan, bantuan hukum untuk mengarahkan sistem legal dan birokratis, dibarengi dengan peningkatan kapasitas untuk menjalankan hak
Tidak ada instrumen hukum yang dapat dipergunakan masyarakat untuk mendapatkan hak resmi	Advokasi kebijakan untuk mendorong reformasi perundangan

Bentuk Kepemilikan

Bentuk Kepemilikan menentukan siapa yang dapat mempergunakan sumber daya apa, untuk berapa lama, dan dengan persyaratan apa.[21] Misalnya, mungkin ada pembatasan atau keterbatasan pada hak milik yang berdampak pada sumber daya spesifik mana hak tersebut berlaku (misalnya, hak untuk mengelola satu spesies tetapi tidak untuk spesies lain), dan untuk berapa lama hak tersebut berlaku (misalnya, hak yang dipertahankan sampai hak tersebut ditransfer vs. sewa terbatas waktu). Hal ini perlu dipertimbangkan dalam menentukan seberapa pastinya hak-hak tersebut. Sebagai contoh, jika sebuah komunitas memiiliki dan mengendalikan hak atas sebuah hutan selama 20 tahun, tetapi hak atas lapisan bawah tanah yang kaya mineral disewakan kepada sebuah perusahaan, masyarakat mungkin tidak merasakan kepastian dan keamanan atas hak-hak mereka.

Dalam konteks tempat tinggal Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal mungkin ada beberapa campuran bentuk kepemilikan publik, swasta, komunal, Masyarakat Adat kolektif, dan/atau adat. Dalam situasi ketika Penduduk Asli/Masyarakat Adat dilucuti dari kepemilikan komunal atau kolektif mereka, kami sering bekerja dalam kemitraan untuk memulihkan kepemilikan ini (misalnya, repatriasi tanah pribadi, perairan, atau sumber daya ke kepemilikan komunal atau kolektif; advokasi kebijakan untuk menetapkan kawasan yang dilindungi adat) atau memulihkan dan mendukung otoritas masyarakat adat dan komunitas lokal. Dalam bentuk kepemilikan publik, komunal, dan kolektif, sumber daya seringkali berupa kumpulan yang hak gunanya dimiliki oleh banyak pihak (seperti, akses dan penarikan/ekstraksi) tanpa disertai kemampuan yang untuk mengecualikan orang dari hak guna tersebut (misalnya, perikanan pesisir, hutan, padang rumput, dan akuifer). Dalam situasi seperti ini, perlu diklarifikasi siapa atau apa yang menentukan hak kendali (khususnya hak pengelolaan dan pengecualian) sejauh dimungkinkan dalam konteksnya, dan memperkuat sistem tata kelola bersama (dibahas di bagian berikutnya), terutama jika tidak ada etika kepengurusan yang kuat atau dengan kehadiran berbagai pelaku atau pendorong ekonomi yang kuat.

Bukti yang Mengemuka

Logika di balik mengapa dan bagaimana memperkuat kepastian kepemilikan dapat membawa manfaat positif secara keseluruhan menjadi jelas: memastikan kepemilikan dapat mengurangi ketidakpastian, memberikan kejelasan tentang siapa yang memiliki suara dalam keputusan penggunaan dan pengelolaan, mengidentifikasi siapa yang akan mendapat manfaat dari tanah, perairan, dan sumber daya, dan menjadi komponen kunci dalam membuka modal (misalnya, menyediakan akses ke kredit, memberdayakan pemegang hak untuk mengambil bagian dalam keputusan).[31-34] Namun, secara umum ada bukti yang lebih besar bahwa penguatan kepastian kepemilikan memiliki kaitan positif dengan kesejahteraan manusia dibandingkan dengan hasil pada lingkungan, dan tinjauan sistematis terkini menunjukkan bahwa bukti tentang hasil lingkungan di seluruh bioma, populasi, negara, dan faktor lainnya tidak konsisten.[27] Misalnya, ada kasus program sertifikasi top-down yang memicu hasil yang tidak diinginkan seperti konflik yang lebih besar dan ketidakpastian kepemilikan yang lebih besar karena mengabaikan atau tidak sesuai dengan lembaga adat dan sistem tata kelola sumber daya alam.[35]

Bukti-bukti tentang kemungkinan apakah penguatan kepastian kepemilikan akan mengarah pada hasil lingkungan dan kesejahteraan manusia yang positif masih terus muncul, maka diperlukan pemantauan cermat untuk menghindari atau mengatasi konsekuensi yang tidak diinginkan. Misalnya, kepastian kepemilikan yang telah diperkuat dapat meningkatkan insentif untuk membuat investasi tanah jangka panjang, tetapi hal ini dapat membawa investasi lebih besar dalam pertanian atau infrastruktur dibandingkan dengan pengelolaan atau perlindungan berkelanjutan.[27] Di sisi lain, wilayah dengan jumlah masyarakat yang memiliki kepastian kepemilikan yang lebih besar dapat mengurangi deforestasi melalui pemberian insentif manfaat yang diperoleh dari hutan melalui cara lain, seperti pembayaran untuk jasa ekosistem.[36]

Pada sistem perairan, kepastian kepemilikan yang menjelaskan siapa yang memiliki hak atas air atau organisme akuatik tertentu dan kapan, dapat mengatur negosiasi perjanjian ekstraksi dan penggunaan, serta bagaimana pemegang hak akan memantau dan menegakkan perjanjian ini.[37] Di wilayah pesisir, membangun sistem pengelolaan perikanan berbasis hak dapat membawa dampak positif pada stok ikan dan hasil sosial dan ekonomi yang bervariasi. Akan tetapi ini mungkin belum memadai untuk menyikapi dampak lingkungan yanglebih luas dari penangkapan ikan, misalnya pada spesies bukan sasaran atau tidak terlindungi dan ekosistem sekitarnya.[38-39]

Pertimbangan Khusus: untuk Hak-Hak pada Konteks Air Tawar dan Pesisir

Dikarenakan sifatnya yang cair, air tawar dan sumber daya pesisir kecil kemungkinannya untuk "dimiliki" seperti tanah atau kekayaan lain. Sebaliknya, kita perlu melihat siapa yang memiliki berbagai "kumpulan hak" (dan seringkali tumpang tindih), termasuk hak guna dan hak kendali, dan bagaimana hak atas air dikaitkan dengan hak atas tanah. Misalnya, dengan banyaknya sumber daya air tawar, skala hak dan pengelolaan sumber daya tidak sejalan dengan skala ekologis sistem, (misalnya, sungai seringkali melintasi beberapa batasan politik). Selanjutnya, bahkan jika sebuah komunitas memiliki hak untuk menggunakan atau mengelola sumber daya air tawar, jika sumber daya di hulu habis, mereka mungkin tidak akan pernah dapat menggunakan hak-hak ini. Hasilnya, penting untuk mengkaji secara berhati-hati bagaimana karakteristik sumber daya air tawar dan pesisir dapat menciptakan tantangan atau peluang untuk kepastian kepemilikan, dan berbagai ancaman terhadap kepastian kepemilikan yang dapat berasal langsung dari karakteristik sumber daya alam tertentu Hak saja tidak dapat menjamin kemampuan untuk menggunakan atau mendapatkan manfaat dari sumber daya air tawar dan pesisir. Banyak badan air dialokasikan secara berlebihan, sehingga jumlah hak melebihi sumber daya yang tersedia (misalnya, hak pengambilan air tawar, hak penangkapan ikan di pesisir). Dalam konteks air tawar, kondisi ini semakin buruk selama tahun-tahun kekeringan. Demikian pula, banyak badan air yang terkontaminasi, membuat sumber daya yang tersedia tidak dapat digunakan untuk beberapa tujuan. Untuk itu, penting untuk mempertimbangkan dinamika kekuatan antara pengguna sumber daya air tawar dan pesisir karena ketidakseimbangan dapat menjadi perintang bagi kelompok tertentu untuk menuntut hak-hak mereka.

© RON GEATZ/TNC

© JORGEN HOG

Studi Kasus

Mengamankan Hak atas Wilayah dan Sumber Daya di Tanzania

Rangelands utara Tanzania terbentang sebesar 8 juta acre (3,2 juta hektar) dan mencakup beberapa situs migrasi satwa liar paling penting di Afrika, termasuk Serengeti dan Kawah Ngorongoro, serta tempat asal penggembala Maasai dan Hadzabe dan Akie, beberapa Suku pemburu kelompok terakhir yang tersisa di Bumi. Kepadatan populasi meningkat hampir tiga kali lipat di wilayah ini dalam 40 tahun terakhir, menyebabkan persaingan antara penggunaan lahan (terutama pertanian dan penggembalaan), mengancam cara hidup penggembala dan pemburu kelompok, serta satwa liar yang bergantung pada lahan ini untuk penggembalaan dan migrasi. Desa memiliki hak untuk membagi kembali semua tanah desa mereka, dan begitu tanah secara resmi diberikan kepada seseorang, tanah itu dapat dibagi lagi kepada anak laki-laki orang tersebut. Undang-undang ini mendukung kepemilikan lokal dan individu. Selain itu, pemerintah pusat Tanzania memiliki otoritas besar dan dapat mengambil alih tanah pertanian komersial besar jika desa tersebut tidak memiliki sertifikat resmi (kepemilikan) melalui Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU).

TNC di Afrika bekerjasama dengan komunitas dan mitra untuk menjamin kepemilikan sah dan hak pengelolaan suku penggembala dan pemburu kelompok melalui **peruntukan SHGU kolektif**. Perangkat hukum ini dipelopori oleh organisasi Ujamaa Community Resource Trust dan mengembangkan penunjukan SHGU yang berlaku untuk individu untuk memungkinkan masyarakat memiliki dan mengelola tanah tradisional dan memperoleh manfaat dari perusahaan berbasis sumber daya alam seperti ekowisata dan kredit karbon. SGHU kolektif memberikan perlindungan tambahan terhadap kumpulan sumber daya umum yang berguna untuk pengelolaan jangka panjang serta akses penggembalaan yang lebih baik dan aman dari waktu ke waktu.

Dengan memperluas model ini di seluruh rangeland Tanzania membawa kami melihat akses dan kepemilikan yang lebih setara, dan hak komunal atas tanah yang lebih terjamin dalam jangka panjang sebagai dasar produksi ternak gembala dan sistem pengelolaan lahan. Ketika koridor penggembalaan lintas batas tetap terbuka, ternak dan satwa liar menjadi lebih sehat, dan kondisi ini mengurangi konflik antar desa serta dapat meningkatkan pendapatan masyarakat melalui peluang penghidupan yang berkelanjutan. Mekanisme kepemilikan itu sendiri dikaitkan dengan pengelolaan lahan berkelanjutan melalui persyaratan Rencana Tata Guna Lahan Desa dan menjadi dasar untuk bernegosiasi dengan pemerintah dan operator pariwisata. Meskipun ditemukan kasus-kasus perambahan pertanian, ketika diuji,

KETERANGAN GAMBAR
Bioma Kerangka VCA

TERESTRIAL **AIR TAWAR** **PESISIR**

keputusan pengadilan memenangkan SHGU dan kemudahan. Selama sembilan tahun terakhir, 5 juta acre (~2 juta hektar) telah dimasukkan ke dalam Rencana Tata Guna Lahan Desa (langkah pertama untuk mendapatkan penunjukan SHGU). 4,2 juta acre (~1,7 juta hektar) rangeland pada keseluruhan lanskap dilindungi melalui 80 SHGU dan dua Area Pengelolaan Satwa Liar (area tanah komunal yang disisihkan secara khusus sebagai habitat satwa liar oleh desa anggota), dan SHGU tambahan diharapkan akan melindungi 370.650 acre (~150.000 hektar) lainnya pada Juni 2022. Kesuksesan SHGU membuka jalan untuk mencegah konversi lahan yang dapat menyebabkan hilangnya area penggembalaan.

Namun, masih ada tantangan berkelanjutan yang harus diselesaikan. Setelah rencana penggunaan lahan diberi batas dan SHGU dibuat sekalipun, masih terjadi penggembalaan berlebihan di SHGU. Program manajemen penggembalaan holistik TNC bertujuan untuk mempromosikan pendekatan penggembalaan terbaik di CCRO, seperti rotasi penggembalaan, sistem pemblokiran, dan penggiringan berkelompok yang dapat mengurangi tekanan penggembalaan di lahan Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU). Program ini juga akan membantu mengamankan kesepakatan penggembalaan antar desa yang berusaha menghubungkan kawasan SHGU dengan kawasan penggembalaan lainnya. Walau SHGU semakin diakui sah oleh pemangku kepentingan lokal, ada permasalahan tata kelola yang sedang berjalan dan kebutuhan untuk memastikan bahwa semua SHGU sama-sama dihormati.

Mengatasi Kelangkaan Air Melalui Hak Masyarakat Adat di Lembah Sungai Colorado

Lembah Sungai Colorado adalah salah satu lanskap paling ikonik di Amerika Serikat, tempat beradanya Grand Canyon dan berbagai pengurus dan suku tradisional. Lembah ini melindungi berbagai ekosistem air tawar dan darat yang menampung keanekaragaman hayati yang sangat besar, dan merupakan rumah bagi banyak budaya, komunitas, dan kepentingan ekonomi. Selama ribuan tahun, air dari Sungai Colorado dan anak-anak sungainya menjadi sumber kehidupan bagi Masyarakat Adat setempat, dan sangat penting bagi kesejahteraan budaya dan ekonomi mereka. Penjajahan tanah dan perairan oleh pemukim mengubah secara tajam kemampuan Masyarakat Adat untuk terus mendiami, memanfaatkan, dan merawat sungai dan lahan di kawasan ini. Genosida, pemindahan paksa dari tanah leluhur, pelanggaran perjanjian, termasuk sejumlah undang-undang dan kebijakan federal yang dirancang untuk melemahkan kontrol para suku atas sumber daya dan untuk mengasimilasi Masyarakat Adat merampas akses mereka ke tanah, air, makanan, dan sumber daya alam lainnya di DAS. Selain itu, pembangunan sistem infrastruktur perairan secara menyeluruh berupa bendungan, kanal dan waduk semakin merusak alam dan sangat mengabaikan kebutuhan air Masyarakat Adat, yang dipaksa bertani dan beternak secara non adat dan hidup di tempat yang gersang.

Mengingat lebih dari 40 juta orang bergantung pada Sungai Colorado untuk pertanian dan kebutuhan ruman tangga maka alirannya dikontrol secara intensif dengan seperangkat aturan dan undang-undang yang lengkap untuk menentukan pengelolaan dan penggunaan air oleh banyak pihak yang berkepentingan di DAS tersebut. Preseden hukum memberi hak kepada Suku Bangsa atas air yang sangat penting dan prioritas kepada yang berusia lanjut[e] di DAS. Namun, forum dan proses pengambilan keputusan utama terkait air belum cukup mengakui peran pengelolaan air dan sumber daya alam oleh Suku. Sekarang ini, 22 dari 30 Suku Bangsa di DAS telah mengukur hak air di setidaknya satu negara bagian tempat reservasi mereka berada, dan mengendalikan sekitar 3,5 miliar meter kubik air per tahun, yang merupakan sekitar 20 persen dari air di DAS. Jumlah itu diperkirakan akan meningkat karena Suku Bangsa dengan

e. Pengalokasian dan penggunaan air oleh entitas non federal di banyak negara bagian di A.S. Barat diatur oleh Doctrine of Prior Appropriation, di mana entitas pertama yang mengambil sejumlah air dari sumber untuk penggunaan yang bermanfaat memperoleh hak untuk penggunaannya di masa depan dibandingkan dengan pengguna selanjutnya. Hak atas air cadangan federal, termasuk yang dilindungi atas nama Suku Bangsa dikaitkan dengan reservasi federal Amerika Serikat atas tanah dan biasanya memiliki tanggal prioritas terkait dengan tanggal reservasi federal tanah. Dikarenakan alasan tersebut, hak Suku Bangsa atas air di A.S. Barat seringkali diberikan dengan tanggal sangat awal dan prioritas kepada yang berusia lanjut.

klaim yang tersisa di beberapa negara bagian DAS mengukur hak atas air mereka. Sebagian besar hak air suku ini belum dikembangkan (tidak dilaksanakan atau digunakan) tetapi ketika nanti dikembangkan kemungkinan akan menggantikan penggunaan air saat ini.[f] Terlepas dari besarnya air milik suku, banyak pelaku kuat di DAS (misalnya, pemerintah federal dan negara bagian, pengguna air utama termasuk kotamadya dan bisnis pertanian) yang dengan sengaja dan sistematis menjauhkan Suku Bangsa dari upaya untuk melindungi dan mengembangkan hak atas air mereka, dan menggagalkan upaya sukarela partisipasi suku dalam negosiasi kebijakan. Baru-baru ini pada 2019, dikarenakan keengganan negosiator negara bagian dan federal untuk melihat dengan seksama peran suku air dalam mengkaji risiko dan solusi kelangkaan air, Suku Bangsa seringkali dikecualikan dari perancangan program untuk mengurangi kelangkaan air. Pengecualian ini menghasilkan solusi yang gagal untuk mengakui dan menghormati perjanjian dan hak-hak lain Masyarakat Adat, dan menghilangkan kesempatan untuk bekerja dengan Suku-Suku Bangsa untuk memobilisasi air suku dalam mengatasi tantangan sosial-ekonomi dan lingkungan DAS. Proses kebijakan ini juga kehilangan kesempatan penting untuk mengintegrasikan perspektif Masyarakat Adat tentang pengelolaan sumber daya, termasuk keterkaitan antara budaya dan spiritual adat dengan tanah dan perairan di DAS dalam membentuk masa depan sungai bersama dan sakral ini.

Program Sungai Colorado TNC berkerja di tujuh negara bagian DAS di Amerika Serikat (Wyoming, Colorado, Utah, New Mexico, Arizona, Nevada, and California), di Mexico serta pada skala DAS. Fokusnya adalah tiga strategi yang menyeimbangkan kebutuhan air di antara para pengguna (termasuk alam), memperbaiki infrastruktur lain dan operasional lainnya untuk memperbaiki alur lingkungan, dan memajukan inisiatif Air Suku Bangsa. Melalui Inisiatif Air Suku Bangsa, kami bekerjasama dengan Suku-Suku Bangsa untuk memajukan kepentingan dan posisi mereka dalam menanggulangi tantangan sosial ekonomi dan lingkungan yang mendesak, melalui peningkatan suara Suku Bangsa dalam diskusi kebijakan utama untuk membantu kepengurusan mereka atas DAS, termasuk membuat proyek-proyek konservasi air tawar inovatif di lapangan yang mendorong solusi lebih setara dan jangka panjang bagi manusia dan alam. Misalnya, proses negosiasi ulang **Pedoman Sementara Sungai Colorado untuk Kekurangan DAS Bawah dan Operasi Terkoordinasi untuk Danau Powell dan Mead**, TNC diundang untuk bekerjasama dengan Suku Bangsa dan organisasi multi Suku Bangsa untuk memahami dan memaukan tujuan mereka, termasuk memastikan bahwa panduan yang dibuat berikutnya mencerminkan pemahaman komprehensif mengenai hak air Suku Bangsa.

Melibatkan Suku Bangsa di Lembah Sungai Colorado telah mengubah pendekatan TNC terhadap kegiatan terkait dengan kelangkaan air. Pelibatan awal kami menunjukkan berbagai peluang menjanjikan bagi upaya proyek dan kebijakan untuk mengatasi kelangkaan air dan kebutuhan lingkungan di wilayah DAS. Upaya ini juga membawa kami mempertimbangkan beberapa implikasi keadilan dan HAM bagi Masyarakat Adat penting dalam pekerjaan ini, termasuk kebutuhan akan proses rekonsiliasi yang menangani kekurangan sumber daya di masa lalu dan pengakuan atas peran sektor konservasi pada warisan tersebut. Kami berkomitmen untuk menciptakan solusi yang tidak membawa kerugian lebih lanjut kepada komunitas rentan tetapi, sebaliknya, membangun kemitraan untuk memperkuat kekuatan dan kuasa komunitas ini untuk bersama-sama menciptakan solusi dan proyek yang saling menguntungkan.

---

f. Hal ini dikarenakan tanggal prioritas senior klaim hak milik federal Suku dan karena beberapa artikel di dalam compacts Lembah Sungai Colorado yang menyatakan bahwa hak-hak Suku tidak tunduk pada compacts.

© MWANGI KIRUBI

Hak Komunal dalam Perikanan Pesisir Kenya

Berada di tepi utara pantai Kenya, Bentang Laut Lamu-Tana memiliki sumber daya pesisir yang kaya dan beragam, termasuk lebih dari 66 persen hutan bakau Kenya, beberapa ikan sirip pantai dan krustasea dengan kepadatan tertinggi di Kenya, dan perpaduan unik jenis karang dan ikan antara Teluk Arab dengan Afrika Timur. Karang langka dan endemik bersama dengan ikan yang terancam punah, penyu, hiu pantai, dan dugong dalam jumlah yang sangat kecil juga terdapat di sini. Mata pencaharian masyarakat pesisir di sini sebagian besar bergantung pada sumber daya alam tersebut, dan dengan terbatasnya alternatif pekerjaan, tekanan dan eksploitasi berlebihan menjadi meningkat. Seiring dengan konflik yang sedang berlangsung dan keterpencilan yang membatasi pembangunan dan akses ke pasar, mata pencaharian dan sumber daya di daerah tersebut terancam.[40]

Dalam meningkatkan kepemilikan lokal dan pengelolaan sumber daya ini, TNC, Northern Rangelands Trust (NRT), dan mitra lainnya mendampingi masyarakat dalam memastikan hak pengelolaan bersama di berbagai yurisdiksi pengelolaan sumber daya alam dan masyarakat untuk mengintegrasikan pendekatan pengelolaan sumber daya holistik pada ekosistem wilayah pesisir. Model “konservasi komunitas” yang diatur dalam Undang-Undang Konservasi dan Pengelolaan Satwa Liar (2013) telah diterapkan secara luas terhadap pengelolaan komunitas di wilayah darat. Bersama pendampingan dan bantuan teknis NRT dan TNC, pendekatan ini diadopsi oleh Bentang Laut Lamu Tana untuk masyarakat pesisir dan wilayah maritim, menghubungkan beberapa desa, perikanan, dan habitat dalam Rencana Pengembangan Konservasi Rencana ini menggabungkan panduan rancangan penting yang diperlukan dalam konservasi pesisir yang efektif.

Empat konservasi komunitas pesisir, Kiunga, Awer, Pate, and the Lower Tana Delta, telah dibentuk dan pada wilayah konservasi tersebut berbagai lembaga pengelolaan sumber daya komunitas wajib mendapatkan izin untuk menyediakan pemberdayaan hukum kepada konservasi dan komunitas untuk mengelola keseluruhan sumber daya pesisir, mengingat berlakunya berbagai undang-undang dan yurisdiksi. Unit pengelolaan bersama yang dikelola masyarakat, yang disebut Unit Pengelolaan Pantai (BMU), bertanggung jawab untuk mengelola penggunaan dan akses perikanan rakyat. BMU didukung oleh kerangka hukum dalam Peraturan Perikanan Kenya (2007), dan dimaksudkan untuk menyatukan kelompok pengguna sumber daya dan badan pemerintah untuk berbagi tanggung jawab pengelolaan dan konservasi perikanan. 21 BMU perikanan telah dibentuk dalam empat wilayah konservasi dan telah dilaksanakan pelatihan kepemimpinan, perikanan, pengelolaan bersama, dan pengelolaan

keuangan. Setiap BMU menyerahkan AD/ART kepada pemerintah negara untuk dikaji dan mendapatkan sertifikat pendaftaran BMU baru, yang secara efektif memberdayakan kendali komunitas atas sumber daya perikanan mereka. Pembentukan konservasi dan BMU terkait telah memungkinkan Konservasi Komunitas Laut Pate untuk melakukan penutupan sementara gurita (sejenis wilayah laut yang dikelola secara lokal) yang mendorong peningkatan partisipasi perempuan dalam kegiatan konservasi, peningkatan tangkapan dan ukuran gurita, harga pasar yang lebih baik, peningkatan populasi ikan lain, dan kondisi habitat yang lebih baik.

Kunjungan pertukaran pembelajaran antara konservasi Pate dan Kiunga dan Lower Tana Delta menginspirasi Konservasi Komunitas Kiunga untuk menerapkan penutupan serupa di daerah penangkapan ikan mereka di dalam Cagar Alam Laut Kiunga (KMNR). Perlindungan dan konservasi laut dikelola oleh Layanan Margasatwa Kenya (KWS) dalam bentuk taman laut yang dilaksanakan dengan baik dengan zona larangan tangkap yang melindungi perikanan utama dan cagar alam laut, di wilayah yang memperbolehkan penangkapan ikan subsisten dengan alat tangkap tradisional dan tidak dilaksanakan dengan baik. Dikarenakan penetapan Kiunga sebagai cagar laut. proses formalnya lebih rumit, dan memerlukan persetujuan tingkat nasional memastikan otoritas pengelolaan masyarakat di bawah KWS. Ini termasuk meningkatkan kesadaran masyarakat desa-demi-desa dan melakukan pertemuan peningkatan kapasitas untuk melakukan penutupan sementara gurita, mengubah nama konservasi menjadi Asosiasi Margasatwa Komunitas Kiunga (KICOWA) untuk beroperasi di dalam area yang ditetapkan, dan menyerahkan surat kepada KWS berisikan keputusan komunitas untuk melakukan penutupan gurita sementara di dalam KMNR. Setelah menyelesaikan proses ini, KICOWA berhasil menetapkan dua temporary penutupan gurita pada Maret 2021, yang pertama kali dilaksanakan dalam cagar laut nasional dan merupakan perkembangan pesat dalam mengintegrasikan pendekatan yang lebih berbasis masyarakat dalam pengelolaan kawasan perlindungan laut Kenya.

Mencapai pengelolaan ekosistem pesisir efektif di Kenya utara membutuhkan penyelarasan menyeluruh terhadap undang-undang dan lembaga yang terkait dengan setiap penetapan sumber daya dan kepemilikan. Kerja TNC dan mitra lokalnya berfokus pada penguatan tata kelola dengan mendukung masyarakat dalam membentuk dan menempatkan staf di lembaga-lembaga yang diperlukan untuk mengelola sumber daya alam secara kolaboratif, dan mendorong pengembangan sinergi pada berbagai lembaga konservasi yang dipimpin oleh masyarakat.

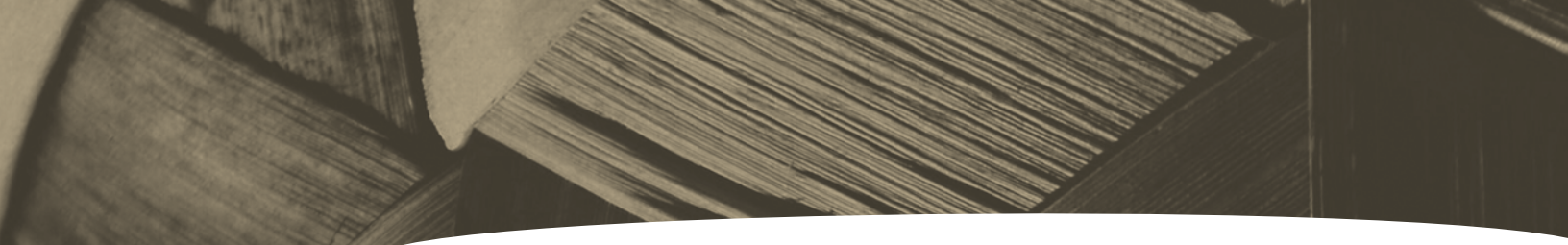

Alat dan Sumber Daya

ALAT 2: MODEL - PEMETAAN PEMEGANG HAK DAN STAKEHOLDER

Mengingat hak yang dimiliki (atau tidak dimiliki) atas tanah, air, dan sumber daya sangat penting untuk memahami konteks yang mendasari suatu tempat, maka penting untuk melakukan tindakan agar lebih memahami bentuk penguasaan sumber daya, para aktor dengan hak atau kepentingan atas sumber daya, jenis pengakuan yang mereka miliki, dan hak atau klaim yang berpotensi tumpang tindih. Model ini dapat digunakan selama analisis situasi untuk mendokumentasikan informasi seraya berkonsultasi dengan instrumen kebijakan lokal, regional, dan nasional, dinas sumber daya alam (atau lembaga pemerintah serupa), dan masyarakat atau lembaga perwakilannya. Latihan ini harus diikuti oleh "Alat 3: Penilaian Kepastian Kepemilikan" untuk menentukan keamanan hak, dan kegiatan mana yang mungkin sesuai untuk mengatasi sumber ketidakpastian.

ALAT 3: DIAGNOSTIK—PENILAIAN KEPASTIAN KEPEMILIKAN

Kepastian Kepemilikan adalah topik yang kompleks dengan banyak hal yang saling bersinggungan dan mempengaruhi pertimbangan. In "Alat 2: Pemetaan Pemegang Hak dan Pemangku Kepentingan Tenurial," kami menentukan bentuk penguasaan sumber daya, para aktor yang memiliki hak atau kepentingan atas sumber daya, jenis pengakuan yang mereka miliki, dan hak atau klaim yang berpotensi tumpang tindih. Dengan mempergunakan informasi ini, kami sekarang mengidentifikasi potensi sumber ketidakamanan tenurial yang dihadapi oleh Masyarakat Adat dan komunitas lokal, dan tindakan apa yang mungkin diambil oleh organisasi konservasi dalam kemitraan dengan Masyarakat Adat dan komunitas lokal untuk mendukung penguatan kepastian kepemilikan. Informasi ini harus didiskusikan dengan masyarakat, atau lembaga perwakilannya, selama analisis situasi, dengan menggunakan wawancara informan kunci dan diskusi kelompok terfokus.

Mohon dicatat,* ***penilaian risiko penuh sangat dibutuhkan* *untuk memahami potensi konsekuensi yang tidak diinginkan (misal, konflik meningkat atau pembalasan) dari tindakan mitigasi, karena hak seringkali menjadi perselisihan. Pada akhirnya, kesesuaian (dan kemungkinan keberhasilan atau kegagalan) dari setiap strategi untuk memperkuat penguasaan keamanan akan bergantung pada konteks, sumber dan pemicu ketidakamanan, dan kondisi yang memungkinkan*

© KEVIN ARNOLD

Pilar 2

Kepemimpinan yang Kuat, Tata Kelola, dan Kapasitas Manajemen

Pengetahuan, Bukti, dan Praktik

POIN-POIN PENTING

- Kapasitas yang kuat adalah dasar bagi kemampuan masyarakat untuk bertindak secara kolektif, mengatur secara efektif, dan mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan, serta kemampuan mereka untuk mengadvokasi hak-hak mereka atas wilayah dan sumber daya, menegaskan otoritas pengambilan keputusan, bernegosiasi dengan pemangku kepentingan dan/atau pemegang hak lainnya, mengakses dan mengelola dana dan dukungan eksternal, dan mengejar peluang ekonomi yang ditentukan sendiri dan selaras dengan budaya.

- Strategi pengembangan kapasitas menggunakan berbagai kegiatan yang menargetkan berbagai jenis modal—termasuk manusia, sosial, kelembagaan, sistemik, alam, dan ekonomi—yang perlu disesuaikan dengan tingkat kapasitas dan kebutuhan masyarakat saat ini.

- Penting untuk bekerja dengan pemimpin komunitas yang dipilih serta dalam sistem dan institusi pengetahuan mereka yang ada jika memungkinkan, sambil membuat ketentuan khusus untuk keterlibatan yang berarti dari identitas sosial yang rentan atau kurang terwakili (misalnya, perempuan, pemuda, kurang beruntung atau tertindas secara ekonomi, etnis minoritas, dll) dalam mendefinisikan aturan dan peraturan yang mengatur mereka.

- Komunitas bisa sangat berhasil dalam mengatur sumber daya milik bersama dan komunitas ini serta sumber daya itu sendiri sering kali memiliki beberapa karakteristik bersama (untuk lebih lanjut tentang karakteristik ini, silahkan baca terus).

ISTILAH UTAMA

Kapasitas—konsep multi-segi umumnya digambarkan sebagai "memiliki kemampuan untuk bertindak," dan berbagai jenis modal termasuk manusia, sosial, kelembagaan, alam, dan ekonomi harus digunakan untuk melakukannya.[12-13]

Tindakan Kolektif—tindakan yang diambil oleh suatu kelompok untuk mencapai tujuan bersama.[41-44]

Sumber Daya Milik Bersama—barang apa pun yang berkurang kuantitas atau kualitasnya karena penggunaan (yaitu, dapat dikurangkan) dan mahal atau sulit untuk dikeluarkan dari penggunaan orang lain.[45]

Tata kelola—dalam konteks pengelolaan sumber daya alam, mengacu pada norma, institusi, dan proses yang menentukan bagaimana kekuasaan dan tanggung jawab atas sumber daya alam dilaksanakan, bagaimana keputusan dibuat, dan bagaimana masyarakat berpartisipasi dan memperoleh manfaat dari pengelolaan sumber daya alam.

Pengetahuan Masyarakat Adat—kumpulan pengetahuan, praktik, dan kepercayaan kumulatif, berkembang dan diatur oleh proses adaptif dan diturunkan dan lintas (melalui) generasi melalui transmisi budaya, tentang hubungan makhluk hidup (termasuk manusia) dengan sesamanya dan dengan lingkungannya.[46] Konsep ini terkadang disebut sebagai "pengetahuan lokal" oleh mereka yang tidak mengidentifikasi diri sebagai Masyarakat Adat.

Institusi—aturan dan/atau organisasi yang menyusun interaksi politik, ekonomi, dan sosial. Terdiri dari aturan informal (misalnya, sanksi, tabu, adat, tradisi, dan kode etik), dan aturan formal (misalnya, konstitusi, undang-undang, hak milik).[47]

Kohesi Sosial—suatu bentuk modal sosial yang mempengaruhi tindakan kolektif; properti kelompok yang menggambarkan tingkat keterhubungan dan solidaritas yang dialami oleh para anggotanya, yang bila kuat dapat menumbuhkan rasa memiliki dan pengalaman bersama memberikan dasar penting untuk kerjasama.

Jenis Kapasitas, Pengembangan Kapasitas, dan Hasil Lingkungan

Pengelolaan sumber daya alam yang dipimpin masyarakat adalah proses sosial yang kompleks yang memerlukan tindakan kolektif dan tata kelola sumber daya milik bersama yang efektif, dan didukung oleh investasi dalam berbagai jenis modal (yaitu, aset—baik moneter maupun non-moneter; lihat Tabel 3). Kebutuhan akan anggota, pemimpin, dan lembaga masyarakat yang kuat dan cakap menjadikan pengembangan kapasitas sebagai salah satu strategi yang paling dapat diterapkan dan mendasar dari Kerangka SPA. Ada banyak bukti bahwa investasi dalam strategi pengembangan kapasitas penting untuk hasil lingkungan.[48-49] Kapasitas adalah konsep multi-segi yang umumnya digambarkan sebagai "memiliki kemampuan untuk bertindak," dan berbagai jenis modal termasuk manusia, sosial, kelembagaan, alam, dan ekonomi harus digunakan untuk melakukannya.[12-13] Kegiatan peningkatan kapasitas biasanya berusaha untuk meningkatkan satu atau lebih dari bentuk modal ini, khususnya di mana kebutuhan diidentifikasi oleh analisis situasi atau prioritas diungkapkan oleh mitra masyarakat adat dan lokal (Tabel 3). Meskipun pengelolaan sumber daya alam yang dipimpin oleh masyarakat sangat bergantung pada konteks,[50] kapasitas adalah dasar dan investasi dalam memperkuat satu atau lebih jenis modal ini hampir selalu dibutuhkan.

Tabel 3: *Jenis modal, target peningkatan kapasitas, dan beberapa contoh kegiatan. Perhatikan bahwa penting untuk mempertimbangkan setiap jenis modal dalam setiap penilaian kapasitas masyarakat (untuk contoh tentang cara menilai, lihat Hartanto et al., 2014).*[51]

Jenis modal	Target pengembangan kapasitas	Contoh Kegiatan
Manusia	• Kesadaran • Pengetahuan • keterampilan • Pengalaman	• Mendukung penilaian, revitalisasi, dan adopsi praktik pengetahuan adat atau lokal yang selaras dengan penatagunaan (misalnya, pembakaran tradisional, penggembalaan, praktik penangkapan ikan) • Melakukan pendidikan dan kampanye penjangkauan/peningkatan kesadaran • Memperkenalkan ilmu pengetahuan warga, pemantauan untuk pengelolaan adaptif, dan penilaian hasil proyek (misalnya, pelaporan spesies invasif, pemantauan spesies) • Memberikan pelatihan dan bantuan teknis (misalnya, peningkatan pengelolaan sumber daya alam, praktik konservasi tanah, peningkatan penggunaan peralatan) • Mengadakan pertukaran pengetahuan • Memfasilitasi kesempatan belajar peer-to-peer
Sosial	• Pengetahuan/ Pemahaman • Keakraban • Identitas • Memercayai • Kohesi sosial/ tindakan kolektif • Koneksi ke tempat	• Melakukan pendidikan dan kampanye penjangkauan/peningkatan kesadaran • Memberikan kesempatan untuk berinteraksi • Memobilisasi di sekitar tujuan/tujuan bersama • Terlibat dalam pembangunan jaringan • Memfasilitasi pembangunan kepercayaan di dalam atau dengan komunitas • Mendukung program untuk mendorong identitas bersama, tujuan, dan transfer pengetahuan antargenerasi (misalnya, pemuda, Penatua, dan kelompok perempuan) • Mendukung penyembuhan dan kesetaraan ras • Menciptakan ruang yang aman untuk sejarah lisan, hukum adat dan alam untuk muncul dan menginformasikan perencanaan proyek, mekanisme tata kelola dan implementasi • Menciptakan dan mendukung akses dan kepemilikan wilayah adat jika terjadi/sedang terjadi perpindahan

(Tabel 3 lanjutan)

Jenis modal	Target pengembangan kapasitas	Contoh Kegiatan
Kelembagaan	• Kepemimpinan • Efektivitas kepemimpinan • Institusi/badan/ struktur pemerintahan • Efektivitas tata kelola	• Melakukan penilaian pemetaan kepemimpinan dan tata kelola untuk memahami sistem tata kelola tradisional dan kontemporer • Mendukung tokoh masyarakat dalam memperkuat struktur tata kelola yang ada (misalnya, lokakarya kepemimpinan, organisasi berbasis masyarakat, wali, pemantau, dll.) • Mendukung dan menerapkan visi masyarakat dan perencanaan penggunaan lahan • Mendukung pengembangan dan/atau dokumentasi aturan dan peraturan masyarakat yang mengatur penggunaan sumber daya alam • Memberikan dukungan untuk pemantauan dan penegakan • Memperkenalkan mekanisme dan platform non-kolonial untuk menyelesaikan perselisihan dan konflik • Melatih tokoh masyarakat dalam resolusi/ mediasi konflik • Dukung, cari, dan dorong pemulihan dan pelapisan kembali proses perdamaian tradisional atau lokal
Alamiah	• Sumber daya • Layanan ekosistem	• Membantu dalam proyek restorasi • Mendukung revitalisasi praktik manajemen tradisional dan memberikan pelatihan dalam praktik manajemen yang lebih baik • Memperjuangkan kawasan lindung yang dikelola masyarakat adat atau masyarakat
Ekonomis	• Infrastruktur • Sumber keuangan • Administrasi	• Mendukung peluang mata pencaharian yang berkelanjutan • Menghubungkan ke peluang peningkatan infrastruktur (misalnya, jalan, saluran irigasi, pendinginan, broadband) • Menyediakan peralatan yang lebih baik (misalnya, alat tangkap, peralatan pertanian) • Menyediakan atau menghubungkan ke kredit, pinjaman mikro, dan dana awal untuk membeli kebutuhan pokok (misalnya, pabrik masyarakat dan peralatan pemrosesan, perahu/kendaraan, peralatan pemantauan, dll.) • Pelatihan penganggaran, akuntansi, dan manajemen proyek • Pemantauan yang membantu mengidentifikasi nilai ekonomi sumber daya alam • Mensponsori konsep ekonomi berbasis masyarakat yang tangguh

Hasil tinjauan terbaru tentang konservasi berbasis masyarakat mendukung pentingnya berbagai investasi peningkatan kapasitas untuk hasil lingkungan.[16,48] Banyak yang telah mengidentifikasi jenis modal yang mana dan kegiatan yang umum dilakukan paling kuat terkait dengan menghasilkan kesejahteraan manusia dan manfaat lingkungan. Yang perlu diperhatikan adalah mereka yang memperkuat modal manusia melalui pendidikan, pelatihan, dan bantuan teknis;[48,52] mereka yang memperkuat modal sosial melalui upaya membangun kepercayaan dan meningkatkan sosial kohesi;[16,53-54] yang memperkuat modal institusional melalui investasi pada tokoh masyarakat dan institusi untuk tata kelola sumber daya alam;[16,48,55-58] yang memperkuat modal ekonomi melalui investasi di bidang infrastruktur, bisnis, administrasi, dan manajemen keuangan;[16] dan yang membangun kombinasi modal (misalnya, manusia, sosial, dan kelembagaan) melalui pembuatan jaringan untuk pembelajaran dan pertukaran pengetahuan.[16,59]

Kepemimpinan Komunitas dan Kelembagaan

Lihat **"Alat 4: Pemimpin Masyarakat dan Lembaga"** untuk daftar periksa dengan kriteria utama dalam mendukung pemimpin dan lembaga masyarakat yang efektif.

Pemimpin Masyarakat dan Lembaga yang efektif[g] sangat penting untuk pengelolaan yang dipimpin masyarakat, dan investasi dalam memperkuat kapasitas keduanya telah dikaitkan dengan hasil lingkungan yang positif.[16,48,55-58] Pemimpin pada dasarnya adalah setiap individu yang memiliki pengaruh, dan kepemimpinan berasal dari banyak tempat dan dapat mengambil banyak bentuk. Pemimpin komunitas bisa sekuler atau spiritual, dipilih atau ditunjuk, pria atau wanita, individu atau kolektif, dan dapat mewujudkan banyak kualitas yang berkaitan dengan hasil lingkungan.[60-62] Agar pemimpin dan lembaga masyarakat efektif dalam tata kelola dan memiliki kepercayaan dan keyakinan masyarakat, mereka secara umum harus dianggap sah, transparan, akuntabel, inklusif, adil, terhubung, dan tangguh, serta memiliki kemampuan untuk mempengaruhi sikap dan perilaku masyarakat.[63-64] Ketika kriteria kunci ini ada, pemimpin dan lembaga masyarakat dapat menjadi pendukung dan motivator yang kuat untuk aksi kolektif,[65] selain mendukung tata kelola sumber daya alam yang efektif melalui peningkatan koordinasi, penegakan, kepatuhan, dan resolusi konflik.[66] Di luar ini, para pemimpin dan lembaga masyarakat dapat memfasilitasi pembelajaran sosial, dan penyebaran inovasi di dalam dan di luar masyarakat.[67-68] Pengalaman menunjukkan bahwa ketika pemimpin dan lembaga masyarakat tidak efektif, dapat dikorupsi atau dimanfaatkan oleh elit masyarakat, atau menunjukkan koordinasi yang buruk dengan orang lain, masyarakat sering gagal untuk menegakkan kegiatan kepengurusan.[56] Oleh karena itu, ketika bermitra dengan masyarakat untuk mendukung pengembangan kapasitas bagi para pemimpin dan lembaga masyarakat, penting untuk untuk bekerja sama dengan masyarakat guna mengidentifikasi individu dan lembaga mana yang akan dilibatkan, menentukan jenis pelatihan apa yang paling disambut dan bermanfaat untuk melengkapi pengetahuan dan keahlian lokal, dan apakah pelatihan ini mungkin mendukung tujuan penatagunaan. Bekerja dengan para pemimpin pilihan masyarakat dan melalui lembaga-lembaga yang ada adalah penting dan lebih mungkin menghasilkan dampak positif yang bertahan lama. Harapkan pembelajaran terjadi dua arah dengan para pemimpin lokal juga harus banyak mengajar organisasi konservasi, selain apa yang dapat mereka pelajari dari kami dan orang lain di sektor konservasi.

g. Di sini, penggunaan istilah "lembaga masyarakat" mengacu pada berbagai entitas (misalnya, pemimpin, komite, organisasi berbasis masyarakat, dll.) yang menegakkan norma, aturan, peraturan, dan kebijakan yang ditetapkan masyarakat untuk mengatur sumber daya alam.

Aksi Kolektif dan Kohesi Sosial

> Lihat **"Alat 5: Aksi Kolektif dan Kohesi Sosial"** untuk daftar periksa dengan sumber daya utama dan karakteristik kelompok pengguna yang mendukung aksi kolektif dan kohesi sosial.

Tindakan kolektif umumnya didefinisikan sebagai tindakan yang diambil oleh suatu kelompok untuk mencapai tujuan bersama[41-44] dan merupakan faktor penting dari tata kelola sumber daya milik bersama dan komunitas yang sukses-kepemimpinan yang dipimpin.[69] Ada banyak literatur yang membahas pentingnya kohesi sosial untuk tindakan kolektif, yang pada gilirannya dipengaruhi oleh beberapa karakteristik sumber daya dan komunitas, seperti keakraban, interaksi yang sering, identitas dan tujuan bersama, timbal balik, dan kepercayaan.[44,70,71] Kondisi ini cenderung tidak ada dalam komunitas yang besar, beragam, cepat tumbuh atau berubah, terlibat dalam konflik, telah menyatakan ketidaksetaraan atau warisan penindasan, marginalisasi, dan perampasan,[16,59,72-73] yang merupakan hasil umum dari penjajahan dan selanjutnya trauma antargenerasi. Sebuah analisis baru-baru ini menemukan bahwa proyek konservasi yang dipimpin oleh masyarakat yang mengakui dan menangani masalah kepercayaan yang ada (pendorong penting untuk kohesi sosial) lebih berhasil menghasilkan kesejahteraan masyarakat dan manfaat lingkungan daripada yang tidak.[54] Studi lain telah membuat pengamatan terkait pentingnya identitas dan tujuan bersama untuk kohesi sosial dan tindakan kolektif yang diperlukan untuk hasil lingkungan yang sukses.[54] Temuan ini mendukung kesadaran yang lebih besar akan pentingnya kohesi sosial, tindakan kolektif, mengakui kebenaran yang sulit dan pengalaman hidup sebagai bagian dari pembangunan kepercayaan, dan tujuan bersama, serta peningkatan investasi dalam kegiatan yang membantu memperbaiki dan membangun kondisi fundamental ini.

Sumber Daya Milik Bersama, Tata Kelola, dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan

> Lihat **"Alat 6: Tata Kelola Sumber Daya Milik Bersama"** untuk daftar periksa dengan kondisi utama yang mendukung tata kelola sumber daya milik bersama yang efektif.

> Lihat **"Alat 7: Alat Tata Kelola Sumber Daya Alam"** untuk panduan langkah demi langkah dalam membuat indeks tata kelola khusus konteks untuk menilai dan melacak tata kelola pada skala komunitas atau lembaga masyarakat.

Sumber daya milik bersama adalah barang apa pun yang berkurang kuantitas atau kualitasnya karena penggunaan, dan yang sulit dan/atau mahal untuk melarang orang lain menggunakannya.[45] Kualitas seperti itu tipikal untuk sumber daya yang besar, heterogen, tidak dapat diprediksi dalam ruang atau waktu, dan/atau bermigrasi atau buronan (yaitu, bergerak bebas antar lokasi). Banyak dari sumber daya ini sangat penting bagi mata pencaharian dan identitas Penduduk Asli dan masyarakat lokal.[74] Properti bersama adalah cara khusus untuk berhubungan dengan sumber daya milik bersama, di mana tata kelola sumber daya dicapai secara komunal oleh sekelompok pengguna dengan hak akses dan penggunaan yang diakui (formal atau informal; de jure atau de facto) (lihat bagian sebelumnya untuk informasi lebih lanjut tentang hak milik).[75] Bentuk-bentuk tata kelola properti dan sumber daya alam ini sangat lazim di antara Penduduk Asli dan masyarakat lokal.

Banyak peneliti telah menyarankan bahwa kepemilikan bersama dan tata kelola sumber daya komunal bukan hanya struktur tata kelola yang optimal untuk sumber daya milik bersama, tetapi cukup sering menghasilkan pengelolaan sumber daya alam yang lebih berkelanjutan,[76-79] dengan studi yang menegaskan bahwa tanah dan perairan dengan sejarah panjang pemerintahan oleh Masyarakat Adat dan komunitas lokal (paling sering komunal) telah dilindungi dengan baik dan dikelola secara berkelanjutan dari waktu ke waktu.[80-82] Tanah dan perairan yang dikelola masyarakat adat dan lokal melihat lebih sedikit hilangnya hutan utuh,[83] potensi penyimpanan karbon lebih banyak,[84-85] dan penyediaan jasa ekosistem esensial yang lebih besar[86] daripada kawasan lindung yang dikelola pemerintah. Penting untuk dicatat bahwa sementara tata kelola sumber daya komunal dapat menghasilkan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, hasil ini tidak dijamin—khususnya ketika dihadapkan dengan peningkatan ukuran dan kecepatan permintaan eksternal akan sumber daya. Kondisi tertentu mendukung tata kelola sumber daya komunal yang efektif, dan jika kondisi ini tidak terpenuhi, kegagalan yang dikenal sebagai "tragedi milik bersama" dapat terjadi.[87] Beberapa di antaranya menguntungkan ketentuannya meliputi:[69-70]

- Batas sumber daya didefinisikan dengan jelas,
- Ada aturan untuk penggunaan sumber daya yang disesuaikan dengan konteks lokal, dan manfaat yang diperoleh individu dari sumber daya sebanding dengan biaya,
- Mereka yang terpengaruh oleh aturan dapat berpartisipasi dalam memodifikasi aturan,
- Pemantauan penggunaan sumber daya terjadi dan mereka yang memantau dimintai pertanggungjawaban oleh pengguna sumber daya,
- Hukuman bagi pelanggar aturan sebanding dengan beratnya pelanggaran, dan
- Ada cara cepat dan murah untuk menyelesaikan konflik.

Untuk sistem lintas batas pada skala yang lebih besar, seperti pantai, akuifer, sungai, atau danau besar, koordinasi komunitas dan anggota komunitas di luar tingkat rumah tangga atau komunitas menjadi penting untuk mengatur sumber daya milik bersama. Karena interkoneksi di antara banyak pengguna sumber daya yang berfungsi pada skala yang lebih besar, kerja sama dan kompromi diperlukan untuk memastikan distribusi sumber daya dan dampak yang adil. Secara historis, beragam lembaga berbasis masyarakat telah mengembangkan, memantau, dan menegakkan aturan mereka sendiri untuk mengekstraksi, mengelola, dan mengembangkan sumber daya tersebut. Masyarakat lokal dapat dan telah mengatur sumber daya mereka sendiri—dalam batas-batas keterkaitan hulu/hilir atau lintas batas yang lebih besar—bahkan jika hak adat tidak diakui secara formal oleh pemerintah.

Studi kasus

Kepemimpinan Komunitas dan Kelembagaan Pengembangan Kapasitas di Tepi Zamrud

Pada 100 juta acre (40 juta hektar), Tepi Zamrud adalah sistem hutan hujan beriklim pesisir utuh terbesar yang tersisa di dunia. Jalur hutan dan lautan yang hidup ini membentang ke utara dari Semenanjung Olimpiade di Negara Bagian Washington, melalui pesisir British Columbia di Kanada dan Hutan Hujan Beruang Besar, hingga ke daerah terpencil di Alaska Tenggara. Penjaga adat telah mengakui hak dan wewenang atas sumber daya ini—dengan demikian, fokus Program Tepi Zamrud adalah pada penguatan kapasitas Masyarakat Adat dan komunitas lokal untuk melanjutkan pengelolaan yang baik. TNC bekerja untuk mendukung kepemimpinan dan tata kelola masyarakat, serta mempromosikan peluang ekonomi yang meningkatkan mata pencaharian lokal, memberikan insentif dan kapasitas tambahan untuk pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.

Untuk tujuan ini, TNC telah menerapkan beberapa program khusus yang dimaksudkan untuk membangun "tangga kesempatan" bagi masyarakat adat. Men dukung program Emerging Aboriginal Stewards (SEAS) —atau "program generasi muda di tanah"— bertujuan untuk melibatkan, mengembangkan, mempersiapkan, dan memberdayakan pemuda Pribumi untuk menjadi generasi berikutnya dari pelayan berbasis daerah. Kaum muda melakukan perjalanan ke wilayah tradisional mereka untuk berhubungan kembali dengan alam, terlibat dalam kegiatan adat, dan belajar dari Sesepuh. Inisiatif lain, program Wali Adat, mendukung Jagawana Adat untuk mengambil kendali pemantauan wilayah mereka dan melanjutkan pekerjaan nenek moyang mereka untuk mengelola dan menghormati sumber daya alam dan budaya mereka melalui lembaga tradisional dan struktur pemerintahan. Para jagawana hutan ini memantau kesehatan spesies makanan, sosial, dan upacara yang penting, dengan mempertimbangkan berbagai penggunaan sumber daya di seluruh wilayah mereka dan berkontribusi pada keberhasilan implementasi, pemantauan, dan evaluasi rencana penggunaan lahan dan laut masyarakat. TNC dan mitranya bersama-sama mengembangkan Perangkat Penjagaan Adat *untuk memfasilitasi perluasan program di dalam dan di luar British Columbia*. Membangun pekerjaan di Canada, proyek Penjagaan Pantai mendirikan program Penjaga di Alaska dan menggunakan perangkat serta model dana abadi konservasi untuk mengamankan visi mereka di masa depan.

KETERANGAN GAMBAR
Bioma Kerangka VCA

TERESTARIAL **AIR TAWAR** **PESISIR**

Perluasan program pengembangan kapasitas ini terus berlanjut di seluruh Tepi Zamrud melalui penyediaan kapasitas teknis dan keuangan yang penting untuk mendukung visi masyarakat dan perencanaan penggunaan lahan untuk Ahousaht Nation di British Columbia. Pertukaran kepemimpinan berikutnya yang terkoordinasi antara Bangsa Ahousaht dan Haida membantu kepemimpinan Ahousaht memperkuat negosiasi mereka dengan Pemerintah Provinsi dan mencapai otoritas pemerintahan yang lebih efektif Bangsa Ahousaht juga membentuk program Penjaga Pantai, yang menghasilkan upaya pemetaan dalam kemitraan dengan TNC (yang memberikan dukungan pemetaan teknis) untuk menggambarkan wilayah dan sumber daya mereka, termasuk integrasi area yang memiliki signifikansi budaya. Semua ini telah berfungsi untuk meningkatkan aksi kolektif, tata kelola yang efektif, dan negosiasi Ahousaht dengan pemangku kepentingan eksternal. Misalnya, baru-baru ini, Bangsa Ahousaht menandatangani perjanjian baru dengan British Columbia untuk memberikan rekomendasi bersama kepada Kabinet untuk implementasi visi penggunaan lahan mereka yang akan menghasilkan kawasan konservasi, kehutanan, dan pembangunan ekonomi baru serta perjanjian tata kelola.

Pengelolaan Perikanan Air Tawar di Danau Tanganyika

Selama lebih dari satu dekade, TNC telah terlibat dalam inisiatif konservasi berbasis masyarakat dan pengelolaan perikanan berkelanjutan di Cekungan Danau Tanganyika Afrika Timur. Danau Tanganyika adalah danau terbesar kedua di Bumi berdasarkan volume, mengandung 17 persen air tawar permukaan planet. Cekungan ini menampung beberapa organisme akuatik dan terestrial paling ikonik di Afrika dan terkenal karena 250+ spesies Cichlidnya, 98 persen di antaranya endemik. Jaringan interaksi yang kompleks antara topografi danau, biogeokimia, rezim upwelling, dan ekosistem pelagis dan dekat pantai telah menghasilkan perikanan darat yang produktif yang mendukung 12 juta orang sebagai sumber protein dan pendapatan. Ikan menyumbang 40 persen protein hewani dalam makanan lokal, dan diperkirakan ada 95.000 nelayan aktif di danau. Negara-negara yang berbagi Danau Tanganyika—Tanzania, Republik Demokratik Kongo, Zambia, dan Burundi—memiliki kapasitas yang berbeda-beda untuk mendukung pengelolaan perikanan, dan danau tersebut tetap merupakan perikanan akses terbuka artisanal dan subsisten. Selain itu, wilayah ini memiliki pertumbuhan penduduk yang tinggi dan tingkat kemiskinan yang tinggi, yang memberikan tekanan pada sumber daya alam yang sudah digunakan secara berlebihan.

Pada tahun 2012, TNC dan mitra mendirikan Proyek Tuungane (Kiswahili untuk “Mari Bersatu”) di Tanzania untuk memperkenalkan solusi yang mempromosikan keluarga yang lebih sehat, perikanan, dan hutan, menggunakan pendekatan terpadu yang menangani masalah kesehatan dan lingkungan secara bersamaan. Solusi holistik ini menjanjikan hasil yang lebih tahan lama daripada pendekatan tradisional karena praktik konservasi juga dirancang untuk meningkatkan kehidupan masyarakat. Pengelolaan perikanan di bawah proyek ini berfokus pada pembentukan Unit Pengelolaan Pantai (BMU) masyarakat untuk mengelola sumber daya perikanan, memberikan pelatihan dan alat kepada BMU untuk memperkuat kepemimpinan dan kapasitas masyarakat, mengembangkan sistem pemantauan berbasis masyarakat, dan menciptakan

© AMI VITALE

mekanisme keuangan yang menutupi biaya penuh. dari pengelolaan perikanan. TNC juga berusaha untuk secara aktif menskalakan dampak di Danau Tanganyika. Bermitra dengan Otoritas Danau Tanganyika (LTA)—badan pemerintahan regional Danau Tanganyika dengan mandat untuk mempromosikan pembangunan berkelanjutan dan pengelolaan sumber daya alam di kawasan itu—serta Program Lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa, Persatuan Internasional untuk Konservasi Alam, dan Lingkungan Global Fasilitas, TNC bertujuan untuk mempromosikan lembaga pengelolaan bersama perikanan dan pembentukan cadangan ikan berbasis masyarakat (tempat penangkaran yang dilindungi) di seberang danau.

Kepemimpinan dan kapasitas yang kuat penting untuk membangun lembaga yang kuat dan mengoordinasikan tindakan untuk mengelola sumber daya milik bersama. Di Tanzania, misalnya, pemimpin desa dipilih setiap 5 tahun sekali. Para pemimpin ini mengelola komunitas bersama komite eksekutif. Pimpinan BMU, yang mengelola sumber daya perikanan dan peraturan daerah, dipilih setiap tiga tahun. Masa jabatan kepemimpinan mengharuskan TNC untuk terus membangun hubungan dengan para pemimpin baru dan memberikan pelatihan berkelanjutan untuk meningkatkan efektivitas BMU, peningkatan pendapatan, dan penerimaan masyarakat tanpa BMU. Persyaratan kepemimpinan dirancang untuk diatur sedemikian rupa sehingga para pemimpin senior akan memikul sebagian tanggung jawab untuk memperkenalkan penerus pada praktik tata kelola. TNC berfokus untuk mendukung kepemimpinan yang lebih konsisten dan setara gender yang didedikasikan untuk melaksanakan tindakan konservasi secara efektif di tingkat BMU dan meningkatkan kapasitas keuangan BMU. Meskipun ada kebijakan nasional yang mengamanatkan 30% posisi kepemimpinan harus dipegang oleh perempuan (juga diperkuat dalam peraturan BMU), perempuan dalam posisi kepemimpinan masih dapat dibatasi dalam kontribusi dan keterlibatannya karena norma budaya dan agama. Untuk mengatasi tantangan tersebut, proyek ini memfasilitasi pencalonan pemimpin perempuan yang bertujuan, menyelenggarakan pelatihan yang disesuaikan untuk meningkatkan motivasi dan kepercayaan diri, dan secara aktif melibatkan mitra perempuan yang dinominasikan sebagai bagian dari proses.

Memiliki kepemimpinan yang kuat di tingkat desa, peraturan dan struktur kelembagaan yang jelas, dukungan pemerintah untuk masalah penegakan hukum yang sulit, dan insentif untuk menghindari pengendara gratis (yaitu, mereka yang mendapat manfaat tanpa membayar/bekerja) semuanya terbukti penting. di BMU-BMU yang sukses di Danau Tanganyika. Selain itu, Wilayah Pengelolaan Perikanan Kolaboratif (KPH), yang terdiri dari konfederasi jaringan BMU, telah dibuat mengikuti pedoman Tanzania. KPH telah berhasil dalam kasus di mana jaringan ini dapat mendukung dan bekerja dengan masing-masing BMU melalui patroli yang lebih luas untuk melindungi area yang relatif luas yang ditetapkan sebagai cadangan ikan.

Namun, untuk membuat BMU berkelanjutan secara finansial akan memerlukan perubahan kebijakan dan praktik yang hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah Tanzania. TNC, bekerja sama dengan pemerintah dan LTA, sedang merintis kerangka usaha bisnis berbasis perikanan, yang keberhasilannya akan direplikasi secara adaptif di bagian lain Danau Tanganyika untuk meningkatkan konservasi sumber daya perikanan yang berkelanjutan. Meskipun Proyek Tuungane memiliki keberhasilan yang menonjol, pekerjaan konservasi air tawar berbasis masyarakat baru memulai perjalanannya menuju keberlanjutan finansial. TNC bekerja sama dengan mitra untuk menggunakan analisis rantai nilai dan memanfaatkan insentif pasar untuk memastikan bahwa nelayan di BMU yang dikelola dengan baik menerima keuntungan finansial individu dan/atau bersama dalam jangka panjang. Langkah pertama adalah mengadvokasi kepada pemerintah untuk pengembalian beberapa persentase (10-15 persen) dari pendapatan pemerintah (termasuk biaya transportasi hasil perikanan) yang dikelola oleh BMU atas nama Otoritas Pemerintah Kabupaten. Keberhasilan proyek bergantung pada pelibatan Masyarakat Adat dan komunitas lokal secara efektif dalam berbagai peran, termasuk sebagai pemilik lahan dan sumber daya, sebagai pemilik dan mitra, dan sebagai pemimpin dan penerima manfaat. Penguatan dan pembentukan institusi lokal dipandang sebagai hal mendasar untuk keberlanjutan dan ketahanan jangka panjang, dan proyek ini meningkatkan upayanya dalam hal ini.

ALAT DAN SUMBER DAYA

ALAT 4: DIAGNOSTIK—PEMIMPIN MASYARAKAT DAN LEMBAGA

Pemimpin dan lembaga masyarakat yang kuat adalah dasar dari konservasi yang dipimpin masyarakat. Kriteria kunci dalam alat ini dapat digunakan untuk menilai keefektifan keduanya, yang pada gilirannya mempengaruhi kepercayaan dan keyakinan yang mungkin diberikan individu di dalamnya. Informasi ini harus didiskusikan dengan masyarakat, atau lembaga perwakilannya, selama analisis situasi menggunakan wawancara informan kunci dan diskusi kelompok terfokus. Anda dapat menggunakan daftar periksa untuk mencatat tanggapan Anda terhadap setiap pertanyaan untuk menentukan area pertumbuhan potensial dan peluang untuk mendukung kegiatan pengembangan kapasitas yang sesuai dalam kemitraan dengan Penduduk Asli dan komunitas lokal.

ALAT 5: DIAGNOSTIK—AKSI KOLEKTIF DAN KOHESI SOSIAL

Aksi kolektif merupakan prasyarat untuk pemerintahan yang efektif dan dipengaruhi oleh karakteristik sumber daya dan komunitas tertentu. Informasi ini harus didiskusikan dengan masyarakat, atau lembaga perwakilannya, selama analisis situasi menggunakan wawancara informan kunci dan diskusi kelompok terfokus. Anda dapat menggunakan daftar periksa untuk mencatat tanggapan Anda terhadap setiap pertanyaan untuk menentukan area pertumbuhan potensial dan peluang untuk mendukung kegiatan pengembangan kapasitas yang sesuai dalam kemitraan dengan Penduduk Asli dan komunitas lokal.

ALAT 6: DIAGNOSTIK— SISTEM TATA KELOLA BERSAMA

Sistem Tata Kelola Bersama banyak ditemukan di wilayah komunitas adat dan lokal. Ketika mempertimbangkan bagaimana kita dapat mendukung masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, penting untuk menilai delapan kondisi yang mempengaruhi efektivitas rezim properti ini.[69-70] Informasi ini harus didiskusikan dengan masyarakat, atau lembaga perwakilannya, selama analisis situasi menggunakan wawancara informan kunci dan diskusi kelompok terfokus. Anda dapat menggunakan daftar periksa untuk mencatat tanggapan Anda terhadap setiap pertanyaan untuk menentukan area pertumbuhan potensial dan peluang untuk mendukung kegiatan pengembangan kapasitas yang sesuai dalam kemitraan dengan Penduduk Asli dan komunitas lokal.

ALAT 7: PANDUAN LANGKAH-DEMI-LANGKAH—ALAT TATA KELOLA SUMBER DAYA ALAM

Panduan ini dirancang untuk menawarkan kepada praktisi konservasi seperangkat konsep dasar dan alat untuk lebih memahami, menilai, dan mendukung tata kelola sumber daya alam yang efektif di lanskap dan bentang laut. Panduan ini dirancang untuk membantu dalam memahami kriteria kunci untuk tata kelola sumber daya alam yang efektif dan berfungsi sebagai diagnostik.

Pillar 3

Dialog Multi-Stakeholder yang Efektif dan Pengambilan Keputusan

Pengetahuan, Bukti, dan Praktik

POIN-POIN PENTING

- Dialog Multi Pemangku Kepentingan dan Pengambilan Keputusan (MSD) adalah paling tepat dalam situasi kompleks dengan banyak aktor yang memiliki kepentingan beragam di tanah, perairan, atau sumber daya.
- MSD dapat memiliki banyak tujuan—mulai dari berbagi informasi, hingga resolusi konflik, hingga pengambilan keputusan—dan dapat terjadi pada dan di seluruh skala lokal, regional, atau nasional/internasional. Namun, agar berhasil dan berpengaruh, skala MSD harus sesuai dengan skala masalah dan aktor yang terlibat.
- Strategi yang melibatkan MSD harus dipasangkan dengan strategi yang meningkatkan kepemimpinan dan/atau kapasitas masyarakat adat dan lokal untuk terlibat, di samping pelatihan untuk pemangku kepentingan lain tentang cara terlibat secara efektif dan penuh hormat dengan Penduduk Asli dan masyarakat lokal.
- Fasilitasi MSD yang terampil dan konsisten sangat penting untuk menciptakan koneksi dan kohesi sosial di antara berbagai aktor, dan untuk mendukung negosiasi, pembelajaran kolektif, dan resolusi konflik dari waktu ke waktu.
- Dinamika daya merupakan pertimbangan penting dalam MSD dan kegagalan untuk mengenali dan menanganinya dapat berfungsi untuk melanggengkan ketidaksetaraan yang ada dalam sistem.
- Bergantung pada format dan kebutuhannya, MSD dapat dibentuk sebagai kelompok kerja jangka pendek atau lembaga jangka panjang—platform atau forum dialog yang bertahan lama dapat menjadi penting jika resolusi konflik yang sedang berlangsung dan pengambilan keputusan seputar seperangkat peraturan atau kesepakatan akan dibutuhkan.

ISTILAH UTAMA

Dialog Multi-Stakeholder—forum yang mempertemukan para aktor dengan kepentingan bersama dalam suatu masalah atau keputusan untuk saling bertukar informasi dan pengetahuan kelembagaan, menghasilkan solusi dan praktik baik yang relevan, meningkatkan kepercayaan, menyelesaikan konflik, dan/atau mengambil keputusan. Forum ini dapat bersifat jangka pendek atau jangka panjang, dapat terjadi pada berbagai skala, dan dapat terhubung ke MSD lainnya.

Pemegang Hak—seseorang atau sekelompok orang dengan hak yang diakui untuk memberikan atau tidak memberikan persetujuan dalam pengambilan keputusan tentang tanah, perairan, atau pengelolaan sumber daya. Kami menyebut Masyarakat Adat sebagai "pemegang hak" mengingat hak asasi mereka yang diakui secara internasional baru-baru ini diartikulasikan dalam Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 2007 tentang Hak-Hak Masyarakat Adat.

Pemangku Kepentingan—seseorang atau sekelompok orang yang berkepentingan dengan tanah, perairan, atau sumber daya. Kadang-kadang disebut sebagai "pemegang kepentingan."

Memahami Multi-Stakeholder Dialog dan Pengambilan Keputusan

Dalam konteks pengelolaan sumber daya alam tertentu, biasanya ada banyak aktor atau kelompok yang berkepentingan dengan tanah, perairan, atau sumber daya, dan seringkali para aktor ini mungkin memiliki klaim atau hak penggunaan yang saling bersaing dan tumpang tindih. Berbagai pemangku kepentingan mungkin ingin mempengaruhi penggunaan dan pengelolaan sumber daya alam, terutama dalam kasus di mana hak tidak jelas, tidak diformalkan, atau sumber daya bersifat akses terbuka. Konteksnya kompleks dengan dinamika kekuasaan yang bermain dan sering kali terletak di dalam sejarah ketidaksetaraan dalam hal partisipasi yang berarti—khususnya untuk Masyarakat Adat dan komunitas lokal. Masyarakat Adat secara khusus dianggap sebagai "pemegang hak"—bukan "pemangku kepentingan"—dengan mempertimbangkan dan menghormati hak asasi mereka yang diakui secara internasional untuk memberikan atau tidak memberikan persetujuan dalam pengambilan keputusan tentang wilayah atau sumber daya mereka, selain hak negara, wilayah, atau negara yang dilokalkan terkait dengan Masyarakat Adat.

Dialog Multi Pemangku Kepentingan dan Pengambilan Keputusan (MSD) bertujuan untuk mempertemukan pemegang hak dan pemangku kepentingan terkait satu sama lain. MSD memiliki banyak kesamaan dengan aspek tata kelola dan tindakan kolektif yang tercakup dalam bagian "Kepemimpinan yang Kuat, Tata Kelola, dan Kapasitas Manajemen" (Pilar 2). Namun, tidak seperti pilar tersebut, yang berfokus pada pengembangan kapasitas dalam komunitas atau organisasi masyarakat, MSD berfokus pada kapasitas dan kolaborasi antar-kelompok/antar-pemangku kepentingan, yang hadir dengan kebutuhan dan tantangannya sendiri dan dapat sangat matriks.

MSD—bila dirancang dan dijalankan dengan baik—dapat digunakan untuk memenuhi berbagai tujuan, seperti untuk meningkatkan tingkat kepercayaan dan kohesi sosial antara berbagai aktor, berbagi informasi dan pengetahuan kelembagaan, menghasilkan solusi dan praktik baik yang relevan, mendorong kolaborasi dan pembelajaran silang, memperjelas hak, menyeimbangkan kekuatan bagi mereka yang terlibat, mengatasi konflik, atau mengambil keputusan. Dengan waktu, sumber daya, dan persiapan yang memadai, MSD dapat menjadi alat yang sangat efektif untuk menyatukan berbagai konstituen untuk membangun konsensus seputar masalah yang kompleks, beragam, dan—dalam beberapa kasus—memecah belah.[88] Faktanya, tinjauan dan analisis sistematis baru-baru ini menemukan bahwa dialog multi-stakeholder penting bagi keberhasilan konservasi berbasis masyarakat, dan bahwa proyek yang mencakup kegiatan semacam itu memiliki kemungkinan lebih tinggi untuk mencapai kesejahteraan manusia dan hasil lingkungan yang positif.[16]

Dalam hal MSDs pengambilan keputusan, forum dapat mencakup orang-orang yang membuat keputusan, mereka yang mempengaruhi keputusan, serta mereka yang terpengaruh oleh keputusan tersebut. Dalam situasi ini, penting untuk secara jelas mengidentifikasi tujuan dan wewenang pelibatan multi-stakeholder untuk menghasilkan tindakan atau keputusan apa pun. Terkait dengan kemitraan dengan Masyarakat Adat dan masyarakat lokal, organisasi konservasi dapat mendukung dan memperkuat kemampuan mereka untuk berpartisipasi, mempengaruhi, dan membuat keputusan dalam forum tersebut, serta mendidik pemangku kepentingan lainnya tentang cara terlibat secara efektif dan penuh hormat dengan Masyarakat Adat dan masyarakat lokal. komunitas. Tabel 4 mencantumkan beberapa peran yang mungkin dimainkan oleh organisasi konservasi di MSD, dengan mengingat bahwa mereka mungkin memiliki banyak peran dalam MSD yang sama atau di seluruh MSD.

Tabel 4: *Peran organisasi konservasi di MSD.*

Peran	Keterangan
penyelenggara	Mengorganisir struktur untuk aktor yang berbeda untuk terlibat dalam dialog—dapat mencakup pendanaan forum
Penyedia	Memfasilitasi dialog itu sendiri—termasuk memajukan agenda, resolusi konflik, dan pembangunan konsensus
Pembangun kapasitas	Membangun kapasitas berbagai aktor untuk terlibat satu sama lain secara efektif dan saling menghormati
Pendukung	Menyediakan dana dan dukungan logistik untuk partisipasi kepemimpinan masyarakat adat dan lokal di MSD, terutama yang membutuhkan perjalanan yang signifikan
Pelaksana	Mendukung individu dan organisasi yang berpartisipasi dalam mengimplementasikan keputusan, tindakan, dan kebutuhan tindak lanjut yang muncul dari MSD

MSD dapat terjadi pada dan di antara banyak skala—dari contoh tingkat lokal dengan satu komunitas, entitas perusahaan, dan/atau pemerintah daerah yang berkepentingan dengan tempat atau sumber daya yang tersembunyi (misalnya, asosiasi pengguna air di daerah aliran sungai, pengaturan pengelolaan bersama perikanan), ke tingkat regional yang melibatkan banyak aktor di satu atau lebih yurisdiksi (misalnya, platform Amazonia Agora untuk pengurangan deforestasi berkelanjutan di Pará, Brasil), ke tingkat global yang terjadi pada skala nasional atau internasional (misalnya, Micronesia Challenge to secara efektif melestarikan 30 persen sumber daya laut dekat pantai, Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim). Secara kritis, skala MSD yang tepat tergantung pada skala masalah dan aktor yang terlibat. Lebih jauh lagi, mungkin ada banyak MSD yang tumpang tindih yang menangani masalah pada skala spasial yang berbeda, dan MSD yang diselenggarakan sementara atau permanen.[37] Organisasi penghubung— seringkali LSM atau lembaga penelitian —dapat memainkan peran penting sebagai fasilitator, menciptakan koneksi di antara berbagai aktor, dan mendukung negosiasi, pembelajaran kolektif, dan resolusi konflik.[89-90]

MSD penting di seluruh ekosistem darat, pesisir, dan air tawar, karena setiap konteks mencakup banyak aktor dengan kepentingan yang terkadang berbeda. Namun, MSD sangat penting dalam sistem pesisir dan air tawar karena perbedaan hak dan struktur kepemilikan di ruang-ruang ini, di mana banyak aktor atau lembaga mungkin memiliki hak yang sah atas sumber daya yang sama, di mana mungkin ada banyak pengguna (termasuk mereka yang berada di luar tempat sumber daya adalah), di mana ada lebih sedikit hak "eksklusif" atau hak pribadi, dan (dalam kasus sungai dan sungai) di mana pengguna hulu dapat berdampak pada kualitas dan kuantitas sumber daya bagi pengguna hilir. Mengingat kompleksitas tambahan dari pengelolaan sumber daya alam di perairan tawar dan pesisir, MSD seringkali menjadi strategi penting untuk mengatasi tantangan ini. Menyadari keterbatasan pemerintah, ada gerakan yang lebih besar menuju pengelolaan terdesentralisasi yang mendukung pendekatan pengambilan keputusan yang inklusif dan partisipatif seperti ini.

Efektivitas Multi-Stakeholder Dialog dan Pengambilan Keputusan

Lihat **"Alat 8: Atribut Kunci Dialog Multi-Stakeholder dan Pengambilan Keputusan yang Efektif"** untuk daftar periksa dengan kriteria utama untuk MSD yang efektif.

Lihat **"Alat 9: Lab Inovasi Sosial"** untuk panduan pendekatan MSD yang berfokus pada menyatukan beragam kelompok orang yang berkonflik atas masalah yang kompleks dan menantang untuk bersama-sama mengembangkan dan menguji solusi.

Beberapa faktor mempengaruhi efektivitas MSD. Misalnya, pendorong utama partisipasi semua pihak adalah relevansi masalah. Ketika tantangan atau masalah pengelolaan bersifat mendesak dan mendesak, tekanan sosial bagi semua untuk berpartisipasi sering kali tinggi, terutama di mana saling ketergantungan antar pemangku kepentingan terlihat jelas.[91] Selain itu, sangat penting bahwa rangkaian aktor lengkap disertakan—yaitu pemegang hak dan pemangku kepentingan yang relevan yang memiliki kepentingan dan akan terpengaruh oleh tantangan atau masalah pengelolaan, serta mereka yang memiliki pengetahuan untuk memfasilitasi dengan terampil.[91] Selanjutnya, jika MSD bukanlah badan pembuat keputusan itu sendiri (misalnya, diselenggarakan untuk berbagi pengetahuan atau resolusi konflik), harus ada tautan ke proses pengambilan keputusan untuk memengaruhinya.[92]

MSD bekerja paling baik ketika mereka:

- merangkul konflik dan koneksi di dalam dan di luar kelompok, menciptakan ruang untuk agenda dan perselisihan aktor individu, sementara juga menciptakan ruang untuk terlibat secara bermakna di seluruh konflik (daripada berfokus pada tujuan kolektif dan harmoni tim),
- bereksperimen secara sistematis dengan perspektif yang berbeda dan solusi yang diciptakan bersama, mengambil satu langkah pada satu waktu dan membangun informasi yang diperoleh melalui eksperimen (daripada bersikeras pada kesepakatan yang jelas tentang masalah, solusi, dan rencana sebelum tindakan diambil), dan
- fokus pada peran peserta dalam mengabadikan situasi saat ini dan menciptakan solusi alternatif (daripada fokus pada mengubah apa yang dilakukan orang lain).[93]

Hal ini diperjuangkan oleh para pendukung pendekatan “laboratorium inovasi sosial”, yang merupakan salah satu jenis MSD yang berspesialisasi dalam masalah yang kompleks dan tidak dapat diprediksi yang mencakup beragam aktor yang sering kali memiliki pandangan dan pemahaman dunia yang berbeda tentang masalah tersebut.[93] Pendekatan lab inovasi sosial terhadap perubahan sistem bergantung pada penyelenggaraan subset dari sistem yang lebih besar menggunakan fasilitasi yang sangat terampil. Pendekatan semacam itu memecah hierarki dan membina koneksi, memahami sifat keseluruhan sistem termasuk persepsi yang berbeda tentang masalah, menghasilkan refleksi tentang berbagai peran dalam sistem, dan menciptakan/bereksperimen bersama dengan solusi yang mungkin. Proses ini sering mengarah pada ide-ide inovatif dan kemajuan ke depan di mana masalah sebelumnya “macet”.

Sejauh ini, bukti efektivitas MSD dalam mencapai tujuan konservasi masih muncul; program pemantauan dan evaluasi yang kuat dapat membantu mengisi kesenjangan pengetahuan ini.[90] Analisis contoh MSD menemukan bahwa dampak positif pada hasil sosial—seperti pengakuan hak, peningkatan akses ke informasi, dan kepastian tenurial—telah diamati dalam banyak kasus; namun, hal ini tampaknya sangat terkait erat dengan tingkat dan kualitas partisipasi masyarakat lokal. Misalnya, analisis beberapa MSD yang dimulai melalui Fasilitas Penegakan Hukum, Tata Kelola, dan Perdagangan Hutan Uni Eropa (EU-FLEGT) menemukan korelasi umum antara kekuatan partisipasi dan tingkat dampak sosial positif di seluruh kasus yang ditinjau.[94] Sedangkan di Lahan Basah Pantanal Brasil, kegiatan konservasi dan pemerintah berusaha untuk memastikan perikanan yang berkelanjutan melalui pendekatan pengelolaan bersama yang dangkal berdasarkan komisi pengatur yang terdiri dari legislator, ilmuwan, dan penegak hukum. Kurangnya partisipasi nelayan yang efektif dalam MSD menyebabkan kurangnya pemahaman tentang persyaratan pengelolaan, ketidakpercayaan nelayan terhadap ilmuwan MSD yang berbasis di perkotaan, dan ketidakpatuhan terhadap aturan.[95-96]

© TIM CALVER

Studi Kasus

Dialog Multi-stakeholder di Danau Tonle Sap dan Dataran Banjir Kamboja

KETERANGAN GAMBAR
Bioma Kerangka VCA

- TERESTRIAL
- AIR TAWAR
- PESISIR

Danau Tonle Sap Kamboja adalah danau besar yang tergenang musiman yang berbatasan dengan lima provinsi Kamboja dan mengalir ke sistem Sungai Mekong yang lebih rendah. Konflik yang intens muncul sebagai tanggapan atas persaingan hulu-hilir, baik secara nasional maupun internasional. Sumber kompetisi sumber daya lokal ditemukan dalam sektor perikanan, serta antara sektor perikanan dan sektor lainnya, yang terakhir melibatkan konflik antara penangkapan ikan dan produksi beras irigasi musim kemarau. Ekspansi produksi beras sering didukung oleh investor kuat dari luar masyarakat lokal, menciptakan daerah irigasi pribadi yang menggantikan penggunaan masyarakat adat.

Untuk mengatasi konflik sektor perikanan, pemerintah Kamboja mengubah kebijakan perikanan nasionalnya dari kontrol terpusat atas tempat penangkapan ikan komersial skala besar menjadi bentuk pengelolaan bersama yang terdesentralisasi berdasarkan Organisasi Masyarakat Perikanan (CFO). Kebaruan CFO berarti bahwa legitimasi, kepemimpinan, dan kapasitas tata kelola mereka rendah, sehingga persaingan lokal untuk sumber daya perikanan awalnya meningkat ketika pengguna bermanuver untuk mengamankan hak di bawah sistem baru atau memanfaatkan celah penegakan hukum, yang menyebabkan penangkapan ikan ilegal yang meluas.

Untuk meningkatkan kapasitas tata kelola mereka, CFO menggunakan proses multi-stakeholder partisipatif untuk merestrukturisasi manajemen dan meningkatkan penegakan hukum. CFO juga meningkatkan kapasitas mereka untuk menyelesaikan perselisihan antarprovinsi dan lintas sektoral. Dalam hal asosiasi petani padi musim kemarau, kesepakatan lisan dibuat di hadapan dinas pertanian dan perikanan provinsi, yang kemudian diresmikan oleh Dinas Perikanan. CFO juga meningkatkan kapasitas mereka untuk mengajukan petisi dukungan pemerintah untuk mengubah atau mengizinkan pengecualian dari peraturan saat ini. Hal ini menghasilkan proyek percontohan untuk mendirikan perikanan komersial di bawah pengelolaan masyarakat, dengan perlindungan untuk memastikan perlindungan sumber daya yang memadai dan pembagian keuntungan. CFO juga terlibat dalam jaringan di antara komunitas di sekitar danau (melalui serangkaian acara pengetahuan pasar) dan dengan jaringan akar rumput nasional yang mewakili komunitas nelayan.

Keberhasilan proses multi-stakeholder partisipatif begitu besar sehingga jaringan akar rumput nasional yang mewakili komunitas nelayan mengubah tata kelola internalnya dan meningkatkan kolaborasi dengan otoritas pemerintah nasional dan sektor formal non-pemerintah. Administrasi Perikanan juga mengusulkan memasukkan proses dalam pelaksanaan reformasi perikanan yang sedang berlangsung. Hasil ini dapat digeneralisasikan untuk sistem drainase terbuka besar lainnya yang penting secara internasional, seperti Danau Victoria (berbatasan dengan Kenya, Tanzania, dan Uganda) dan Danau Kariba (berbatasan dengan Zambia dan Zimbabwe).

Sumber: Ratner et al. 2018 sebagaimana dikutip dalam Zhang et al. 2020[37]

Alat dan Sumber Daya

ALAT 8: DIAGNOSTIK—ATRIBUT UTAMA DARI DIALOG DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN MULTI-STAKEHOLDER YANG EFEKTIF

Multi-stakeholder dialogue and decision making focuses on inter-group and inter-rightsholder/stakeholder capacity and collaboration, which comes with its own needs and challenges. Sering kali, peran penting organisasi konservasi adalah sebagai "penyelenggara" dan "fasilitator". Apakah organisasi konservasi terlibat dalam mendukung kepemimpinan masyarakat adat dan lokal dalam menyelenggarakan MSD baru, memfasilitasi MSD, atau mendukung partisipasi masyarakat adat dan lokal yang berarti dalam MSD yang ada, daftar periksa kriteria utama MSD yang efektif dapat digunakan untuk memahami MSD struktur dan apakah/di mana penyesuaian mungkin diperlukan.

ALAT 9: PANDUAN—LAB INOVASI SOSIAL

Panduan ini oleh Reos Partners berjudul "Reos Ubah Lab: Mengatasi Tantangan Kompleks dengan inovasi sosial,"[97] menyajikan pendekatan untuk menciptakan dan mengarahkan perubahan serta transformasi dalam siste sosial yang kompleks. Meskipun panduan ini bukan "cara melakukannya", ini merupakan eksplorasi mendalam tentang pendekatan Ubah Lab, serta ikhtisar dari beberapa prinsip, alat, dan sumber daya terkait. Panduan ini menjelaskan proses memulai, mengadakan, dan memfasilitasi proses perubahan sosial yang sistemik, kreatif, dan partisipatif—"siapa", "apa", dan "mengapa" inovasi sosial. Sebagai penyelenggara dan fasilitator MSD, praktisi konservasi yang terlatih dalam pendekatan Ubah Lab mungkin merasa ini berguna untuk mendukung kepemimpinan masyarakat adat dan lokal serta partisipasi yang berarti dalam MSD, dan membangun pemahaman dan kapasitas di antara beragam pemangku kepentingan.

Pilar 4

Peluang Mata Pencaharian Berkelanjutan

Pengetahuan, Bukti, dan Praktik

POIN-POIN PENTING

- Sangat penting bahwa kemitraan untuk membangun peluang mata pencaharian secara langsung terkait dengan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan agar konservasi yang dipimpin masyarakat menjadi efektif dan tahan lama.
- Inisiatif mata pencaharian berkelanjutan berfokus pada pendapatan bisnis dan rumah tangga, dan seringkali tidak menutupi biaya penuh dan langsung konservasi, menyoroti perlunya inisiatif semacam itu untuk dipasangkan dengan pembiayaan konservasi.
- Selain memajukan tujuan lingkungan dan sosial, peluang mata pencaharian yang berkelanjutan harus layak dari perspektif bisnis, yang memerlukan pertimbangan keuangan, pasar, operasional, tata kelola, peraturan, dan pertimbangan lainnya. Pemahaman mendalam tentang konteks spesifik sangat penting, termasuk hambatan apa pun yang mungkin membatasi kelayakan.
- Diversifikasi pilihan mata pencaharian membantu mengurangi guncangan keuangan yang terkait dengan salah satu pilihan yang gagal.
- Meskipun bukan aturan yang pasti, peluang mata pencaharian berkelanjutan berdasarkan aktivitas masyarakat yang ada—misalnya, mengidentifikasi pasar untuk ikan yang ditangkap dengan pendekatan berkelanjutan atau meningkatkan aktivitas kehutanan berkelanjutan yang ada—mencapai penyerapan yang lebih cepat dan membutuhkan pengembangan kapasitas yang lebih sedikit daripada peluang yang mengharuskan orang untuk belajar keterampilan yang sama sekali baru, seperti mengembangkan usaha ekowisata.

STILAH UTAMA

Pendanaan Konservasi—mekanisme dan strategi yang menghasilkan, mengelola, dan menyebarkan sumber daya keuangan dan menyelaraskan insentif untuk mencapai hasil konservasi alam.[98] Dana konservasi ditujukan dalam mendanai biaya penuh konservasi dan mempertahankan keberlanjutan finansial jangka panjang.[99]

Pembayaran Jasa Lingkungan (PES)—pembayaran jasa lingkungan (PES) adalah pembayaran dari penerima manfaat atau pengguna jasa lingkungan kepada pemelihara jasa tersebut. Jasa ekosistem dapat mencakup penyerapan dan penyimpanan karbon, keanekaragaman hayati, perlindungan daerah aliran sungai, dan keindahan sumber daya alam. PES mencakup mekanisme yang dikembangkan dengan baik, seperti kredit karbon dan investasi daerah aliran sungai, serta skema yang lebih eksplorasi, seperti pembayaran untuk keanekaragaman hayati.

Peluang Mata Pencaharian Berkelanjutan—mengacu pada keberadaan dan kemampuan untuk terlibat dalam pilihan mata pencaharian berkelanjutan yang memungkinkan seseorang untuk tetap berakar di tempatnya. Mata pencaharian adalah sarana untuk mencari nafkah atau mengamankan kebutuhan hidup. Sebuah mata pencaharian berkelanjutan ketika meminimalkan kerusakan pada basis sumber daya alam, memungkinkan orang untuk mengatasi dan pulih dari guncangan dan tekanan keuangan, dan secara adil meningkatkan kesejahteraan lingkungan, sosial, budaya, dan ekonomi sekarang dan untuk generasi mendatang.

Jenis Peluang Mata Pencaharian Berkelanjutan

Mata pencaharian yang berkelanjutan mencakup cara hidup subsisten—seperti bertani atau menangkap ikan—serta peluang dan insentif bagi orang-orang untuk menghasilkan pendapatan melalui pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan secara lingkungan dan sesuai dengan budaya mereka. Dekl arasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat menyatakan bahwa Masyarakat Adat memiliki hak untuk menentukan nasib sendiri—yang mencakup ekonomi > penentuan nasib sendiri.[3] Ketika orang dapat menyelaraskan kebutuhan ekonomi mereka dengan visi mereka untuk masa depan dan keinginan mereka untuk keberlanjutan, mereka akan lebih mampu memperjuangkan pemeliharaan lingkungan. Tinjauan literatur sistematis baru-baru ini menemukan bahwa kegiatan pembangunan ekonomi adalah faktor pendukung tingkat proyek yang paling penting untuk hasil lingkungan dan kesejahteraan manusia yang positif, meningkatkan kemungkinan keberhasilan gabungan.[16] Ketika dikembangkan bersama dan didorong oleh visi masyarakat lokal, serta dirancang dan diterapkan dengan cermat, pendekatan mata pencaharian berkelanjutan menawarkan peluang yang kuat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan lingkungan.

Secara umum, peluang mata pencaharian yang berkelanjutan dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kategori:

1. mata pencaharian subsisten,
2. kompensasi langsung, dan
3. Usaha masyarakat.

Tergantung pada konteks lokal, mungkin tepat untuk terlibat dalam lebih dari satu kategori, atau ketiganya (Tabel 5).

Tabel 5: *Kategori dan contoh peluang mata pencaharian yang berkelanjutan.*

Kategori	Contoh Berkelanjutan Peluang Mata Pencaharian
Mata pencaharian subsisten	Penciptaan barang dan jasa yang digunakan oleh produsen dan keluarga atau komunitasnya, daripada dipasarkan dan dijual (misalnya, pertanian berkelanjutan, produk perikanan, tanaman obat, praktik budaya). Masyarakat mungkin tertarik untuk meningkatkan keberlanjutan dan kondisi yang memungkinkan mata pencaharian subsisten. Misalnya, transisi ke praktik pertanian atau pemanenan yang lebih berkelanjutan atau menciptakan kawasan lindung laut yang dikelola masyarakat sebagai metode untuk membantu meningkatkan ketahanan pangan
Kompensasi langsung di mana anggota masyarakat menerima pendapatan atas partisipasi mereka dalam pengelolaan lingkungan	Insentif lingkungan (mis., penyeimbangan karbon, dana air, dan pembayaran lain untuk jasa ekosistem), pekerjaan langsung dalam konservasi (mis., jagawana/penjaga, pemantauan lingkungan), dan mekanisme pembagian manfaat (mis., dana komunitas proyek konservasi)
Usaha masyarakat	Penciptaan barang dan jasa untuk dipasarkan dan dijual, sering dikaitkan dengan pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan (misalnya, kakao, rempah-rempah, karet, ikan, rumput laut, ternak, atau ekowisata)

Ketiga kategori di atas didukung oleh peluang yang memungkinkan yang menciptakan akses ke pembiayaan dan pelatihan. Peluang keuangan yang memungkinkan dapat mencakup keuangan mikro, asosiasi simpan pinjam desa, dan peluang lain yang memungkinkan penciptaan lapangan kerja, pengembangan usaha, dan keamanan finansial. Mengaktifkan peluang pengembangan kapasitas dapat mencakup pelatihan kewirausahaan, bantuan bisnis dan teknis, dan penguatan usaha masyarakat.

Peluang mata pencaharian yang berkelanjutan menghasilkan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pribadi dan rumah tangga, yang meningkatkan keamanan dan ketahanan finansial masyarakat, mendorong pengel-olaan sumber daya yang berkelanjutan, dan mengurangi tekanan pem-bangunan yang tidak berkelanjutan. Namun, mereka biasanya tidak menghasilkan pendapatan yang cukup untuk membayar biaya langsung konservasi.[99] Misalnya, usaha budidaya masyarakat mungkin memberikan pendapatan dari penjualan rumput laut, tetapi tidak membayar untuk pemeliharaan, pemantauan, dan pemulihan terumbu di sekitarnya.

Keberhasilan Peluang Mata Pencaharian Berkelanjutan

> Lihat **"Alat 10: Buku Panduan Penghidupan Berkelanjutan dan Usaha Masyarakat"** untuk panduan memperkuat peluang mata pencaharian berkelanjutan dalam kemitraan dengan Masyarakat Adat dan komunitas lokal.

> Lihat **"Alat 11: Mempersiapkan Masyarakat Menjadi Sejahtera"** bab—dimulai pada halaman 183—dari "Panduan Fasilitator Perlindungan Lahan Masyarakat Namati"[100] untuk bimbingan dan kegiatan mempersiapkan masyarakat untuk bernegosiasi dengan investor dan mengambil langkah-langkah khusus untuk mewujudkan visi masyarakat bersama mereka.

Di berbagai tempat di seluruh dunia, Masyarakat Adat dan lokal menghadapi tekanan ekonomi dengan pengangguran yang tinggi dan sedikit pilihan untuk menghasilkan pendapatan. Dalam keadaan ini, orang-orang yang menghargai sumber daya alam mungkin mengalami realitas yang tidak menguntungkan dari pertukaran antara melestarikan sumber daya tersebut dan menghidupi diri mereka sendiri dan keluarga mereka. Selain itu, dalam beberapa kasus, mereka mungkin memiliki sedikit pilihan selain meninggalkan komunitas mereka untuk mencari pekerjaan dan/atau peluang pendidikan. Migrasi keluar, bila terjadi dalam jumlah besar, dapat berdampak melemahkan tatanan sosial masyarakat, mengganggu koneksi ke tempat dan kapasitas untuk tindakan kolektif, dan mengurangi jumlah orang yang mengelola sumber daya, berpotensi menciptakan peluang eksploitasi oleh pihak luar dan/atau ekstraktif. industri dengan kepentingan yang bersaing.

Keberhasilan pengembangan bersama peluang mata pencaharian yang berkelanjutan bergantung pada beberapa faktor kunci. Pertama, peluang yang memanfaatkan keterampilan dan pengetahuan komunitas yang ada cenderung lebih cepat diserap daripada peluang yang mengharuskan komunitas mempelajari keterampilan yang sama sekali baru. Bahkan peluang yang berfokus pada keterampilan yang ada memerlukan pengembangan kapasitas bisnis dan keuangan tingkat tinggi agar dapat bertahan, seringkali dalam jangka waktu 8-10 tahun atau lebih.[101] Peluang mata pencaharian yang berkelanjutan juga memerlukan akses berkelanjutan dan andal ke keuangan yang terjangkau, yang seringkali kurang pada tahap awal pengembangan.[101] Masyarakat harus dapat menjual produk dan layanan mereka secara efektif serta mengakses pasar dengan harga yang wajar. Mereka harus memiliki model bisnis yang layak, yang antara lain membutuhkan tata kelola, operasi, pembiayaan, dan pertimbangan pasar dan peraturan yang sesuai. Dukungan bisnis langsung dan pemahaman mendalam tentang konteks yang diberikan sangat penting.[101] Keberhasilan peluang mata pencaharian yang berkelanjutan juga bergantung pada unsur kesejahteraan manusia di luar penciptaan kekayaan, seperti kebutuhan dan aspirasi orang-orang yang terlibat, nilai-nilai budaya, dan visi yang mereka miliki untuk masa depan komunitas mereka.[102-103] Penting untuk terlebih dahulu memahami bagaimana individu dan masyarakat menghargai sumber daya alam dan bagaimana tekanan ekonomi mempengaruhi kemampuan mereka untuk bertindak berdasarkan nilai-nilai mereka.

Mungkin yang paling penting, peluang mata pencaharian berkelanjutan—di semua kategori di atas—perlu dikaitkan erat dengan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan itu sendiri. Salah satu perusahaan akuakultur di Kenya mempekerjakan anggota komunitas nelayan setempat, melatih mereka untuk peluang kepemimpi-nan di masa depan, dan membayar masyarakat di atas upah pasar lokal bersama dengan pembayaran sewa untuk penggunaan tanah mereka. Mendirikan kawasan penangkaran yang dilindungi di sana mengarah pada penemuan kembali spesies yang secara resmi diyakini telah punah.[101] Dalam contoh lain, sebuah perusahaan milik petani di India membantu petani mencapai pasar pada usia 20 tahun. -30 persen harga lebih tinggi, menerapkan praktik pemanenan berkelanjutan, dan memberikan pelatihan tentang kesehatan, hak masyarakat adat, dan pengetahuan lainnya.[101] Di sisi lain, contoh di mana peluang mata pencaharian berkelanjutan tidak terkait erat dengan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan telah menghasilkan sumber pendapatan tambahan dengan eksploitasi (tidak berkelanjutan) sumber daya yang terus berlanjut pada tingkat yang sama[102,104] Hal ini ditunjukkan dalam sebuah penelitian di mana nelayan diberikan perahu baru tanpa peningkatan penegakan peraturan perikanan, yang menyebabkan peningkatan panen ikan di dekat pantai.[105] Dalam contoh lain, masyarakat berpartisipasi dalam program mata pencaharian alternatif dengan komponen perencanaan penggunaan lahan berkelanjutan yang kuat menggunakan peningkatan pendapatan mereka untuk memperluas kepemilikan ternak, yang pada akhirnya semakin merusak habitat yang ingin dilindungi oleh program.[106]

Masing-masing pertimbangan di atas menyoroti pentingnya peluang mata pencaharian berkelanjutan yang dipimpin oleh masyarakat dan digerakkan oleh masyarakat yang memperhitungkan nuansa ini dan mencakup portofolio pilihan yang beragam, yang mendiversifikasi risiko salah satu usaha yang gagal. Namun, penting untuk dicatat bahwa ada biaya di muka yang terkait dengan diversifikasi yang dapat menempatkan kelompok berpenghasilan rendah pada kerugian komparatif untuk berpartisipasi dalam inisiatif ter-sebut. Dialog dengan individu dan kelompok di berbagai tingkatan dapat membantu menciptakan pemahaman tentang sifat peluang dan ancaman yang berkembang dari perspektif yang berbeda; Dialog yang baik memungkinkan pendekatan manajemen untuk diadaptasi dengan tepat.[102,107]

© TED WOOD

Studi Kasus

Australia Utara—Berkelanjutan Penghidupan Melalui Usaha Karbon dan Pekerjaan Langsung dalam Pengelolaan Konservasi

Secara historis, sebagian besar Australia Utara ada sebagai mosaik kom-pleks tanah dan laut yang secara tradisional dikelola oleh ratusan suku adat. Namun, kolonisasi membuat klan ini kehilangan tanah mereka pada abad ke-19 dan 20 mengganggu hubungan, pengetahuan, dan praktik mereka yang mendukung pola pengelolaan lingkungan yang berkembang lebih dari dari 65.000 tahun. Tanpa pengelolaan tradisional ini, sabana di Australia Utara telah menjadi sasaran lebih banyak kebakaran hutan di akhir musim kemarau, yang membakar lebih intens, merusak habitat tumbuhan dan hewan asli, dan melepaskan tingkat gas rumah kaca yang lebih tinggi. Baru-baru ini, sebagian besar lahan telah dikembalikan ke kontrol pengel-olaan Masyarakat Adat. Kepemilikan Asli dan bentuk-bentuk penguasaan dan hak Pribumi lainnya sekarang mencakup lebih dari 60 persen sabana utara. Hak-hak mendasar ini telah menjadi landasan penting bagi kemitraan anta-ra TNC dan masyarakat adat untuk mengamankan pembiayaan dan men-dukung sistem kelembagaan dan tata kelola untuk menopang perusahaan berbasis darat dan laut. Faktanya, kasus ini merupakan contoh menarik tentang bagaimana mata pencaharian berkelanjutan dan keuangan konservasi dapat bekerja sama untuk menciptakan hasil positif bagi masyarakat dan lingkungan alam.

Program Australia Utara TNC bekerja dengan Penduduk Asli Australia saat mereka mengelola tanah tradisional mereka dan memperbarui serta memperkuat hubungan mereka dengan Negara. Mitra adat terlibat dalam perencanaan partisipatif untuk wilayah mereka, yang disebut Perencanaan Negara yang Sehat (diadaptasi oleh Pemilik Tradisional di Australia dari Conservation Action Planning agar lebih sesuai dengan konteks dan prioritas). Hal ini memungkinkan mereka untuk membayangkan masa depan tanah mereka dengan peluang ekonomi yang sejalan dengan prioritas budaya mereka. Sebagai bagian penting dari pengelolaan lahan, Penduduk Adat Australia telah menghidupkan kembali

KETERANGAN GAMBAR
Bioma Kerangka VCA

TERESTRIAL **AIR TAWAR** **PESISIR**

praktik pengelolaan kebakaran tradisional, membantu memulihkan dan memelihara keanekaragaman hayati yang kaya di kawasan itu dan melindungi situs budaya dan fitur lingkungan yang penting. Dengan mengurangi kebakaran hutan akhir musim yang merusak, praktik-praktik di tanah Pribumi ini telah mengakibatkan pelepasan lebih dari 8 juta ton setara karbon dioksida di lebih dari 50 juta hektar (19,3 juta hektar), dengan rencana untuk memperluas model di seluruh Australia Utara ke termasuk penyerapan karbon.

Mengurangi emisi gas rumah kaca memungkinkan masyarakat untuk menghasilkan dan menjual kredit karbon melalui pasar karbon Australia, yang menciptakan peluang penting bagi masyarakat. Manajemen kebakaran tradisional telah menghasilkan lebih dari AUD $100 juta dalam bentuk pendanaan karbon, yang memungkinkan kelompok un-tuk memanfaatkan investasi tambahan dari pemerintah, filantropi, dan sumber lainnya. **Warddeken Land Management Ltd.**, perusahaan milik masyarakat, melaksanakan tanggung jawab pembiayaan dan layanan lain yang terkait dengan pengelolaan lahan dan kesejahteraan masyarakat. Perusahaan ini mencakup anggota dewan dari setiap kelompok klan dan komite pengarah pemegang pengetahuan yang mewakili beragam penge-tahuan.

Perusahaan menggunakan pembiayaan ini untuk mendukung berbagai or-ganisasi masyarakat dan peluang mata pencaharian yang berkelanjutan, yang merupakan kunci ketahanan dan kemandirian finansialnya. Inisiatif termasuk pengembangan kapasitas, infrastruktur, program masyarakat, usaha pengurangan karbon, dan program jagawana untuk masyarakat adat. Program Jagawana mempekerjakan dan melatih pria dan wanita lokal da-lam pengelolaan lahan dan restorasi habitat, menggabungkan Pengetahuan Adat dan sains Barat untuk hasil yang bertahan lama. Keterampilan, kapasitas manajemen, dan pengaturan tata kelola yang dikembangkan melalui program jagawana dan usaha pengurangan karbon juga memberikan landasan untuk mengembangkan peluang mata pen-caharian berkelanjutan tambahan. Sebagai contoh, beberapa anggota masyarakat lokal melakukan kegiatan fee-for-service, seperti pengendalian gulma, pengendalian hewan liar, per-lindungan biosekuriti, dan survei satwa liar untuk pemilik tanah tetangga, instansi pemerintah, dan industri sumber daya. Lainnya mengembangkan ekowisata, peluang wisata budaya, dan perus-ahaan makanan semak. Hal ini memberikan landasan penting bagi peluang mata pencaharian berkelanjutan di masa depan berdasarkan pengelolaan sumber daya lahan yang sesuai secara budaya.

Studi kasus tambahan tentang Peluang Penghidupan Berkelanjutan dapat diakses ***disini***.

Alat dan Sumber Daya

ALAT 10: PANDUAN—BUKU PANDUAN MATA PENCAHARIAN BERKELANJUTAN DAN USAHA MASYARAKAT

Panduan ini dirancang untuk membantu praktisi konservasi memajukanmata pencaharian yang berkelanjutan dalam kemitraan dengan Masyarakat Adat dan komunitas lokal. Panduan ini memberikan pengetahuan dasar yang diperlukan untuk me-mahami mata pencaharian yang berkelanjutan dan menguraikan langkah-langkah yang dapat ditindaklanjuti dan alat yang dapat digunakan oleh praktisi konservasi ketika mengembangkan bersama perusahaan masyara-kat yang berkelanjutan.

ALAT 11: PANDUAN—MEMPERSIAPKAN MASYARAKAT UNTUK SEJAHTERA

Kegiatan dalam bab Tanah Komunitas Namati ini Panduan Fasilitator Perlindungan[100]—"Mempersiapkan Masyarakat Menuju Kesejahteraan" dimulai dari halaman 183—dirancang untuk mendorong pertumbuhan dan kemakmuran komunitas jangka panjang, sesuai dengan rencana dan niat yang ditentukan sendiri oleh masing-masing komunitas. Mereka mendukung anggota masyarakat untuk mengejar berbagai mata pencaharian, meregenerasi ekosistem lokal, mempersiapkan negosiasi potensial dengan investor, dan mengambil langkah-langkah spesifik untuk mewujudkan visi komunitas bersama mereka.

© AMI VITALE

© AMI VITALE

Unsur Landasan 1:

Keadilan Manfaat, Dampak, dan Inklusi

Pengetahuan, Bukti dan Pelaksanaan

POIN-POIN PENTING

- Mendukung hak asasi manusia dan kesetaraan merupakan keharusan moral dan prasyarat penting untuk hasil konservasi yang berkelanjutan. Untuk Masyarakat Adat, ini termasuk hak untuk menentukan nasib sendiri dan standar Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan.

- Kesetaraan harus diperiksa baik pada skala komunitas (misalnya, komunitas ke komunitas, perusahaan, dan pemerintah) serta skala individu (misalnya, lintas identitas sosial). Dalam pertimbangan konteks, renungkan apakah beberapa diuntungkan lebih dari yang lain, terkena dampak lebih dari yang lain, dan dilibatkan lebih dari yang lain—dan ambil tindakan untuk menghindari/mengatasi yang sesuai.

- Analisis situasi partisipatif dengan analisis gender dan kekuasaan sangat penting untuk pemahaman mendasar tentang apa arti kesetaraan dalam konteks tertentu, dan dinamika kekuasaan yang mendasari dan berdampak pada kemitraan dengan masyarakat. Setiap kegiatan harus didasarkan pada pemahaman yang baik tentang konteks dan berakar pada dukungan kepemimpinan, prioritas, dan visi identitas sosial tertentu untuk partisipasi dan masa depan mereka.

- Hak dapat bervariasi di dalam komunitas dan lintas sumber daya, dan beberapa identitas sosial (misalnya, perempuan, pemuda, migran baru) mungkin tidak diberikan hak yang sama seperti yang lain, oleh karena itu perlunya lensa kesetaraan. Pertimbangan yang cermat tentang siapa pemegang hak dalam suatu komunitas dan seberapa aman hak yang diberikan diperlukan, karena hal ini berimplikasi pada siapa yang memiliki suara dalam keputusan penggunaan dan pengelolaan, dan siapa yang menerima manfaat.

- Dalam proses partisipatif seperti lokakarya pengembangan kapasitas kepemimpinan dan manajemen dan MSD, sangat penting untuk memastikan partisipasi yang adil dan peluang kepemimpinan di seluruh identitas sosial, memperhatikan dinamika kekuatan mikro dan makro dan menyediakan pengembangan kapasitas di semua sisi untuk mengatasi ketidakseimbangan kekuatan dan memahami serta mengurangi potensi konsekuensi yang tidak diinginkan dari partisipasi bagi anggota masyarakat.

- Ketika mendukung penghidupan yang berkelanjutan, penekanan yang sama harus diberikan untuk memastikan kesetaraan dalam peluang dan manfaat di seluruh identitas sosial dan menghindari konsekuensi yang tidak diinginkan—terutama perebutan elit, memperlebar kesenjangan kekayaan yang ada, dan peningkatan kekerasan berbasis gender.

ISTILAH UTAMA

Perangkap Elit—menyiratkan beberapa situasi yang terkait, namun sangat berbeda, termasuk dominasi dan kontrol proses pengambilan keputusan, monopoli manfaat dan sumber daya publik, dan kombinasi keduanya. Konsep ini juga digunakan untuk menggambarkan situasi di mana elit politik dan ekonomi menyalahgunakan sumber daya dan dana publik atau melakukan tindakan penyimpangan.[108]

Kesetaraan—konsep multi-dimensi dari masalah etika dan keadilan sosial berdasarkan distribusi biaya dan manfaat, proses dan partisipasi, dan pengakuan, yang didukung oleh konteks yang sedang dipertimbangkan. Terkadang digunakan secara sinonim dengan fairness atau keadilan.[109]

Hak Asasi Manusia—hak yang melekat pada semua orang, apa pun kebangsaannya, tempat tinggal, jenis kelamin, identitas gender, orientasi seksual, asal kebangsaan atau etnis, ras, agama, bahasa, usia, kemampuan, atau status lainnya. Kita semua sama-sama berhak atas hak asasi manusia tanpa diskriminasi.[110]

Persimpangan—pertama kali diciptakan pada tahun 1989 oleh profesor Kimberlé Crenshaw, menjelaskan konsep bahwa sifat-sifat yang dibangun secara sosial tidak ada dalam isolasi satu sama lain, melainkan saling berhubungan dan mempengaruhi satu sama lain secara terbuka dan terselubung.[111]

Identitas Sosial—aspek-aspek seseorang yang didefinisikan dalam hal keanggotaan kelompoknya (misalnya, identitas Pribumi, ras, etnis, agama atau afiliasi sistem kepercayaan, kebangsaan, usia, orientasi seksual, identitas gender, bahasa, tingkat pendidikan, status sosial ekonomi atau kelas, lokasi geografis, migrasi atau status visa).[112]

Lihat **"Alat 12: Melakukan Analisis Daya"** untuk alat yang menjelaskan aspek multi-dimensi daya, dan memberikan panduan serta template untuk melakukan analisis daya.

Lihat **"Alat 13: Panduan Hak Asasi manusia"** untuk panduan rinci tentang penerapan pendekatan berbasis hak asasi manusia.

Lihat **"Alat 14: Pedoman Gender"** untuk panduan rinci tentang integrasi kesetaraan gender dalam proyek dan strategi konservasi.

Di bidang konservasi, keadilan sosial dapat digambarkan memiliki empat dimensi—1) distribusi biaya, tanggung jawab, hak, dan manfaat, 2) prosedur pengambilan keputusan dan siapa yang memiliki suara, 3) pengakuan dan penghormatan terhadap status yang sama dari identitas, sejarah, nilai, dan kepentingan yang berbeda, dan 4) sejarah dan keadaan sosial, ekonomi, lingkungan, dan politik yang mendasarinya.[109] Minimal, organisasi konservasi harus berkomitmen untuk "pertama, tidak merugikan" di masyarakat yang bermitra dengan kita dan memastikan bahwa masyarakat lokal tidak menanggung biaya konservasi secara tidak adil sementara masyarakat diuntungkan.[113-114] TNC berkomitmen untuk memenuhi persyaratan perlindungan sosial dasar ini dan untuk melampaui: melalui mendukung dan memajukan visi dan penentuan nasib sendiri Masyarakat Adat dan komunitas lokal.

Komitmen ganda ini—tidak hanya untuk tidak merugikan, tetapi juga untuk membangun pendekatan kemitraan sejati yang berpusat pada kesetaraan dan penentuan nasib sendiri—membutuhkan pemahaman yang kuat tentang konteks spesifik. Untuk melakukannya, penting untuk mengenali komunitas sebagai campuran beragam kelompok dan identitas. Kelompok

atau identitas sosial yang berbeda (misalnya, berdasarkan jenis kelamin, usia, status sosial ekonomi, etnis, ras, agama, dll.) sering menggunakan sumber daya alam dengan cara yang berbeda, tergantung pada pengetahuan dan keterampilan mereka, yang terkait langsung dengan lingkungan sosial mereka. peran dan tanggung jawab yang ditentukan, dan dipengaruhi dengan cara yang berbeda. Misalnya, kegiatan tertentu dapat menggeser alokasi waktu dan menambah beban kerja bagi anggota rumah tangga yang lebih rentan, seperti perempuan dan anak-anak. Jika biaya dan perbedaan potensial ini tidak sepenuhnya dipahami, keberhasilan kegiatan apa pun kemungkinan besar akan terbatas, dan mungkin dengan konsekuensi yang tidak diinginkan bagi beberapa anggota masyarakat. Sebaliknya, ketika pertimbangan kesetaraan dimasukkan ke dalam desain, implementasi, dan pemantauan program, pada akhirnya akan menghasilkan hasil yang lebih baik bagi manusia dan alam dan meningkatkan umur panjang keputusan dan tindakan masyarakat. Hal ini didukung oleh penelitian yang menemukan peningkatan partisipasi perempuan dalam pengelolaan hutan dan perikanan menghasilkan aturan penggunaan sumber daya yang lebih baik, peningkatan kepatuhan, dan ekosistem yang lebih terlindungi.[115-116]

Menciptakan hubungan yang saling menghormati dan setara dengan Penduduk Asli dan komunitas lokal membutuhkan waktu. Meskipun keterlibatan TNC akan terlihat berbeda dalam situasi yang berbeda, tanggung jawab untuk memusatkan visi masyarakat adat dan lokal untuk masa depan, dan menghormati keragaman identitas sosial dalam kelompok-kelompok ini, tetap konstan. Di semua kegiatan, analisis situasi partisipatif yang kuat yang mencakup analisis gender dan kekuasaan intra-komunitas penting untuk memahami cara-cara yang responsif secara budaya untuk mendukung otoritas dan kapasitas masyarakat. Misalnya, menilai distribusi manfaat—baik yang berwujud (misalnya, pendapatan, teknologi) dan tidak berwujud (misalnya, pendidikan, status, partisipasi, inklusi, keamanan, agensi)—dari strategi konservasi adalah penting, karena beberapa kelompok mungkin mendapat manfaat lebih banyak daripada yang lain. Analisis ini dapat memandu bagaimana memberikan dukungan tersebut dengan cara yang menghindari reaksi balik dan potensi diskriminasi atau kekerasan berbasis identitas. Analisis harus mengenali dan menanggapi dinamika kekuasaan, termasuk realitas yang berbeda untuk identitas sosial yang berbeda, dan bergerak melampaui memperlakukan identitas sosial sebagai kelompok yang homogen; sebaliknya, sangat penting untuk mengenali bahwa identitas lengkap seseorang terdiri dari banyak interseksionalitas di berbagai identitas sosial yang berbeda.[117] Memfasilitasi partisipasi masyarakat yang ditargetkan dan efektif di seluruh identitas sosial dalam analisis situasi adalah penting untuk memastikan bahwa kegiatan selanjutnya dikembangkan secara kolaboratif dan responsif secara budaya, dan bahwa kegiatan tersebut tidak menyebabkan konsekuensi negatif yang tidak diinginkan, seperti reaksi balik, kekerasan berbasis identitas, atau pemaksaan asumsi dari luar—termasuk asumsi tentang seperti apa kesetaraan itu—yang dapat melanggengkan kolonial. kerangka kerja atau dampak (korespondensi pribadi, Janine Mohamed, Institut Lowitja).

Kesetaraan dalam Hak dan Kepemilikan

Hak dasar Masyarakat Adat untuk menentukan nasib sendiri terletak pada hak mereka yang terjamin atas tanah, air, dan sumber daya. Hal ini ditegaskan dalam **Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat** Misalnya, Pasal 25 menegaskan hak Masyarakat Adat untuk memelihara dan memperkuat hubungan spiritual dengan tanah, perairan, dan wilayah mereka; Pasal 29 menguraikan hak Masyarakat Adat atas konservasi, perlindungan, dan kapasitas produksi tanah atau wilayah dan sumber daya mereka; dan Pasal 32 mengartikulasikan hak Masyarakat Adat untuk menentukan prioritas penggunaan dan pengembangan tanah, wilayah, dan sumber daya.[3]

Pendekatan yang adil untuk mengamankan hak-hak masyarakat adat dan lokal atas tanah, air, dan sumber daya dapat mencakup mendukung implementasi kebijakan atau perubahan yang berkontribusi pada kondisi hak dan kesetaraan yang lebih menguntungkan. Pendekatan ini juga dapat melibatkan dukungan terhadap hak kepemilikan, penggunaan, dan warisan yang adil di seluruh identitas sosial dalam suatu komunitas. Secara historis, upaya untuk meningkatkan kepastian tenurial seringkali terfokus terutama pada sumber daya yang digunakan

oleh laki-laki, meskipun ada perbedaan penggunaan dan pengetahuan yang dimiliki oleh perempuan. Selanjutnya, dalam beberapa konteks perempuan mungkin tidak dapat memiliki tanah, dan jika mereka dapat memiliki tanah bersama dengan suaminya, tanah seringkali diwarisi oleh kerabat laki-laki jika suaminya meninggal dunia. Latar belakang ketidaksetaraan struktural ini merusak kesejahteraan dan keamanan perempuan, serta komunitas mereka dan ekosistem yang mereka lindungi. Ketika perempuan memiliki hak yang lebih terjamin, mereka meningkatkan ketahanan mereka, pendapatan mereka, persediaan makanan untuk keluarga mereka, dan kesehatan tanah, air, dan sumber daya alam yang mereka kelola.[118-119]

Lokasi geografis juga dapat mempengaruhi dinamika kekuasaan dan rezim hak. Misalnya, dalam konteks air tawar, terletak di hulu memberikan keuntungan tertentu dibandingkan berada di hilir, dan ketidakseimbangan kekuatan bertindak untuk melawan atau memperkuat dinamika ini. Khususnya, upaya untuk mengamankan tenurial juga dapat meningkatkan risiko konflik atau ketidakpuasan, karena pemberian dan klarifikasi hak dapat menghasilkan hasil yang tidak berarti. Ketika seseorang diberikan hak milik, orang atau entitas lain dapat kehilangan hak tersebut (misalnya, berpindah dari perikanan skala kecil akses terbuka ke pendekatan pengelolaan berbasis hak).

Kesetaraan dalam Kepemimpinan, Tata Kelola, dan Kapasitas Manajemen

Penentuan nasib sendiri masyarakat adat harus menjadi inti dari upaya untuk mendukung kepemimpinan, tata kelola, dan kapasitas manajemen Masyarakat Adat dan komunitas lokal.[120] Ini termasuk menghormati dan bekerja dengan masyarakat pemimpin dan institusi, struktur pemerintahan tradisional dan kontemporer, dan proses pengambilan keputusan, serta menghormati dan menerapkan pengetahuan Pribumi dan lokal bersama dan setara dengan sains Barat,[121] dan mengambil langkah-langkah untuk melindungi kekayaan intelektual masyarakat adat dan lokal. Tidak ada kegiatan yang boleh dilakukan tanpa Persetujuan Masyarakat Adat Dengan Informasi Awal Tanpa Paksaan, yang merupakan proses berkelanjutan yang harus dilakukan sepanjang siklus hidup suatu inisiatif.[122] Membangun kapasitas berjalan dua arah—kapasitas staf dan mitra juga perlu dibangun untuk memajukan pendekatan yang adil dan berbasis hak asasi manusia untuk pekerjaan ini. Praktisi konservasi harus terbuka dan bersedia untuk mendapatkan wawasan, keterampilan, dan pengetahuan baru dengan semakin banyak mereka terlibat, bermitra, dan bekerja bersama Masyarakat Adat dan komunitas lokal.

Ketika strategi pengembangan kapasitas dirancang dan diterapkan, perhatian terhadap inklusi, kesetaraan dampak dan manfaat, dan kemungkinan penangkapan elit penting untuk keberhasilan mereka. Inisiatif pengembangan kapasitas yang berhasil harus memajukan akses yang adil (ke informasi, alat, dan peluang), partisipasi yang adil (dalam pelatihan, pertemuan, dan proses pengambilan keputusan), dan kepemimpinan yang adil (dalam perencanaan, implementasi, dan pemantauan). Pemegang hak dan pemangku kepentingan yang berbeda memiliki pengalaman, preferensi, dan latar belakang yang berbeda, dan tindakan berdasarkan informasi diperlukan untuk memastikan inklusi mereka. Misalnya, perempuan sering kali mengelola sumber daya alam yang berbeda dari laki-laki, yang penting dalam pemrograman seputar tata kelola dan pengelolaan sumber daya alam.

Kami mendukung pendekatan kesetaraan gender. Banyak bukti menegaskan bahwa manusia dan alam diuntungkan ketika perempuan memiliki hak, suara, dan pilihan yang lebih kuat dalam pengelolaan sumber daya alam.[115-116] Dengan menyertakan semua suara, kita dapat lebih baik mendukung perlindungan seluruh rangkaian sumber daya yang diandalkan dan dipelihara orang. Hal ini memerlukan pelibatan laki-laki dan anak laki-laki dalam analisis gender dan kegiatan yang berfokus pada kesetaraan gender, sehingga bersama-sama dengan perempuan dan anak perempuan, persamaan dan perbedaan dapat dikenali, dan solusi diusulkan untuk mendukung pemahaman, akuntabilitas, kesetaraan, dan keberlanjutan.

Contoh tindakan yang dapat meningkatkan kesetaraan dalam upaya mendukung kepemimpinan, kapasitas, dan tata kelola masyarakat yang kuat tercantum dalam Tabel 6. Harap dicatat mungkin ada interseksi antara banyak identitas yang terdaftar.

Tabel 6: *Contoh tindakan yang dapat diambil untuk mempromosikan kesetaraan dalam kepemimpinan, tata kelola, dan pengembangan kapasitas manajemen untuk identitas sosial yang berbeda.*

Contoh Identitas Sosial	Contoh Tindakan Ekuitas
Gender	Pelatihan dan dukungan keuangan untuk jaringan dan kelompok perempuan; mengadakan pelatihan tambahan yang difasilitasi oleh perempuan untuk anggota komunitas perempuan; menyediakan penitipan anak pada pertemuan atau menawarkan akomodasi atau tunjangan bagi perempuan untuk membawa anak-anak mereka dan/atau pengasuh; menjadwalkan pelatihan dan pertemuan untuk waktu dan tempat yang aman dan dapat diakses oleh wanita dan tidak menambah beban waktu, paparan risiko, dan beban kerja mereka;[h] memfasilitasi pertukaran pembelajaran di antara wanita dari komunitas yang berbeda; mendukung kapasitas dan kepercayaan diri perempuan di bidang-bidang seperti berbicara di depan umum, negosiasi, manajemen keuangan, dan kepemimpinan proyek
Usia	Pelatihan dan dukungan keuangan untuk jaringan dan kelompok pemuda; mendorong partisipasi pemuda dalam pengambilan keputusan dan peran kepemimpinan; mengembangkan peluang mata pencaharian berkelanjutan dengan kaum muda; mendukung partisipasi Sesepuh; mendukung hubungan antargenerasi; mendukung transisi kepemimpinan yang sehat, bimbingan, dan perencanaan suksesi
Etnis	Mengadakan lokakarya dalam bahasa lokal dan/atau menyediakan layanan terjemahan dan iklan terlebih dahulu; memastikan materi pelatihan tersedia dalam format dan bahasa yang dapat diakses;[i] menciptakan metode dan proses untuk belajar dan berbagi pengetahuan lokal dan etnis yang muncul dan terungkap; menyediakan pembawa damai atau mediator pihak netral jika diperlukan
Status/kelas sosial ekonomi	Memberi kompensasi kepada anggota masyarakat atas partisipasi mereka; memastikan pertemuan dan pelatihan tidak diadakan pada saat-saat ketika pekerjaan mata pencaharian diperlukan atau selama musim panen; mendukung dan mencari vendor lokal dan penyedia layanan untuk pertemuan atau acara berbasis tempat; menghindari keterlibatan istimewa dengan anggota komunitas terkaya dan terpelajar

h. Ini juga penting untuk menghindari konsekuensi yang tidak diinginkan dari anak-anak yang bolos sekolah untuk membantu tugas-tugas rumah tangga.

i. Pertimbangkan tingkat melek huruf, serta kemungkinan bahwa perempuan atau etnis minoritas dapat berbicara dalam bahasa Pribumi atau lokal tetapi bukan bahasa nasional.

Kesetaraan dalam MSD

Banyak pertimbangan kesetaraan yang terkait dengan merancang dialog multi-stakeholder yang efektif dan proses pengambilan keputusan yang tumpang tindih dengan yang relevan dengan pilar kepemimpinan, tata kelola, dan kapasitas manajemen dari Kerangka SPA. Konteks penjajahan dan ketidakseimbangan kekuasaan yang bersejarah dan saat ini memerlukan pembangunan kapasitas semua pemegang hak dan pemangku kepentingan yang terlibat. Jika tidak, ada risiko dinamika kekuatan makro yang sama terjadi dalam ruang inisiatif. Ini mungkin melibatkan pembangunan kapasitas pemerintah atau perusahaan swasta dalam hak dan keterlibatan masyarakat adat, serta dukungan untuk kapasitas masyarakat adat dan masyarakat lokal dalam terlibat dalam kebijakan atau ruang perusahaan. Penting untuk diingat bahwa meskipun organisasi konservasi dapat men-jadi penyelenggara terpercaya di ruang-ruang ini, kami bukannya tanpa bias, dan prinsip yang sama yang berlaku untuk pengembangan kapasitas kami sendiri di pilar kepemimpinan berlaku untuk pengembangan kapasi-tas kami untuk keterlibatan dalam kebaikan sebagai aktor dalam ling-kungan multi-stakeholder.

Dinamika kekuatan merupakan pertimbangan utama dalam desain dan keberhasilan MSD, baik di dalam komunitas itu sendiri maupun dalam hubungannya dengan kelompok pemangku kepentingan lainnya. Dalam banyak kasus, kurangnya hak formal, kurangnya kapasitas, dan ku-rangnya alternatif ekonomi dapat menempatkan masyarakat lokal pada kerugian yang sebanding dalam hal kekuasaan dan pengaruh dalam pengambilan keputusan. Dalam kasus degradasi lingkungan, pihak yang diuntungkan dari kegiatan perusakan lingkungan seringkali lebih berkuasa dalam konteks sistemik saat ini daripada pihak yang dirugikan oleh degradasi, sehingga memaksa pihak yang kurang kuat menanggung akibatnya.[123] Perbedaan dalam akses, pengaruh, sumber daya, dan informasi tidak selalu mudah diatasi, dan mereka yang berkuasa dapat enggan untuk melepaskan kendali, berkali-kali menggunakan kekuatan ini untuk mendikte bentuk (misalnya, waktu dalam sehari, waktu tahun, lokasi) dan fungsi (misalnya, proses) dialog. Ketidakpekaan terhadap kebutuhan Masyarakat Adat dan komunitas lokal selanjutnya dapat mengurangi peluang mereka untuk terlibat secara bermakna.[91] Dalam kasus-kasus ini, komunitas lokal dapat mengalami “token” atau partisipasi tanpa makna yang tidak tidak mengarah pada perubahan signifikan dalam otoritas pengambilan keputusan. Penting juga untuk mengakui munculnya pemerintah anti-Pribumi dan aktor lain yang mempromosikan kekerasan terhadap pembela lingkungan dan merusak keamanan tanah, air, dan sumber daya. Beberapa aktor dan ruang akan menjadi tidak aman untuk keterlibatan Masyarakat Adat dan lokal, dan sangat penting untuk memahami dari mitra itu sendiri di mana untuk mendukung keterlibatan mereka dan mana yang mereka pilih untuk dihindari. Di semua bidang di mana banyak aktor terlibat, penting untuk secara kolaboratif mengembangkan rencana resolusi konflik yang responsif secara budaya dan berfokus pada dialog.[124]

MSD harus mendukung akses, partisipasi, dan kepemimpinan semua pemangku kepentingan (termasuk identitas sosial yang rentan atau kurang terwakili) dalam semua diskusi dan pengambilan keputusan.[125] Masyarakat sendiri memiliki keragaman internal yang harus diakui untuk memastikan keterwakilan dan partisipasi yang memadai—misalnya, wanita, Sesepuh, dan kelompok lain yang memiliki perspektif dan pengetahuan unik untuk ditambahkan ke pembahasan. Mengenai kesetaraan gender secara khusus, mendukung koneksi dan per-tukaran di seluruh jaringan dan organisasi perempuan dapat memberikan kesempatan penting untuk belajar, berbagi, dan memajukan prioritas per-empuan.

Silakan lihat Tabel 6 untuk contoh tindakan yang dapat diambil untuk mempromosikan kesetaraan di ruang MSD. Secara umum, perhatian harus diberikan pada biaya tersembunyi/tidak disengaja dari partisipasi dalam MSD (misalnya, kehilangan upah, pergeseran beban waktu), mengakomodasi bahasa lokal (misalnya, menga-dakan dalam bahasa lokal atau menyediakan terjemahan simultan), waktu pelaksanaan hari dan tahun MSD berlangsung (misalnya, tidak selama panen atau musim penangkapan ikan), format dialog (misalnya, diselaraskan dengan pendekatan tradisional untuk diskusi dan pengambi-lan keputusan), dan bahwa orang yang tepat disertakan (misalnya, tidak hanya elit kaya dan menghormati pemimpin terpilih/tradisional).

Kesetaraan dalam Peluang Mata Pencaharian Berkelanjutan

Pilar ini, mungkin lebih dari pilar lainnya, memiliki potensi untuk memperburuk kesenjangan kesetaraan yang ada, dan dengan demikian perhatian besar harus diberikan untuk memastikan pendekatan yang responsif secara budaya terhadap partisipasi dan manfaat yang adil. Di sisi lain, peluang mata pencaharian yang berkelanjutan memiliki potensi untuk membuat sistem lebih adil, tetapi hanya jika inisiatif ini digabungkan dengan atau berkontribusi pada transformasi struktur saat ini, yang bergantung pada ketidakseimbangan kekuatan yang melekat. Untuk membuat peluang mata pencaharian yang berkelanjutan adil, kita harus terus mendukung partisipasi dan kepemimpinan identitas sosial yang berbeda dalam mendefinisikan "apa" dan "bagaimana", dan mendukung pembagian manfaat yang adil dalam rumah tangga dan di seluruh identitas sosial. Distribusi manfaat yang adil juga merupakan kunci untuk mencegah mem-perdalam yang ada atau menciptakan ketidakadilan baru di dalam masyarakat, serta menciptakan manfaat tambahan yang penting. Misalnya, perempuan dan anak-anak mungkin tidak merasakan manfaat yang dikendalikan oleh kepala rumah tangga laki-laki. Lebih lanjut, jika hanya anggota masyarakat tertentu—biasanya yang paling kaya—berpartisipasi dalam peluang mata pencaharian, pendapatan mungkin tidak mengalir ke seluruh komunitas.[126] Terakhir, ini penting untuk mengidentifikasi risiko dan melindungi terhadap potensi konsekuensi negatif yang tidak diinginkan, seperti reaksi balik, kekerasan berbasis gender atau diskriminasi (misalnya, berakar pada kecemburuan, ketakutan, atau kemarahan pada gangguan dinamika kekuasaan atau distribusi kekayaan), peningkatan beban waktu dan beban kerja, atau memperburuk kesenjangan atau disparitas kekayaan yang ada.[127-129]

Contoh inisiatif kesetaraan gender yang berfokus pada mata pencaharian berkelanjutan termasuk mendukung akses perempuan ke teknologi, aset, tabungan, dan kredit; mendukung perempuan dalam produksi dan pemasaran produk berkelanjutan yang berasal dari sumber daya yang dikelola secara tradisional oleh perempuan; meningkatkan pengakuan dan kompensasi atas peran yang dilakukan perempuan secara tradisional; atau mendukung wanita dalam upaya baru yang mereka pilih. Pada dasarnya, kesetaraan gender meningkatkan kehidupan, termasuk kesehatan hasil,[130] pembangunan ekonomi,[131] kebijakan sosial, kelestarian lingkungan, dan peluang bagi generasi mendatang.

Inisiatif mata pencaharian berkelanjutan juga dapat menjadi peluang yang sangat penting bagi kepemimpinan dan kompensasi pemuda, memungkinkan mereka untuk tetap tinggal di komunitas mereka, menerima pengetahuan yang diturunkan dari Sesepuh mereka, dan mengambil peran dalam pengelolaan tanah, air, dan sumber daya. Berdasarkan pemahaman konteks, menargetkan inisiatif tertentu untuk partisipasi pemuda (termasuk perempuan muda dan laki-laki muda) dan kolaborasi antargenerasi dapat menjadi kunci untuk perubahan positif yang langgeng dan masa depan yang berkelanjutan.

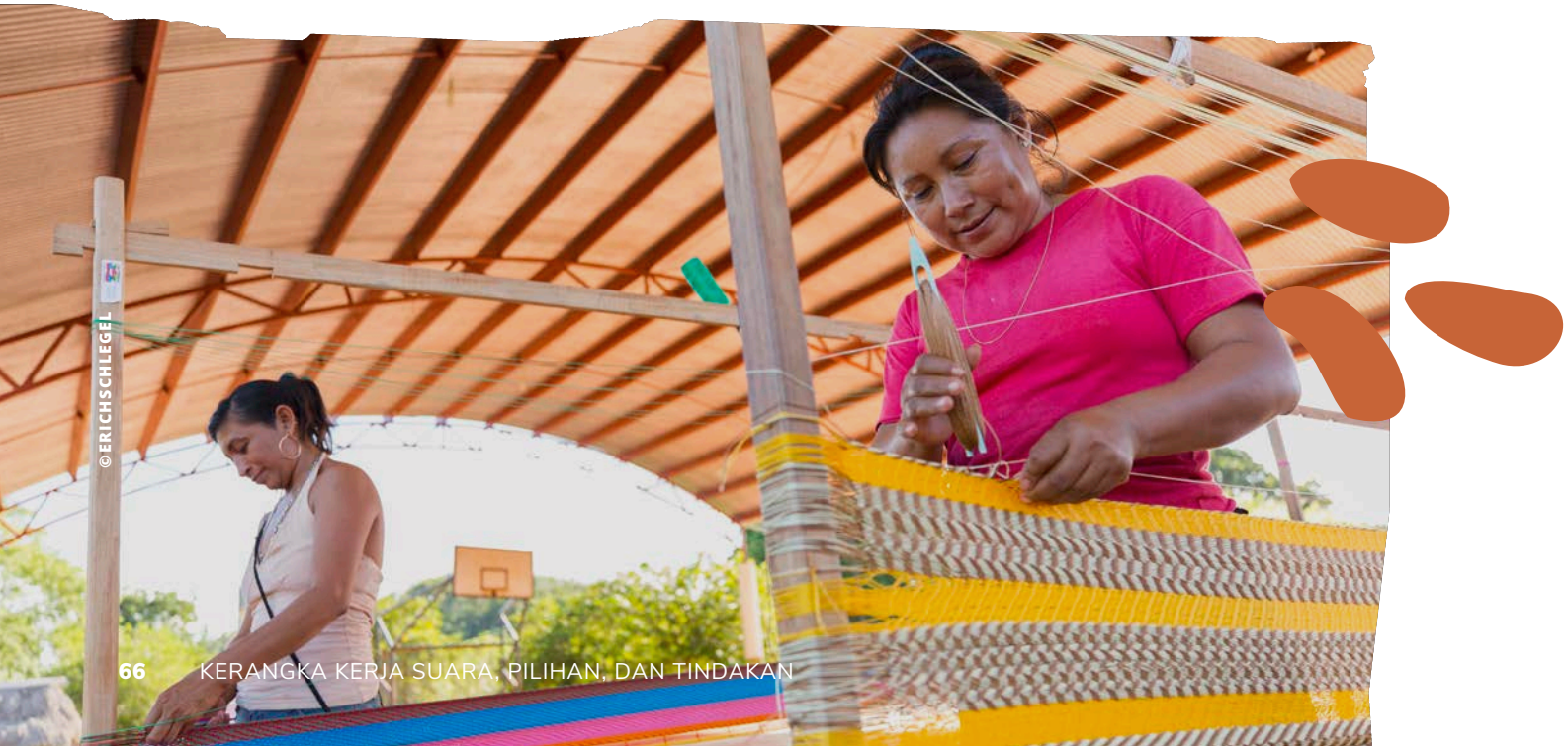

Studi kasus

Kepemimpinan Perempuan di Masyarakat Adat Xikrin Brasil

Masyarakat Adat Xikrin Bacajá, berjumlah sekitar 1.300 orang, tinggal di 20 desa di Tanah Adat Bacajá Trincheira, sebuah wilayah seluas 4 juta hektar (1,65 juta hektar) di negara bagian Pará Brasil di jantung Hutan Hujan Amazon. Penyerap karbon alami yang besar dan surga bagi keanekaragaman hayati, Amazon tidak diragukan lagi merupakan salah satu ekosistem terpenting di dunia—dan tanah adat sangat penting untuk perlindungannya, yang men-cakup lebih dari 27 persen luas daratan di Lembah Amazon dan menam-pung 33 persen dari cadangan karbonnya. TNC telah bermitra dengan Orang Xikrin dalam perlindungan hutan dan peluang mata pencaharian selama beberapa tahun, dan baru-baru ini kemitraan tersebut telah memasukkan fokus gender yang disengaja.

Melihat bahwa tanggung jawab mereka sering dilihat baik di dalam maupun di luar desa sebagai peran sekunder, perempuan Xikrin (dikenal se-bagai Menire) berangkat untuk mendapatkan pengakuan yang lebih kuat atas peran mereka sebagai pengelola sumber daya alam, serta peluang untuk memimpin jenis proyek lain di komunitas mereka. Tujuan mereka adalah untuk mengatur diri mereka sendiri dan melibatkan mitra yang mendukung, untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan mereka dan meningkatkan visibilitas mereka dalam komunitas mereka dan di dunia kuben (orang kulit putih). Dengan banyak peran dan kepentingan mereka yang berpusat pada pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, mendukung visi dan kepemimpinan *Menire adalah solusi alami dan jangka panjang untuk meningkatkan kesejahteraan lingkungan dan manusia.*

Para wanita Xikrin memulai perjalanan ini untuk visibilitas eksternal pada tahun 2013, dengan beragam portofolio manajemen sumber daya berkelanjutan dan proyek produksi dalam kemitraan dengan Yayasan Masyarakat Adat Nasional (FUNAI) pemerintah Brasil, The Nature Conservancy, Rencana Pembangunan Berkelanjutan Regional di Xingu (PDRS Xingu), dan komunitas tradisional ribeirinhodi Rio Novo. Platform keterlibatan multi-pemangku kepentingan ini telah menjadi kunci untuk mendorong dan mempertahankan kemitraan kerja dalam mendukung suara, pilihan, dan tindakan Masyarakat Adat di seluruh kawasan.

KETERANGAN GAMBAR
Bioma Kerangka VCA

TERESTRIAL **AIR TAWAR** **PESISIR**

Proyek-proyek yang dipimpin perempuan ini—termasuk pembuatan pakaian, produksi tepung, budidaya sayuran, dan pembuatan pewarna untuk cat tubuh (dan baru-baru ini untuk bahan pengecatan seperti tas dan ke-meja)—semuanya bertujuan untuk mendukung pengelolaan, panen, dan produksi hasil hutan bukan kayu, yang pada gilirannya mendorong dan memelihara hutan hidup yang hidup. Beberapa dari proyek ini berlanjut hingga hari ini dan menjadi contoh bagi desa lain, mendorong partisipasi lebih banyak keluarga yang tertarik..

Salah satu proyek yang telah berkembang dan sekarang melibatkan partisipasi beberapa desa Xikrin adalah produksi minyak babaçu , dari biji pohon palem. Proyek ini berpusat pada penguatan kapasitas *Menire's untuk memimpin pengelolaan, produksi, dan komersialisasi minyak babaçu* untuk penggunaan subsisten di desa-desa dan untuk komersialisasi eksternal. Minyak tersebut dijual dengan harga yang wajar dan disalurkan langsung ke konsumen atau toko di pusat kota, memotong pembeli perantara dan menambahkan nilai ekonomi yang signifikan untuk kegiatan budaya dan lingkungan yang penting.

Proyek ini juga mencakup pendirian nhô rõny kangõ nhõ kikre*(babaçu rumah pengolahan minyak) baru, mesin ekstraksi minyak kecil, dan botol serta label untuk mengemas minyak. Memproses babaçu minyak untuk memasak, kosmetik, dan keperluan ritual adalah peran tradisional dan warisan budaya yang kaya dari Menire* yang sudah ada sejak beberapa generasi; sekarang ini memberikan kesempatan untuk kepemimpinan, pendapatan, dan pengakuan yang lebih besar bagi perempuan Xikrin dan desa mereka. Proyek ini mendapat pengakuan dari Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk pemberdayaan dan otonomi perempuan dalam kegiatan pedesaan yang mempromosikan makanan sehat dan tradisional.

Perempuan adat adalah pemimpin yang menjanjikan bagi generasi mendatang. Ibu, nenek, nenek buyut—semua perempuan di masyarakat—berbagi pemahaman penting dan tanggung jawab atas sumber daya hutan, yang sangat penting bagi ketahanan pangan seluruh keluarga, dan untuk pengelolaan sumber daya masyarakat yang berkelanjutan. Dalam Rencana Pengelolaan Wilayah dan Lingkungan Rakyat Xikrin (PGTA—dikembangkan dalam kemitraan dengan TNC), the *Menire* menekankan pentingnya memperkuat pengetahuan tradisional mereka dan pengelolaan komersial hasil hutan bukan kayu, seperti *piy* (kacang Brasil). Seluruh keluarga berpartisipasi dalam pemrosesan *piy*, termasuk pengumpulan, pencucian, pengeringan, pengangkutan, dan penyimpanan.

TNC juga mendukung Masyarakat Adat lainnya dalam mengelola dan mengkomersialkan sumber daya seperti kacang Brazil, termasuk Masyara-kat Adat Parakan di Tanah Adat Apiterewa, yang bertetangga dengan Xikrin. Seperti halnya proyek minyak babaçu organisasi yang didirikan Masyarakat Xikrin dan Parakanã mengelola dan menjual kacang Brasil langsung ke industri, misalnya ke pabrik roti, menghilangkan pembeli perantara dan dengan demikian menerima harga yang lebih tinggi. Orang-orang Parakana juga mengembangkan rantai pasokan komersial yang kuat untuk kerajinan tradisional mereka, menjualnya dengan nilai tambah dan ke pasar dengan permintaan yang stabil. Hal ini pada gilirannya memberikan aliran pendapatan konstan yang lang-sung mengalir ke perempuan, yang menggunakannya untuk meningkatkan kehidupan keluarga dan desa mereka dan pada akhirnya untuk mem-perkuat otonomi Parakan atas tanah mereka.

Kondisi pemungkin yang berkontribusi pada keberhasilan di tempat-tempat ini adalah adanya hak atas tanah yang dibatasi batasnya dengan aman. Meskipun jauh dari sepenuhnya aman dari perambahan dan masuk dan ekstraksi ilegal oleh aktor luar, fakta bahwa wilayah Xikrin dan Parakanã dibatasi membuat titik awal yang lebih stabil untuk upaya ini Selain itu, dukungan kemitraan jangka panjang dan platform multi-stakeholder yang kuat telah menjadi komponen penting dari pekerjaan ini. Misalnya, Masyarakat Adat dari berbagai negeri berkumpul bersama dalam inisiatif penghidupan berkelanjutan, untuk mencapai skala dan dampak yang lebih besar, dan untuk terhubung dengan mekanisme seperti **selo Origens Brasil®** untuk sertifikasi berkelanjutan. Salah satu cara TNC Brasil mendukung keterlibatan multi-stakeholder kepentingan yang berkelanjutan adalah melalui pemeliharaan perjanjian kerja sama dengan FUNAI, untuk memastikan tujuan dan tindakan FUNAI dan TNC bersifat kolaboratif, saling melengkapi, dan menyelaraskan di belakang tujuan bersama untuk mendukung kepemimpinan Pribumi dan penentuan nasib sendiri di seluruh etno-daerah yang berbeda.

Meningkatnya visibilitas kepemimpinan perempuan Pribumi dalam asosiasi dan institusi Pribumi di semua tingkatan di seluruh Brasil mengarah pada hasil skala besar: Saat ini, Koordinasi Organisasi Adat Amazon Brasil (COIAB) dan Artikulasi Masyarakat Adat Brasil (APIB), misalnya, diwakili oleh para pemimpin per-empuan yang kuat yang mempromosikan hak-hak masyarakat adat dan ke-lestarian lingkungan di skala nasional dan regional.

Ketika hubungan antara kegiatan konservasi, kesetaraan gender, dan hak masyarakat adat dipahami, diakui, dan didukung, kegiatan konservasi memiliki potensi yang jauh lebih tinggi untuk menghasilkan dampak sosial yang positif dan berkontribusi pada hasil konservasi yang lebih bertahan lama. Dan kunci keberhasilan ini adalah memusatkan visi dan kepemimpinan perempuan adat itu sendiri, dan menghargai proses keterlibatan laki-laki, pemuda, dan anggota masyarakat lainnya, dengan TNC dan mitra lainnya memainkan peran yang mendukung. Mendukung perempuan Pribumi untuk berkembang dengan cara yang mereka anggap responsif secara budaya dan selaras dengan visi mereka untuk masa depan sangat penting untuk memastikan konservasi jutaan hektar lahan yang kritis secara ekologis di seluruh Amerika Latin dan di seluruh dunia.

Alat dan Sumber Daya

ALAT 12: KUESIONER—MELAKUKAN ANALISIS DAYA

Daya dapat didefinisikan sebagai tingkat kendali atas sumber daya material, manusia, intelektual, dan keuangan yang dijalankan oleh berbagai bagian masyarakat. Luasnya kekuasaan individu atau kelompok berkorelasi dengan berapa banyak jenis sumber daya yang berbeda yang dapat mereka akses dan ken-dalikan. Alat ini menjelaskan aspek multi-dimensi kekuasaan, dan memberikan panduan dan template untuk melakukan analisis daya. Analisis kekuatan harus dilakukan selama analisis situasi yang merupakan bagian dari proses perencanaan konservasi dalam kemitraan dengan Masyarakat Adat dan masyarakat lokal. Dengan demikian, praktisi konservasi mungkin merasa terbantu untuk mengkonsolidasikan berbagai aspek analisis situasi yang mungkin dilakukan secara terpisah menjadi satu analisis menyeluruh, yang dapat membantu menghemat waktu, sumber daya, dan modal sosial yang terbatas. Ini termasuk situasi umum dan analisis pemangku kepentingan, analisis gender, pemetaan pemegang hak tenurial dan pemangku kepentingan, dan pertimbangan kesetaraan dalam pelaksanaan dan pemantauan, evaluasi, dan pembelajaran.

ALAT 13: PERANGKAT—PANDUAN HAK ASASI MANUSIA TNC'S UNTUK BEKERJA DENGAN MASYARAKAT ADAT DAN KOMUNITAS LOKAL

Audiens untuk panduan ini adalah praktisi konservasi, manajer, dan pemimpin senior. Ini berlaku untuk semua pekerjaan yang dapat berdampak Masyarakat Adat dan komunitas lokal, relevan untuk semua skala pekerjaan dan pendekatan strategis, dan berguna terlepas dari peran proyek. Panduan ini diinformasikan oleh sembilan Prinsip dan Perlindungan yang diambil dari komitmen TNC terhadap hukum dan standar hak asasi manusia internasional. Isi utama dari panduan ini terdiri dari enam modul dan termasuk daftar periksa, template, alat, dan studi kasus.

Panduan ini juga tersedia dalam bahasa Cina, Prancis, Indonesia, Portugis, Spanyol, dan Swahili. Informasi lebih lanjut dapat diperoleh dengan mengunjungi situs web Panduan Hak Asasi Manusia *situs web.*

ALAT 14: PANDUAN—PANDUAN TNC UNTUK MENGINTEGRASIKAN KESETARAAN GENDER DALAM KONSERVASI

Tujuan dari panduan ini adalah untuk membantu praktisi konservasi mengintegrasikan genderpertimbangan kesetaraan dalam proyek atau strategi konservasi. Panduan mengikuti siklus Conservation by Design (CbD) 2.0 dan mencakup informasi, alat, dan sumber daya penting untuk melakukan analisis gender berbasis bukti, mengembangkan rencana aksi gender, membangun kerangka kerja berbasis hasil yang responsif gender (Tahap 1 CbD); mengintegrasikan pendekatan dan kegiatan yang tanggap gender dalam pelaksanaannya (CbD Tahap 2); dan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan hasil terkait gender (CbD Tahap 3).

Panduan ini juga tersedia dalam bahasa Cina, Prancis, Indonesia, Mongolia, Portugis, Spanyol, dan Swahili.

Selain itu, Lokakarya Integrasi Gender untuk Konservasi Masyarakat Adat dan Berbasis Komunitas berdasarkan panduan tersedia di conservationtraining.org, yang mencakup analisis gender, perencanaan aksi gender, kesetaraan gender di MEL, dan kekerasan dan keamanan berbasis gender. Untuk akses ke kurikulum pelatihan, hubungi conservationtraining@tnc.org

Unsur Dasar 2

Koneksi Kuat ke Pengetahuan dan Wilayah

Pengetahuan, Bukti, dan Praktik

POIN-POIN PENTING

- Bagi banyak Masyarakat Adat dan komunitas lokal yang bermitra dengan kami, koneksi ke pengetahuan dan Wilayah merupakan aspek penting dari identitas dan kesejahteraan, dan sumber etika timbal balik dan kepedulian terhadap lingkungan.

- Tingkat dan intensitas pengalaman hubungan manusia dengan Wilayah dapat bervariasi dan berubah dari waktu ke waktu karena berbagai keadaan, termasuk waktu yang dihabiskan di Wilayah, paparan pengetahuan berbasis Wilayah, sejarah, cerita, dan ajaran, dan kemampuan untuk terlibat dalam praktik budaya.

- Pengetahuan pribumi dan pengetahuan lokal berbeda dari pengetahuan Barat, karena keduanya sering diperoleh dan diwariskan selama ribuan tahun, dan tidak dapat dipisahkan dari Wilayah, orang, dan hubungan antar mereka. Pengetahuan pribumi berlanjut hingga hari ini di era modern pasca-kolonial dan dapat diakses oleh penjaga pengetahuan tepercaya.

- Bahasa pribumi, bersama dengan budaya, mendorong dan memungkinkan pengelolaan lingkungan dengan melaksanakan dan mengontekstualisasikan Pengetahuan Pribumi dan menanamkan pandangan dunia akan rasa hormat dan integrasi dengan alam. Hal ini mencakup dan berarti instruksi asli, hukum spiritual dan alam, praktik, dan filosofi yang mendefinisikan koneksi terhadap Wilayah.

- Setiap inisiatif yang melibatkan Pengetahuan Pribumi harus menghormati Bentuk kepemilikan intelektual dan kedaulatan data; dikendalikan dan disepakati akses dan sumbernya; dan berpusat pada mendukung apa yang diputuskan dan didefinisikan oleh komunitas sebagai kebutuhan dan kesepakatan penggunaan mereka sendiri untuk pengetahuan yang dibagikan.

ISTILAH UTAMA

Koneksi terhadap Wilayah—hubungan yang dikembangkan di antara individu, komunitas, dan masyarakat dan lingkungannya melalui konteks sejarah, budaya, lingkungan, pribadi, dan social.[132]

Kedaulatan Data—hak untuk memelihara, menguasai, melindungi, dan mengembangkan warisan budaya, pengetahuan, dan ekspresi budaya tradisional, serta hak untuk memelihara, menguasai, melindungi, dan mengembangkan kekayaan intelektual atas hal-hal ini.[133]

Pengetahuan Lokal SeWilayah e—kumpulan pengetahuan, praktik, dan kepercayaan kumulatif, yang berkembang dan diatur oleh proses adaptif dan diwariskan dan lintas (melalui) generasi melalui transmisi budaya, tentang hubungan makhluk hidup (termasuk manusia) dengan sesamanya dan dengan lingkungannya.[15] Konsep ini terkadang disebut sebagai "pengetahuan lokal" oleh mereka yang tidak mengidentifikasi diri sebagai Masyarakat Adat. Proses metode ilmiah dimulai dengan pengamatan diikuti dengan hipotesis yang lalu diuji.

Transfer Antargenerasi—mewariskan nilai-nilai, kepercayaan, dan pengetahuan biokultural masyarakat adat dan lokal dari satu generasi ke generasi berikutnya (misalnya, dari Sesepuh ke pemuda melalui narasi lisan).[134]

Ilmu Pengetahuan dari Barat—sebuah sistem pengetahuan—yang berfokus pada tujuan dan terukur—yang bergantung pada penerapan metode ilmiah pada fenomena di dunia. Proses metode ilmiah dimulai dengan pengamatan diikuti dengan hipotesis yang lalu diuji. Tergantung pada hasil pengujian (dan replikabilitas hasil tersebut), hipotesis dapat menjadi teori ilmiah atau "kebenaran" tentang dunia.

Hubungan dengan Wilayah, Kesejahteraan, dan Pemeliharaan Lingkungan

Koneksi terhadap wilayah dengan mengacu pada hubungan yang dikembangkan antara individu, komunitas, dan masyarakat dan lingkungan mereka melalui konteks sejarah, budaya, spiritual, lingkungan, pribadi, dan sosial. [132] Wilayah dan hubungan antar manusia dengannya mempengaruhi budaya, pandangan dunia, dan identitas. [135-136] Wilayah adalah konstruksi sosial yang dibangun dari atribut yang diamati dan dipahami oleh manusia dari lingkungannya,[137] dan keterikatan wilayah adalah ikatan emosional dengan suatu wilayah yang intensitasnya bervariasi.[138-139] Banyak masyarakat adat tidak dapat dipisahkan dari wilayah, yang terikat pada bahasa, nama, cerita, lagu, struktur organisasi sosial, pengetahuan, upacara, dan spiritualitas mereka. Bagi Masyarakat Adat dan komunitas lokal yang bermitra dengan kami, budaya dan wilayah seringkali sangatlah penting bagi identitas dan pandangan dunia masyarakatnya, sistem pengelolaan tradisional mereka dan aturan penggunaan untuk tanah, perairan, dan sumber daya, serta strategi konservasi yang paling tepat.

Bagi banyak komunitas Pribumi, hubungan dengan wilayah ini melampaui adanya etika perawatan dua arah di mana manusia telah membantu menumbuhkan lanskap dan ekologi di sekitarnya dan membangun kesinambungan dari waktu ke waktu.[140] Bagi Penduduk Asli, koneksi ke wilayah seringkali merupakan perasaan fisik, serta proses psikologis dan sosial budaya yang telah berkembang melalui leluhur, sejarah, dan tanggung jawab. Beberapa komunitas lokal yang tidak mengidentifikasi diri mereka sebagai Pribumi yang peduli terhadap sumber daya mungkin juga memiliki hubungan kuat yang sama terkait dengan budaya dan warisan mereka. Tingkat keterikatan ini mengurangi kemampuan untuk menggantikan satu wilayah tertentu dengan wilayah lain, yang menyebabkan ketergantungan yang kuat pada wilayah tertentu,[141-143] dan dapat mengakibatkan trauma (individu dan

antargenerasi) jika orang dipindahkan dari wilayahnya secara paksa, dengan kekerasan, perubahan iklim, atau cara lain.[144-145] Penelitian ekstensif menunjukkan bahwa hubungan yang kuat dengan alam dan wilayah menghasilkan perilaku yang berpihak terhadap lingkungan dan hasil konservasi yang lebih kuat,[141,146-147,148-156] sedangkan perusakan alam yang berdampak negatif bagi manusia baik secara psikologis maupun spiritual. [157] Penelitian juga menunjukkan bahwa semakin lama orang tinggal di suatu tempat, semakin kuat koneksi mereka.[158-159]

Meskipun semua manusia mengalami keterikatan terhadap suatu wilayah, terdapat berbagai tingkat intensitas. Mengapa keterikatan ini muncul dan bervariasi tergantung dari organisasi sosial, geografi, bahasa dan struktur kognitif, proses ritual, aturan seputar penggunaan tempat, dan produksi material. [160] Konsep yang terakhir ini—khususnya kemampuan suatu wilayah untuk berkontribusi pada kelangsungan hidup, keselamatan, dan keamanan melalui penyediaan makanan, air, tempat tinggal, dan mata pencaharian—seringkali menjadi sumber dan tingkat keterikatan suatu wilayah dengan komunitas lokal yang merupakan pendatang baru ke suatu tempat dan tidak memiliki budaya dan sejarah yang mengikat mereka ke tempat itu. Untuk komunitas lokal ini, hubungan erat dengan mata pencaharian. [161] Perubahan iklim berdampak negatif pada hubungan petani dengan wilayah di Australia Barat. Hubungan masyarakat ini terkait dengan rasa kepemilikan dan kerja mereka atas tanah. Hal ini menggambarkan pertanian mereka sebagai tempat mereka tinggal dan bekerja, sedangkan literatur yang membahas hubungan Pribumi tidak mengacu pada tempat sebagai tempat mereka bekerja melainkan warisan dan bagian integral dari budaya/keadaan mereka.[162-163] Terdapat hubungan nostalgia antara komunitas petani yang disebutkan di atas dan tanah mereka di mana mereka meratapi kondisi lingkungan yang semakin memburuk, dan keterikatan berbasis wilayah yang berpotensi memburuk.[162] Hubungannya dengan wilayah membedakan antara lanskap yang dikerjakan dan alam. Hal ini juga berbeda dengan pemahaman Pribumi di mana keduanya saling terkait.[164] Penelitian tambahan mencakup berbagai wilayah dan budaya diperlukan untuk lebih memahami insentif masyarakat lokal untuk peduli untuk lanskap dengan cara yang menguntungkan alam dan mata pencaharian mereka.

Pengetahuan Pribumi, Pengetahuan Lokal, dan Penglihatan Dua Mata (seperti yang dijelaskan oleh Sesepuh Dr. Albert Marshall)

Hubungan antara orang, wilayah, dan pemahaman mereka serta penggunaan sumber daya di sekitarnya disebut sebagai Pengetahuan Adat oleh mereka yang mengidentifikasi diri sebagai Masyarakat Adat, dan pengetahuan lokal oleh mereka yang tidak. Pengetahuan adat dan pengetahuan lokal mencakup praktik untuk memelihara dan meningkatkan lingkungan—tanah, perairan, flora, dan fauna—dan merupakan bagian integral dari budaya dan mata pencaharian masyarakat.[165-167] Dalam pandangan dunia ini, budaya berbaur dengan wilayah dan sistem sosial-ekologis dan bukan terpisah seperti yang sering terlihat dalam kerangka jasa ekosistem, dan Pengetahuan Adat dan pengetahuan lokal menginformasikan pengelolaan sumber daya alam. Sebagai contoh, mereka sering mempertimbangkan populasi, habitat, dan lanskap untuk pemanenan dan pemeliharaan spesies yang dapat menghasilkan populasi yang berkelanjutan dan sumber daya yang memadai yang tersedia untuk penggunaan lokal (misalnya, untuk obat-obatan, makanan, keranjang, kano, dll.).[167-168] Pengetahuan Adat mencakup konsep rasa hormat, timbal balik, dan tindakan meminta izin, yang semuanya diperluas ke non-manusia dan diturunkan dari generasi ke generasi.[168,160]

Pengetahuan tentang bagaimana menjaga tempat dan sumber daya alam telah mengakibatkan terjadinya perubahan distribusi dan kelimpahan sumber daya yang telah menyebabkan banyak ilmuwan keanekaragaman hayati menemukan di lanskap yang dikelola masyarakat adat. [169] Bentang alam ini bukanlah tempat yang tak tersentuh melainkan dikelola secara aktif melalui aturan, cerita, dan adat istiadat yang berlimpahan. [169] Misalnya, di antara suku Tlingit di Alaska, ada adalah aturan seputar akses ke lokasi penangkaran anjing laut sensitif yang mendorong populasi sehat dari waktu ke waktu.[160] Di Kenya, perempuan dalam komunitas penggembala telah memiliki pengetahuan ekologi yang luas terkait dengan perawatan setiap kehidupan bentuk, sangat menyadari saling ketergantungan antara roh dan bumi, yang diturunkan dari generasi ke generasi.[170]

Bagi Masyarakat Adat, bahasa asli memiliki kaitan yang erat dengan pengetahuan dan wilayah. Hal ini memerlukan diskusi lebih lanjut, dikarenakan adanya karakteristik yang melekat pada banyak bahasa Pribumi yang tidak mudah dikenali oleh penutur non-pribumi dan yang terkait dengan pengelolaan lingkungan dan hubungan dengan sistem alami Bumi. Dengan melaksanakan dan mengontekstualisasikan Pengetahuan Pribumi dan menanamkan pandangan dunia tentang rasa hormat dan integrasi dengan alam, bahasa Pribumi, bersama dengan budaya, mendorong dan memungkinkan pengelolaan lingkungan. Bahasa pribumi melakukannya dengan cara-cara berikut:

- Pengetahuan Pribumi atau saling timbal balik yang tertanam dalam nama-nama spesies, sumber daya alam, tempat, dan sistem klasifikasi sejarah lisan,
- Konsep penatagunaan atau pengelolaan sumber daya alam (penanganan) yang tidak memiliki terjemahan langsung dalam bahasa lain,
- Struktur linguistik yang membangun hubungan timbal balik, integrasi, keseimbangan, dan rasa hormat terhadap alam, secara luas dari lensa non-hierarkis,
- Bahasa berbasis wilayah yang menghubungkan orang-orang dengan lingkungan mereka dan tanggung jawab yang menyertainya, dan
- Tradisi yang disampaikan secara lisan, cerita, sejarah, dan apa yang oleh banyak budaya disebut sebagai “instruksi asli” yang mengandung Pengetahuan Pribumi serta etika dan moral lingkungan.[171]

Pengetahuan dan kekuatan untuk mendefinisikan apa yang dianggap sebagai pengetahuan nyata terletak pada inti epistemik kolonialisme.[171] Di organisasi konservasi, sains adalah dasar dari pekerjaan konservasi kami, dan selama bertahun-tahun, cara berpikir ilmiah dari Barat telah memandu sebagian besar upaya yang dilakukan. Namun baik secara organisasi maupun individu, kami mengakui dan menerima bahwa ada banyak cara untuk mengetahui dan memahami dunia alami dan bahwa pendekatan semacam itu harus terus disebarluaskan dan diterapkan oleh budaya di seluruh dunia, seperti yang telah mereka lakukan selama ribuan tahun. Karena Masyarakat Adat telah merawat tanah dan perairan mereka selama ribuan tahun, Pengetahuan Adat menawarkan informasi yang sangat kaya tentang wilayah-wilayah dalam skala granular yang detal, dan seringkali dalam jangka waktu yang lama. Oleh karena itu, badan-badan ilmu pengetahuan internasional menyerukan dimasukkannya Pengetahuan Pribumi sebagai pelengkap penting bagi informasi ilmiah dari Barat. Meskipun ini benar, hal itu juga tidak lengkap. Pengetahuan Pribumi bukanlah data yang dapat digali dan dimasukkan ke dalam kerangka ilmu pengetahuan Barat. Pengetahuan Adat menawarkan pelajaran tentang bagaimana hidup dengan cara-cara yang bermoral dan berkelanjutan. Hal tersebut menawarkan kerangka pengetahuan dan analisis dan tidak dapat dipisahkan dari wilayah, orang, dan hubungan antar mereka. Pengetahuan Adat mengintegrasikan pengetahuan empiris yang terperinci, praktik material, tanggung jawab etis dan spiritual, dan nilai-nilai Pribumi tentang kekerabatan dan tanggung jawab bersama.[173] Selanjutnya, Pengetahuan Adat tidak dapat dipisahkan dari wilayahnya dan hubungan antara semua makhluk di tempat itu.

Masyarakat Adat itu bersifat kompleks. Isu berbagi Pengetahuan Adat terjadi pada antarmuka di aspek-aspek penting dari kompleksitas ini. Pemegang Pengetahuan Pribumi bukanlah hanya mereka yang memiliki pengetahuan dasar atau sejenis kesadaran akademis atau pendidikan akan sistem pengetahuan yang telah dipandu oleh komunitas mereka selama ribuan tahun. Pemegang Pengetahuan Adat mengidentifikasi diri mereka dengan menggunakan konsep-konsep mereka sendiri. Terdapat struktur pemerintahan tradisional yang ada sebelum pemerintah Suku saat ini yang dapat mengatur kedaulatan atas pengetahuan, bagaimana pengetahuan dibagikan, dan siapa pemegang pengetahuan tradisional.

Bekerja dengan mitra Pribumi untuk menjalin Pengetahuan Adat dan pendekatan Barat terhadap konservasi membutuhkan waktu, rasa hormat, dan pemahaman yang mendalam tentang tantangan dan risiko yang dapat dihadirkan oleh pekerjaan ini. Dikarenakan Pengetahuan Adat berjalan di suatu wilayah dan hubungan Masyarakat Adat dengan wilayah tersebut, kita harus mulai dengan melibatkan Penduduk Asli di tempat kita bekerja dan menghormati kecerdasan geografis dan kearifan berbasis wilayah mereka. Kita perlu memahami bahwa beberapa pengetahuan tidak pantas untuk dibagikan. Standar yang baik adalah yang mengasumsikan bahwa semua informasi bersifat rahasia dan selanjutnya mungkin tidak sesuai atau tidak pantas untuk ditempatkan sebagai 'titik data' ke dalam kerangka kerja, metode, atau cara berpikir Barat. Kami tidak dapat berasumsi bahwa kami dapat menyimpan informasi proyek dengan mitra di basis data kami atau membuat informasi ini tersedia untuk umum. Perhatian dan kepekaan khusus diperlukan melalui pemetaan GIS dan penggunaan teknologi lainnya di mana terdapat keamanan cyber dan risiko lainnya. Dengan demikian, beberapa Masyarakat Adat akan menyambut baik kesempatan untuk membagikan nama-nama asli tanaman dan tempat untuk mengembalikan identitas Pribumi ke tanah air mereka dan untuk menjaga pengetahuan itu tetap aktif dan dapat diarsipkan. Kita harus berharap untuk melibatkan pemegang pengetahuan secara berkelanjutan dan bermakna dalam mengembangkan pertanyaan, penelitian, dan rencana pengelolaan.

Memperkuat dan Mempertahankan Koneksi dengan Pengetahuan dan Wilayah

> Lihat **"Alat 15: Memetakan Nilai Budaya"** sebagai panduan dalam memasukkan nilai-nilai sosial, budaya, dan keanekaragaman hayati ke dalam pemetaan dan perencanaan spasial.

> Lihat **"Alat 16: Perjanjian Intellectual Property"** untuk templat perjanjian kekayaan intelektual yang dapat disesuaikan untuk digunakan dengan mitra masyarakat adat dan local.

> Lihat **"Alat 17: Transfer Pengetahuan Lintas Generasi dan Keterlibatan Generasi Muda"** sebagai perangkat yang dirancang untuk membantu mendukung dan memperkuat program pendidikan berbasis lahan dan air untuk pemuda Pribumi.

Koneksi terhadap wilayah bukanlah keadaan statis, melainkan sesuatu yang terus berubah dan berkembang. Dalam beberapa ratus tahun terakhir, telah terjadi perubahan besar pada hubungan manusia dengan wilayah. Dalam beberapa kasus, keterpurukan Koneksi ke Pengetahuan dan Wilayah adalah akibat dari kolonisasi, relokasi paksa dan kekerasan, perumahan pesantren, dan penyebaran agama monoteistik—dalam kasus lain, karena lambatnya proses globalisasi, kapitalisme, perubahan iklim, dan kurangnya kesempatan yang ada.[137,144,174-175] Hal ini telah berdampak tidak hanya pada Koneksi ke Pengetahuan dan Wilayah, tetapi juga kepemilikan kepastian terkait, struktur pemerintahan tradisional, dan keseluruhan kesejahteraan manusia.[160]

Jika kita berniat memiliki sejarah sebagai organisasi konservasi, kita juga harus mengakui dan memeriksa bagaimana konservasi telah berkontribusi pada keterputusan ini. Gerakan konservasi telah menggantikan cara-cara Pribumi melalui pemindahan paksa atas nama perlindungan, memblokir akses budaya atau penggunaan sumber daya alam, dan dengan mengabaikan dan menekan cara-cara masyarakat adat untuk mengetahui sambil mempertahankan ilmu pengetahuan Barat Eropa-Amerika.[176-177] Konservasi secara historis menciptakan rasa eksklusi daripada milik bersama ("konservasi pertahanan"), yang memisahkan manusia dari alam.[178] Pendekatan yang diuraikan dalam Kerangka SPA memberikan alternatif yang membantu membangun kembali dan/atau mempertahankan Koneksi ke Pengetahuan dan Wilayah. Kami berkomitmen untuk mengakui dan mengangkat peran Masyarakat Adat dan masyarakat lokal sebagai pendukung, mengakui bahwa kesetaraan, kepemimpinan dan kekuasaan masyarakat adat dan lokal, hak yang terjamin, pengetahuan lokal, dan tata kelola tradisional sangat penting untuk kesejahteraan dan tujuan lingkungan bersama.

Beberapa cara yang kami berusaha untuk memantapkan, memperkuat, dan menghidupkan kembali Koneksi ke Pengetahuan dan Wilayah termasuk secara akurat mewakili nilai-nilai budaya dalam pemetaan dan perencanaan spasial, meningkatkan akses, penggunaan, dan perlindungan tempat-tempat keramat masyarakat adat dan lokal, membina transfer pengetahuan dan bahasa antargenerasi, dan pendidikan pemuda. Hal ini dan contoh tindakan lain yang dapat diambil dapat ditemukan pada Tabel 7.

Kedaulatan data yang terkait dengan Masyarakat Adat adalah hak mereka untuk memelihara, menguasai, melindungi, dan mengembangkan warisan budaya, pengetahuan, dan ekspresi budaya tradisional mereka, serta hak mereka untuk memelihara, menguasai, melindungi, dan mengembangkan kekayaan intelektual mereka atas hal-hal tersebut.[133] Saat menanyakan tentang dan mendukung koneksi ke wilayah, dan menanamkan pengetahuan masyarakat adat atau lokal, penting untuk diingat bahwa banyak dari informasi ini adalah kekayaan intelektual yang sensitif—hal yang orang-orang mungkin tidak nyaman berbagi, dan non-anggota komunitas mungkin tidak memiliki hak untuk mengetahui informasi ini. Perhatian harus diberikan untuk menghormati dan melindungi kekayaan intelektual dan kedaulatan data masyarakat adat dan lokal. Ini termasuk pengembangan bersama dari perjanjian kekayaan intelektual, menghormati hak Masyarakat Adat dan masyarakat lokal untuk tidak berbagi informasi yang tidak ingin mereka bagikan, dan memprioritaskan tujuan dari keberadaan dan penggunaan yang berkelanjutan dari Pengetahuan Adat dan pengetahuan lokal oleh Masyarakat Adat dan komunitas lokal untuk melestarikan dan memajukan budaya dan kesejahteraan mereka sendiri. Hal ini juga termasuk selalu meminta izin dan persetujuan serta tinjauan dari komunitas sebelum mengkomunikasikan cerita bersama tentang pekerjaan yang dilakukan bersama, dan menghormati keinginan komunitas jika mereka tidak ingin cerita tersebut diceritakan (atau tidak ingin organisasi konservasi menceritakannya).

© AMI VITALE

Tabel 7: *Contoh kegiatan untuk mendukung Koneksi ke Pengetahuan dan Wilayah.*

Pendekatan	Contoh kegiatan
Meningkatkan akses dan penggunaan tanah, air, dan sumber daya	Memfasilitasi tindakan repatriasi atau persetujuan akses dan penggunaan untuk tanah-tanah yang memiliki nilai budaya pribadi atau publik; mendukung pendekatan berbasis masyarakat untuk melindungi tempat dan spesies biokultural yang penting
Memfasilitasi pendidikan, pelatihan, dan pertukaran pembelajaran berbasis tempat,	Mendukung penyegaran kembali pengelolaan lahan dan perairan tradisional (misalnya, kebakaran tradisional, pengelolaan perikanan) dan keterampilan (misalnya, pembuatan kapal); menegakkan sistem tata kelola sumber daya alam tradisional; memfasilitasi pertukaran pembelajaran lintas komunitas dan menjalin komunitas yang menitiberatkan pada praktik
Mendokumentasikan Kearifan Pribumi dan Kearifan Lokal	Mendokumentasikan bahasa Pribumi; mendokumentasikan cerita; memanfaatkan multi-media dan teknologi lainnya untuk menarik para pemuda dan generasi mendatang untuk berinvestasi dalam pembelajaran, pengetahuan (misalnya, kalender musiman, nama tempat dan spesies), dan sejarah mereka sendiri;[j] menganggap sejarah lisan sebagai sumber utama sumber pengetahuan, jika/bila diperlukan dengan atribusi kolektif (kolektif vs. individu) kepada pemegang pengetahuan dan sumber pengetahuan
Mendukung transfer pengetahuan antargenerasi	Mengedepankan kamp budaya untuk pemuda; mendukung akses ke bahasa asli; memfasilitasi hubungan pemuda/sesepuh di darat dan perairan; mendukung revitalisasi praktik budaya dan upacara
Jalinan Pengetahuan Pribumi, kearifan lokal, dan ilmu pengetahuan Barat	Penerapan pengunaan bahasa asli dalam konsep, spesies dan nama tempat dalam perencanaan dan kebijakan; memfasilitasi penyertaan nilai-nilai budaya dalam pemetaan dan perencanaan spasial;[k] mengangkat Pengetahuan Adat dan pengetahuan lokal sebagai bentuk bukti kritis dalam kemitraan dengan universitas dan lembaga penelitian
Meningkatkan rasa hormat dan pengakuan terhadap cara masyarakat adat dan lokal mengetahui, menjadi, dan melakukan	Memfasilitasi pertukaran dengan lembaga pemerintah dan ilmuwan Barat untuk meningkatkan cara masyarakat adat mengetahui, pengelolaan sumber daya, dan tata kelola serta mendorong kolaborasi yang saling menghormati dan efektif; mendukung partisipasi masyarakat adat dan lokal dalam forum kebijakan untuk berbagi cara mengetahui; mengkodifikasi hukum adat dan budaya masyarakat lokal ke dalam hukum kontemporer

j. Catatan, dokumentasi adalah oleh dan untuk Masyarakat Adat dan komunitas lokal untuk melestarikan budaya dan sejarah mereka. Penghormatan terhadap Bentuk kepemilikan intelektual dan kedaulatan data melalui pendekatan dan proses yang tepat adalah suatu keharusan.k.

k. Juga penting untuk mengamankan hak atas tanah, air, dan sumber daya, karena pemetaan dan perencanaan merupakan langkah penting dalam prosesnya. Penghormatan atas kekayaan intelektual dan kedaulatan data melalui pendekatan dan proses yang tepat adalah suatu keharusan.

Studi Kasus

Koneksi ke Pengetahuan dan Wilayah di Mongolia

Mongolia didominasi oleh ekosistem padang rumput yang luas yang masih jarang penduduknya hingga hari ini. Penduduk Mongolia secara etnis bersifat homogen, dengan beberapa perbedaan budaya atau gaya hidup berdasarkan ekosistem, seperti padang rumput, gunung, atau hutan. Terdapat budaya, gaya hidup, dan praktik tradisional yang kuat terkait dengan padang rumput dan ternak. Penggembala bersifat nomaden, tinggal dan merumput di daerah yang berbeda tergantung pada musim/waktu dalam setahun.

Unsur penting dari budaya Mongolia adalah rasa hormat dan timbal balik terhadap alam dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai bagian dari hal ini, banyak orang memiliki rasa motivasi yang kuat berkenaan dengan lanskap, dan mereka mempraktikkan ritual terkait.

> "Dalam budaya tradisional kita, jika seseorang menghormati alam, alam akan membalas dengan kesuksesan dan keberuntungan. Sehingga, upacara dan kehidupan sehari-hari berhubungan dengan konsep-konsep ini. Orang Mongolia selalu percaya bahwa tanah dan sumber daya bukan milik mereka, itu milik para roh. Sejak abad ke-13, mereka percaya pada Tengri, makhluk surgawi... suatu kepercayaan utama adalah bahwa kami memiliki roh itu di setiap gunung dan sungai dan sumber daya ini adalah miliknya bukan milik para penggembala. Anda harus bersikap sopan ketika meminta roh untuk menggunakan fitur yang berguna seperti air dan rumput dan hewan dan para penggembala melakukannya dengan melakukan upacara pemujaan. Sehingga, di setiap komunitas, ada tempat khusus di mana orang pergi dan beribadah. Budaya tersebut adalah salah satu fondasi penting dari perspektif orang Mongolia tentang alam."
>
> *-Gankhuyag Balbar tentang budaya dan spiritualitas Mongolia*

Budaya masyarakat telah dipengaruhi oleh perubahan politik dan ekonomi yang telah berlangsung selama berabad-abad, yang terakhir yang berkenaan undang-undang sumber daya alam. Selama tiga dekade terakhir, Mongolia telah mengalami transisi yang cepat dari ekonomi dengan rencana terpusat dan banyak disubsidi, ke demokrasi dengan pasar yang semakin bebas. Pasca 1990-an, masyarakat dan politik Mongolia berubah dengan munculnya sektor pertambangan, pertanian, konstruksi, dan pariwisata, yang menyebabkan lebih banyak bentuk kepemilikan dan ekonomi individual. Hal ini mewakili pergeseran budaya baru, karena sebelumnya tidak ada gagasan tentang "kepemilikan tanah pribadi" di Mongolia—karena semuanya adalah milik bersama.

Terlepas dari perubahan ini, cara nomaden dalam mentransfer pengetahuan lokal terus berlanjut di dalam dan di antara keluarga. Transfer pengetahuan, kepercayaan dan rasa hormat terhadap alam dipertahankan melalui cerita, lagu, puisi epik, dan melalui keterampilan tradisional mereka dan praktik berburu dan menggembala.

KETERANGAN GAMBAR
Bioma Kerangka VCA

TERESTRIAL **AIR TAWAR** **PESISIR**

> "Orang tua mengajari anak-anak mereka secara praktik... pada usia tiga hingga lima tahun, membuat anak-anak Anda menunggang kuda adalah hal yang luar biasa. Orang tua sangat senang... begitu Anda mulai menunggang kuda, itu berarti Anda akan membantu orang tua Anda memelihara ternak. Mereka mengajari mereka segalanya. Mereka mengajarkan tentang tumbuhan, tumbuhan apa yang baik untuk hewan dan tumbuhan apa yang buruk. Kakek-nenek dan nenek adalah guru terbaik karena mereka memiliki pengetahuan, dan sangatlah penting bagi mereka untuk mentransfer pengetahuan itu kepada anak-anak mereka sehingga mereka dapat menjadi penggembala yang sukses."
>
> *-Gala Davaa tentang transfer pengetahuan antargenerasi*

Pada tahun 2012, parlemen Mongolia menyetujui undang-undang untuk pengelolaan sumber daya alam berbasis masyarakat berdasarkan hak kolektif. Sebagian besar pekerjaan awal TNC dengan masyarakat berpusat pada peningkatan kesadaran tentang hak-hak ini dan bagaimana menerapkannya. Melalui bekerja sama, para penggembala membentuk kontrak pengelolaan sumber daya alam berbasis masyarakat dan organisasi berbasis masyarakat (CBO). Pembentukan CBO memfasilitasi proses membangun kepercayaan, saling menghormati, kerja sama dan tindakan kolektif, dan persatuan di antara orang-orang yang secara historis telah hidup sangat mandiri, terbentang jauh melintasi lanskap yang luas.

Pelatihan dan perencanaan pengelolaan sumber daya alam berbasis masyarakat memberikan masyarakat tradisional Mongolia jalan untuk meningkatkan pengetahuan mereka akan sistem modern untuk mempertahankan ikatan dengan tanah dan cara hidup mereka. Dengan demikian, hubungan dengan wilayah dan kelanjutan budaya ini berada di garis depan konservasi berbasis masyarakat di Mongolia.

Kontribusi dan kutipan oleh staf TNC Mongolia Gankhuyag Balbar dan Gala Davaa

Pengetahuan Adat di Alaska

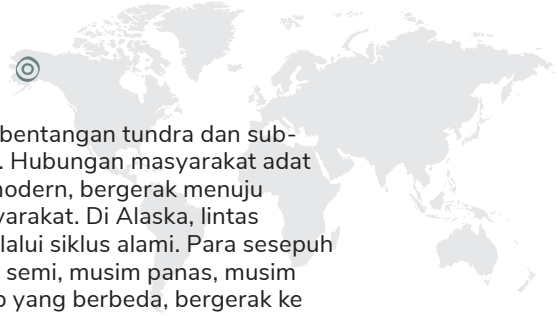

Hubungan orang-orang dengan tempatnya di Alaska diwakili dari bentangan tundra dan sub-arktik, hingga hutan hujan tropis pegunungan di sebelah tenggara. Hubungan masyarakat adat dengan wilayah, budaya dan pengetahuannya bersifat kuno dan modern, bergerak menuju masa depan pengelolaan tanah dan perairan yang sehat oleh masyarakat. Di Alaska, lintas generasi selama ribuan tahun, koneksi ke wilayah ditransisikan melalui siklus alami. Para sesepuh menggambarkan gaya hidup nomaden dengan kamp untuk musim semi, musim panas, musim gugur dan musim dingin. Orang-orang akan mengikuti siklus hidup yang berbeda, bergerak ke tempat yang mereka butuhkan untuk menopang hidup diri mereka sendiri sesuai dengan hukum alam, adat istiadat, kepercayaan spiritual, dan sistem pengetahuan yang berkelanjutan. Mereka mudah beradaptasi, terus-menerus berada dalam siklus persiapan untuk musim berikutnya.

> "Berada dalam hubungan yang benar dengan wilayah Anda adalah hal yang utama. Sebanyak lahan merawat kita dan memberi kita rezeki, itu juga tanggung jawab kita untuk merawat lahan dan 'sumber daya'. Penatalayanan hanyalah praktik perawatan yang konstan dan dirawat oleh lanskap alam Anda. Hubungan simbiosis timbal balik itu terus berlanjut hingga hari ini dan ditransmisikan dari generasi ke generasi."
>
> *-Andrea Akall'eq Burgess (Yup'ik)*

Di seluruh Alaska, Masyarakat Adat menggunakan pengetahuan budaya dan tradisional untuk menunjukkan pengelolaan aktif untuk kesejahteraan makanan, dan mata pencaharian. Salah satu contohnya adalah seputar hubungan mereka dengan salmon, yang dianggap sebagai kerabat.

> "Pengetahuan adat memerintahkan Anda untuk tidak menangkap gelombang pertama ikan, Anda harus membiarkan denyut pertama itu sampai ke hulu dan kemudian Anda bisa memanennya... Sebuah pengakuan bahwa bahkan jika kita lapar akan ikan segar di denyut pertama, Anda harus membiarkannya berlalu, menghormati mereka yang merupakan spesies terkuat yang paling tangguh, yang tahu ke mana harus kembali, dan memastikan mereka mencapai hulu sehingga keturunan mereka dapat kembali masuk tahun-tahun mendatang dalam jumlah yang sehat."

Orang-orang Yup'ik pra-kolonial dikenal memiliki "jejak nol" untuk cara hidup mereka yang berkelanjutan, mengemasi kamp dan meninggalkan tanah sedemikian rupa sehingga tampak "tak tersentuh", mengetahui dari instruksi asli bahwa praktik ini akan memungkinkan burung yang bermigrasi dan spesies kunci lainnya kembali. Namun, perubahan yang dibawa oleh kolonisasi telah sangat menghancurkan.

> "Kami harus membuang banyak praktik kebiasaan kami, kami harus menutupi pengetahuan spiritual dan adat kami, kami harus menyembunyikannya sebelum benar-benar dikriminalisasi dan hilang. Mereka mengatakan bahwa sekarang waktunya lebih bebas karena sekarang sudah menjadi aman lagi, dan kaum muda kita menginginkan pengetahuan itu, untungnya hal itu muncul dan diterapkan lagi.
>
> "Gerakan pemulihan ada dimana-mana Anda tidak dapat berbicara tentang bahasa atau perlindungan lahan atau sejumlah hal lain tanpa pemulihan yang juga berjalan beriringan dan bagaimana orang mengkonseptualisasikan kebangkitan ini. Kami memiliki semboyan, Tsu Héidei shugaxhtootaan, yá yaa khusgédaakeit, haa jeex 'anakh has kawdak'eet'. Yaitu 'kita sekarang akan membuka kotak pengetahuan ini', dan hal tersebut adalah ungkapan yang direkam oleh seorang sesepuh yang diucapkan dari generasi ke generasi. Bergema sampai ke bawah."
>
> *-Crystal Nelson (Tlingit)*

Hal ini adalah keinginan yang datang dari para pemuda adat itu sendiri dan sistem menjadi lebih menerima, para sesepuh tahu bahwa menyembuhkan lahan dan menyembuhkan orang-orang berjalan beriringan. Jelas bahwa bersatu, menyembuhkan lahan, air, dan masyarakat adalah tentang membuka dan mengingat praktik kebiasaan budaya dan cara mengetahui. Gerakan ini muncul dari pemuda Pribumi yang mencari transmisi Pengetahuan Adat, nilai-nilai, praktik, dan prinsip-prinsip kepengurusan yang lebih antargenerasi dan budaya.

Alat dan Sumber Daya

ALAT 15: MANUAL—MEMETAKAN NILAI BUDAYA

Kerangka kerja Development by Design (DbD) dari TNC mempertimbangkan nilai masyarakat—termasuk nilai keanekaragaman hayati, budaya, dan sosial-ekonomi—dalam proses penilaian dampak untuk proposal pembangunan. DbD memberikan pandangan menyeluruh tentang bagaimana pengembangan di masa depan dapat memengaruhi nilai-nilai ini dan menawarkan solusi untuk pengambilan keputusan yang tepat. DbD menggunakan alat pemetaan Sistem Informasi Geografis (SIG) untuk menilai dan menunjukkan kemungkinan dampak pada nilai-nilai yang ditentukan masyarakat ini. DbD mendukung konsep Persetujuan Bebas, Didahulukan, dan Diinformasikan dan memberikan kesempatan kepada para kelompok untuk berpartisipasi penuh dalam proses pengambilan keputusan pembangunan. Manual ini ditulis berdasarkan pengalaman pemetaan nilai-nilai budaya di Australia, tetapi dapat diterapkan di tempat lain.

ALAT 16: TEMPLAT—PERJANJIAN INTELECTUAL PROPERTY

Proses untuk memperkuat Koneksi ke Pengetahuan dan Wilayah harus didukung oleh keterlibatan yang saling menghormati, cerita lokal, dan terbukti. Saat bermitra dengan Masyarakat Adat, kita harus menghormati informasi tentang masyarakat, pengetahuan mereka, dan wilayah mereka. Mereka yang bekerja di bidang ini yang ingin mempublikasikan informasi atau data apapun harus mengikuti protokol yang sesuai dalam menetapkan Persetujuan dengan Informasi Bebas, Diinformasikan di Awal sebelum mempublikasikan tentang Penduduk Asli atau tempat mereka. Untuk menghormati Bentuk kepemilikan dan kedaulatan data masyarakat adat dan komunitas lokal, TNC telah mengembangkan templat perjanjian berbagi data dan informasi yang dapat disesuaikan dengan konteks.

Templat ini juga tersedia dalam bahasa Spanyol, Portugis, dan Indonesia.

ALAT 17: PERANGKAT—TRANSFER ANTARGENERASI PENGETAHUAN DAN KETERLIBATAN PEMUDA

Perangkat pendukung Emerging Aboriginal Stewards (SEAS) dikembangkan oleh Nature United[179] bekerja sama dengan mitra masyarakat untuk membantu mendukung dan memperkuat lahan dan program pendidikan berbasis air untuk pemuda Pribumi. Itu dibuat untuk memberikan ide, saran, dan panduan kepada siapa pun yang bekerja untuk mengembangkan dan menyampaikan program semacam ini. Perangkat ini ditujukan bagi siapa saja yang tertarik untuk memulai atau memperkuat program pendidikan berbasis lahan dan air untuk pemuda adat. Perangkat ini disusun ke dalam enam bab, yang masing-masing menjawab pertanyaan penting tentang bagaimana merancang, mengimplementasikan, dan memperkuat program semacam itu dari waktu ke waktu.

Informasi lebih lanjut dapat diperoleh dengan mengunjungi **situs SEAS**.

Unsur Dasar 3

Hasil yang lestari untuk Masyarakat dan Alam

Pengetahuan, Bukti, Dan Praktek

POIN-POIN PENTING

- Pendanaan konservasi—yang biasanya mencakup kombinasi instrumen keuangan—diperlukan selain peluang mata pencaharian yang berkelanjutan untuk menjaga keberlanjutan keuangan jangka panjang dari konservasi yang dipimpin oleh masyarakat.

- Fitur pendukung utama dari solusi pembiayaan konservasi yang sukses adalah investasi berkelanjutan dalam pembangunan kapasitas jangka panjang untuk organisasi masyarakat adat dan lokal; Kepemilikan dan kepemimpinan masyarakat adat dan lokal dalam upaya pembiayaan konservasi; kejelasan kepemilikan; dukungan politik; upaya penggalangan dana yang sedang berlangsung; diversifikasi sumber pembiayaan; peran dan tanggung jawab yang terdistribusi dengan jelas dalam strategi pembiayaan; kemitraan sektor swasta untuk solusi berbasis perusahaan; dan pendanaan yang fleksibel untuk menanggapi peluang baru.

- Kemitraan dalam pembiayaan lokal hingga global yang berhasil umumnya melibatkan hubungan yang kuat dengan prioritas masyarakat adat dan lokal, kesadaran kontekstual yang kuat dalam pemberian hibah, kemitraan yang kuat dengan organisasi masyarakat adat dan lokal yang melaksanakan proyek, dan kemampuan untuk meningkatkan kondisi pendukung politik untuk proyek yang sulit. Perantara LSM sering memainkan peran kemitraan yang penting dalam proses ini.

- Pergeseran kebijakan di tingkat lokal, regional, dan/atau nasional seringkali diperlukan untuk menyediakan kondisi dan jalan yang memungkinkan bagi Masyarakat Adat dan komunitas lokal untuk meresmikan hak mereka atas lahan, air, dan sumber daya, mengkodifikasi otoritas mereka dalam pengambilan keputusan sumber daya alam, dan berpartisipasi dalam peluang mata pencaharian berkelanjutan tertentu.

- Tingkat dan pola penyebaran biasanya bergantung pada karakteristik praktik pengelolaan sumber daya alam, masyarakat itu sendiri, dan konteksnya. Mendukung jaringan komunitas dan pertukaran pembelajaran antar komunitas adalah cara yang penting dimana organisasi konservasi dapat menggunakan keterampilan berkumpul mereka untuk mendorong penyebaran konservasi dan praktik yang dipimpin oleh masyarakat.

ISTILAH UTAMA

Pendanaan Konservasi—mekanisme dan strategi yang menghasilkan, mengelola, dan menyebarkan sumber daya keuangan dan menyelaraskan insentif untuk mencapai hasil konservasi alam.[98] Konservasi keuangan ditujukan untuk mendanai dengan biaya penuh konservasi dan mempertahankan keberlanjutan keuangan jangka panjang.[180]

Difusi—proses di mana adopsi yang terjadi sebelumnya dari suatu praktik dalam suatu populasi mengubah kemungkinan serapan untuk orang lain.[181]

Berkelanjutan—kemungkinan hasil positif bagi manusia dan alam yang dicapai melalui inisiatif konservasi yang dipimpin masyarakat untuk bertahan sepanjang waktu. Komponen utama dalam keberlanjutan mencakup pendanaan konservasi jangka panjang, lingkungan kebijakan yang mendukung, dan difusi/skalabilitas inisiatif.

Perluasan—kecepatan, pola adopsi, dan penyebaran kebijakan, program, proyek, dan praktik konservasi yang dipimpin masyarakat.[182] Dapat mencakup pertumbuhan praktik di satu tempat dan replikasi praktik ke tempat lain.

Keberlanjutan inisiatif konservasi yang dipimpin oleh masyarakat mengacu pada kemungkinan bahwa hasil positif bagi manusia dan alam yang dicapai akan bertahan dari waktu ke waktu. Keberlanjutan berinteraksi dengan empat pilar Kerangka VCA dengan menyediakan fondasi yang kuat dan lingkungan yang mendukung untuk hasil yang langgeng—begitu pula, pilar Kerangka Kerja VCA diperlukan untuk mencapai aspek daya tahan itu sendiri. Komponen utama dari keberlanjutan termasuk pendanaan konservasi jangka panjang, lingkungan kebijakan yang mendukung, dan difusi/skalabilitas inisiatif.

Keuangan Konservasi

See "Alat 18: Panduan Keuangan Konservasi" untuk panduan dalam mendukung pengcakupan, perencanaan, dan pengembangan solusi pendanaan konservasi.

Pendanaan konservasi adalah suatu praktik menghasilkan, mengelola, dan menyebarkan sumber daya keuangan dan menyelaraskan insentif untuk mencapai hasil konservasi, dan ditujukan untuk mendanai biaya penuh konservasi—yang biasanya tidak sepenuhnya tercakup oleh inisiatif mata pencaharian berkelanjutan—dan mempertahankan keuangan jangka panjang keberlanjutan. Peluang mata pencaharian berkelanjutan dan pendanaan konservasi bekerja secara sinergis untuk mendukung hasil ganda bagi manusia dan alam. Peluang mata pencaharian yang berkelanjutan memberikan orang pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pribadi dan rumah tangga mereka, yang memungkinkan orang untuk menjalani kehidupan yang terjamin dan bermartabat, mendorong pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, dan mengurangi tekanan pembangunan yang tidak berkelanjutan. Pendanaan konservasi menciptakan aliran pendanaan jangka panjang bagi masyarakat untuk membayar pengelolaan lahan, air, dan sumber daya mereka berdasarkan visi mereka sendiri tentang penatagunaan dan pengelolaan sumber daya alam.

Dalam kebanyakan situasi, kombinasi instrumen keuangan dimanfaatkan (misalnya, insentif pasar, biaya, pajak, subsidi, pendanaan publik dan swasta, investasi/obligasi) dan pembiayaan ini disalurkan melalui hibah, pembayaran berbasis kinerja, dan keuangan

mikro. Sebuah laporan baru-baru ini menemukan fitur utama dari solusi pembiayaan konservasi yang berhasil yaitu upaya penggalangan dana yang berkelanjutan; diversifikasi sumber pembiayaan; peran dan tanggung jawab yang terdistribusi dengan jelas dalam strategi pembiayaan; kemitraan sektor swasta untuk solusi berbasis perusahaan; dan pendanaan yang fleksibel untuk menanggapi peluang baru.[180] Selanjutnya, laporan tersebut menyimpulkan bahwa keberhasilan inisiatif konservasi yang dipimpin oleh masyarakat adat dan lokal bergantung pada pembiayaan konservasi yang dirancang untuk memberdayakan Masyarakat Adat dan masyarakat lokal sebagai penatalayan, bukan hanya penerima manfaat, di mana "pengurusan" bukan hanya tanggung jawab pengelolaan sumber daya alam, tetapi dipahami mencakup kepemilikan, otoritas pengambilan keputusan, dan konservasi yang tertanam dalam tatanan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat secara penuh.

Pendanaan konservasi merupakan dasar bagi keberhasilan inisiatif jangka panjang untuk mengamankan hak, meningkatkan kapasitas, memperkuat partisipasi dalam dialog dan pengambilan keputusan, dan mendukung peluang mata pencaharian yang berkelanjutan—sama seperti pilar-pilar Kerangka Kerja VCA ini sangat penting untuk mengamankan dan memelihara pendanaan konservasi. Misalnya, tidak hanya keuangan konservasi yang penting untuk mengamankan hak (misalnya, dengan memungkinkan penciptaan kawasan lindung Adat) tetapi hak yang terjamin sering juga menjadi persyaratan untuk mengakses keuangan seperti pinjaman bank. Labih jauh lagi, pendanaan jangka panjang dapat memungkinkan kemampuan untuk melindungi lahan dan perairan masyarakat dari pihak luar dan mendukung pengalihan pengelolaan kepada masyarakat. Ini adalah kasus dengan PerjanjianHutan Hujan Great Bear, yang, dipicu oleh advokasi yang dipimpin oleh First Nation selama bertahun-tahun, yang menetapkan area yang luas dengan nilai ekologis tinggi di pantai Pasifik Kanada untuk perlindungan dan pengelolaan berbasis ekosistem. Melalui kesepakatan ini, First Nations memiliki peran yang kuat dalam pemerintahan, pengambilan keputusan, dan manajemen. Untuk mewujudkan perjanjian ini diperlukan komitmen keuangan yang signifikan, yang dijamin melalui perjanjian pembiayaan konservasi yang disebut **"Coast Funds."** Dana perwalian yang diberikan ini akan mempertahankan dukungan jangka panjang untuk upaya konservasi, dan termasuk dana untuk mendukung perusahaan yang berkelanjutan. Hasil signifikan dari kesepakatan ini termasuk pengakuan formal dan fungsional atas peran masyarakat sebagai pemilik dan pengelola sumber daya kawasan.

Agar pembiayaan konservasi berhasil dalam konteks konservasi yang dipimpin masyarakat, diperlukan kapasitas jangka panjang dari masyarakat dan lembaga lokal untuk mengambil peran kepemimpinan dalam menghasilkan, mengelola, dan mendistribusikan pembiayaan. Kapasitas diperlukan sehubungan dengan pengelolaan hubungan internal dan hubungan dengan pihak luar; pengelolaan lahan dan sumber daya; kemampuan dan kenyamanan dalam berinteraksi dengan budaya bisnis dan proses pemerintahan; dan pengelolaan keuangan tanpa mengorbankan nilai.[180] Proses mendapatkan pendanaan konservasi sering kali melibatkan dukungan masyarakat dalam mengembangkan rencana penggunaan sumber daya dan masyarakat mereka sendiri, yang mengarah pada kepemimpinan dan pengambilan keputusan yang lebih besar otoritas atas bagaimana sumber daya digunakan dan dialokasikan. Donor dan LSM perantara harus memprioritaskan dukungannya untuk pengembangan kapasitas tersebut. Banyak mekanisme pendanaan konservasi yang secara eksplisit mengintegrasikan pendanaan untuk mendukung tata kelola dan pengembangan kapasitas. Misalnya, dana federal tersedia untuk mendukung tata kelola dan pengembangan kapasitas bagi pemilik tradisional di kawasan lindung Pribumi Warddeken di Australia (dimiliki dan dikelola oleh **Perusahaan Warddeken Land Management Ltd.**). Lembaga dan struktur yang dibuat atau diperkuat sebagai bagian dari pengamanan pendanaan konservasi, pada akhirnya dapat terlibat dalam inisiatif lain (misalnya, kesehatan, mata pencaharian, pendidikan, resolusi konflik), memanfaatkan kapasitas yang ada dan yang dibangun dari waktu ke waktu dan memperkuat keseluruhan konteks yang memungkinkan untuk hasil yang sukses bagi manusia dan alam.[180]

Sebuah studi baru-baru ini menemukan bahwa aturan dan persyaratan donor adalah penghalang yang paling sering dikutip untuk organisasi masyarakat adat dan lokal untuk mengakses pendanaan secara efektif untuk formalisasi kepemilikan dan pengelolaan hutan.[183] Dalam banyak kasus, aturan dan persyaratan donor yang melarang secara khusus berkaitan dengan pengakuan hukum terhadap organisasi masyarakat adat dan lokal dan/atau ketentuan pengelolaan dan pelaporan proyek yang

intensif sumber daya. Banyak donor beralih ke organisasi perantara sebagai jembatan, dengan memanfaatkan kedudukan hukum mereka serta manajemen proyek dan kapasitas administratif untuk menengahi dana antara donor dan Masyarakat Adat dan masyarakat lokal. Misalnya, dalam menanggapi usaha dalam menyalurkan dana ke organisasi masyarakat adat dan lokal, Dana Amazon (Fundo Amazonia)[I] dalam beberapa kasus bermitra dengan lembaga perantara untuk memberikan kembali dana dan mendukung proyek dan persyaratan pelaporan lembaga besar seperti Bank Pembangunan Brasil, yang merupakan pengelola dana. Untuk mengatasi tantangan dalam penggelaran dana dan menjaga kepatuhan terhadap persyaratan donor, dana terkadang diarahkan melalui organisasi perantara lokal yang memenuhi persyaratan fidusia dan merupakan mitra terpercaya dari organisasi masyarakat adat dan komunitas lokal penerima. Organisasi-organisasi dengan koneksi akar rumput yang dalam, terutama yang memiliki kepemimpinan Pribumi atau pengalaman signifikan bekerja dengan komunitas lokal, ditemukan dalam pekerjaan ini sebagai yang paling responsif terhadap kebutuhan dan prioritas Pribumi dan komunitas lokal dan, pada gilirannya, untuk melayani lebih banyak perantara yang efektif untuk pembiayaan. [183]

Secara lebih luas, organisasi masyarakat adat dan lokal umumnya menganggap perantara LSM dan yayasan swasta lebih responsif terhadap prioritas mereka daripada donor lain, dan lebih baik dalam menyediakan pendanaan langsung. Keuntungan yang terkait dari berbagai perantara LSM termasuk kesadaran kontekstual yang kuat dalam hal pemberian hibah mereka, kemitraan yang kuat dengan organisasi masyarakat adat dan lokal yang melaksanakan proyek, dan kemampuan untuk meningkatkan kondisi pendukung politik untuk proyek yang sulit. Dalam beberapa kasus, perantara LSM telah meningkatkan keuntungan-keutungan ini melalui penyertaan perwakilan masyarakat adat dan lokal dalam pemerintahan atau badan penasihat mereka.[183] Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mendukung adaptasi donor terhadap proses dan persyaratan akuntabilitas untuk memungkinkan pendanaan yang lebih langsung bagi organisasi masyarakat adat dan lokal. Namun, keuntungan perantara LSM yang disebutkan di atas menunjukkan bahwa area penting untuk fokus, di samping peluang bagi donor untuk meningkatkan koordinasi dan penargetan dengan perantara tepercaya; mengurangi persyaratan birokrasi; menyesuaikan struktur mekanisme keuangan dengan konteks lokal; dan secara signifikan meningkatkan total pendanaan untuk konservasi yang dipimpin oleh masyarakat adat dan lokal.

Untuk solusi pembiayaan jangka panjang yang efektif, inisiatif yang awalnya diuntungkan dari keterlibatan kuat organisasi non-pemerintah (LSM) eksternal mengharuskan kapasitas lokal yang diperlukan sudah ada sebelum LSM keluar. Adalah penting bagi tata kelola dan kapasitas lokal untuk siap melanjutkan setelah kemitraan LSM berakhir untuk menghindari masyarakat mengalami gangguan yang merugikan dalam pengelolaan sumber daya alam dan aliran pembiayaan. Sebagai contoh, Northern Rangelands Trust—sebuah lembaga nonprofit yang mendukung kapasitas konservasi komunitas di Kenya utara—memulai program untuk “meluluskan” beberapa konservasi yang telah didukungnya selama 15 tahun, mengubah hubungan menjadi satu dengan otonomi konservasi yang lebih besar dan kemandirian, dan memberikan pelatihan tentang kepemimpinan dan kapasitas keuangan bagi konservasi untuk mengajukan permohonan pendanaan secara langsung. Investasi yang diperlukan untuk melakukan transisi, khususnya di daerah yang dimulai dengan kapasitas yang sangat terbatas, tidak boleh diremehkan.[180] Pertimbangan yang sama dibuat untuk pendanaan konservasi di sekitar bangunan kapasitas masyarakat untuk mengambil alih keuangan jangka panjang setelah LSM keluar berlaku untuk tata kelola sumber daya alam secara umum. Tujuannya adalah pada akhirnya transisi manajemen proyek ke masyarakat (jika belum terjadi), yang membutuhkan rencana suksesi kepemimpinan yang aktif dan sehat untuk mempertahankan kapasitas ketika mereka dalam transisi peran kepemimpinan.

I. Amazon Fund adalah mekanisme Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi (REDD+) yang dibuat untuk mengumpulkan untuk investasi dalam upaya mencegah, memantau, dan memerangi deforestasi, serta untuk mempromosikan pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan Amazon Brasil.

Kebijakan

Konservasi yang dipimpin masyarakat seringkali memerlukan penggabungan perubahan kebijakan dengan tindakan pengelolaan sumber daya alam jika perangkat hukum yang sesuai belum tersedia. [184] Dalam hal ini, pergeseran dalam kebijakan di tingkat lokal, regional, dan/atau nasional diperlukan untuk menyediakan kondisi yang memungkinkan bagi konservasi yang dipimpin oleh masyarakat—khususnya, bagi Masyarakat Adat dan komunitas lokal untuk meresmikan hak mereka atas wilayah, air, dan sumber daya, dan untuk mengkodifikasikan hak mereka atas tanah, air, dan sumber daya otoritas dalam pengambilan keputusan sumber daya alam. Kebijakan-kebijakan tersebut dapat mencakup pengakuan formal atas kedaulatan dan lembaga Adat oleh pemerintahan nasional, kebijakan yang mengakibatkan devolusi hak dan tanggung jawab pengelolaan kepada masyarakat, kebijakan yang menciptakan pengaturan pengelolaan bersama antara masyarakat dan pemerintah, dan kebijakan yang membentuk badan untuk partisipasi masyarakat adat dan lokal yang berarti dalam pengambilan keputusan pengelolaan sumber daya alam.

Sebagai contoh, di Brasil, Konstitusi negara tahun 1988 mengatur tahapan untuk pengakuan hak-hak yang berbeda dari penduduk Asli, serta mempromosikan penciptaan Lahan Adat dan Unit Konservasi.[185] Kebijakan Nasional mengenai Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Teritorial Tanah Adat (PNGATI) disahkan pada tahun 2012 dengan tujuan untuk memperkuat pengelolaan wilayah sehingga Masyarakat Adat dan organisasi perwakilannya dapat melestarikan, mempertahankan, mengelola, menggunakan, dan mengatur tanah mereka untuk mempertahankan nilai konservasi mereka dan mempromosikan kesejahteraan kolektif Masyarakat mereka. Melalui instrumen kebijakan ini, Rencana Pengelolaan Wilayah dan Lingkungan dikembangkan oleh Masyarakat Adat dan lembaga perwakilannya. Hal ini diselesaikan melalui proses partisipatif, multi- stakeholder yang memetakan dan membuat zona area relevansi lingkungan, sosial-budaya, dan produktif untuk Masyarakat Adat, berdasarkan pengetahuan mereka.

Dalam contoh lain, Undang-undang Konservasi dan Pengelolaan Satwa Liar tahun 2013 di Kenya menciptakan kerangka kerja yang secara hukum ditetapkan dan secara formal mempromosikan pembentukan konservasi—penggunaan lahan yang diakui menawarkan peningkatan hak lahan dan sumber daya kepada masyarakat dan akses ke insentif saat mereka terlibat dalam perlindungan satwa liar dan kegiatan berkelanjutan lainnya. praktik—menyediakan struktur hukum yang jelas untuk konservasi yang dipimpin masyarakat.[186] Hal ini bersamaan dengan pendirian Kenya Wildlife Conservancies Association, sebuah asosiasi baru yang mewakili konservasi dalam kebijakan-membuat di tingkat nasional. Undang-undang tersebut merupakan puncak dari lebih dari satu dekade upaya untuk mendapatkan undang-undang yang komprehensif dan mengkoordinasikan masukan dari organisasi lingkungan masyarakat sipil, dan sangat penting untuk menciptakan konteks yang menguntungkan bagi konservasi yang dipimpin masyarakat di Kenya. Dalam contoh Brasil dan Kenya, organisasi konservasi bekerja dalam kemitraan dengan Masyarakat Adat dan masyarakat lokal untuk mengadvokasi perubahan kebijakan yang diperlukan, serta untuk mendukung kepemimpinan masyarakat adat dan lokal dalam pelaksanaan kebijakan.

Sama halnya seperti lingkungan kebijakan yang memungkinkan diperlukan untuk mengamankan hak dan partisipasi dalam pengambilan keputusan, juga penting untuk banyak peluang mata pencaharian yang mungkin diinginkan masyarakat. Sistem pembayaran jasa lingkungan (PES)—dalam pasar karbon misalnya—mengharuskan Bentuk kepemilikan yang didefinisikan secara wajar dan permanen sebagai syarat masuk. Selain bentuk kepemilikan yang jelas, mekanisme PES yang dikelola publik memerlukan kerangka kerja legislatif dan peraturan yang relatif canggih untuk diterapkan. Mengaktifkan undang-undang untuk memungkinkan para pihak untuk melakukan transaksi dan kerangka hukum untuk menegakkan perjanjian merupakan prasyarat umum. Demikian pula, peluang mata pencaharian yang melibatkan pembiayaan pengguna yang memerlukan klaim ke suatu daerah untuk membebankan biaya kepada orang lain untuk penggunaan dan mungkin memerlukan undang-undang di tingkat lokal atau nasional, serta badan yang sah yang dapat mengumpulkan biaya dan mengelola dana. [180]

Praktisi konservasi yang bermitra dengan Masyarakat Adat dan komunitas lokal dalam tujuan kesejahteraan bersama dan lingkungan harus melakukan tinjauan rinci terhadap kebijakan lokal, Suku, regional, dan nasional dalam analisis situasi mereka selama proses

pengembangan strategi. Hal ini termasuk, namun tidak hanya terbatas pada, kebijakan yang mengakui kedaulatan Penduduk Pribumi dan hak-hak yang berbeda; menunjuk pengelolaan sumber daya dan yurisdiksi zonasi; membentuk badan tata kelola, proses multi- pemangku kepentingan, dan lembaga perwakilan; dan membangun sistem PES. Dengan pengetahuan ini, praktisi konservasi memiliki posisi yang lebih baik untuk menentukan apakah konteks kebijakan menguntungkan untuk konservasi yang dipimpin oleh masyarakat, dan di mana advokasi mungkin diperlukan untuk memperkuat kondisi yang memungkinkan ini.

Perluasan dan Difusi

Tantangan yang umumnya dihadapi oleh organisasi konservasi adalah bagaimana konservasi yang dipimpin oleh masyarakat dapat didukung di luar skala lokal. Perluasan dan difusi konservasi yang dipimpin masyarakat penting karena: 1) memungkinkan pengorganisasian mandiri Masyarakat Adat dan komunitas lokal ke dalam kelompok tata kelola tingkat yang lebih tinggi untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan peraturan di tingkat regional dan nasional, dan 2) memastikan bahwa skala kelompok tata kelola sesuai dengan skala tantangan pengelolaan sumber daya alam.[187] Pengorganisasian diri dimulai pada skala lokal, dan sangat penting bahwa kelompok tata kelola yang muncul berada di dalam kelompok yang berkembang pada skala yang lebih besar, yang membangun kepercayaan yang sudah ada sebelumnya yang telah terbentuk dan mempertahankan otonomi mereka. [70] Dengan cara ini, mereka juga dapat meningkatkan kapasitas kelompok tata kelola tingkat yang lebih tinggi untuk mengelola masalah yang dapat ditangani keras di tingkat lokal, seperti manajemen lintas batas dan konflik antar kelompok.[187] Dialog multi-stakeholder—yang telah dibahas di bagian sebelumnya—merupakan hal penting untuk perluasan dan difusi, karena menawarkan peluang bagi Masyarakat Pribumi dan komunitas lokal untuk terlibat dalam forum pemerintahan dan pengambilan keputusan tingkat tinggi, berbagi pengetahuan, dan menyelesaikan konflik.

Difusi mengacu pada penyebaran konservasi yang dipimpin masyarakat dari satu kelompok ke kelompok lain, yang berdampak pada skala spasial yang lebih besar. Banyak literatur tentang difusi menarik dari teori "difusi inovasi". Singkatnya, informasi tentang inisiatif tertentu menyebar dari pengadopsi sukses ke pengadopsi potensial melalui pertukaran pembelajaran dan pengaruh. Tingkat adopsi awal seringkali lamban, karena sejumlah kecil pengadopsi awal membatasi penyebaran informasi. Pertumbuhan awal yang lambat kemudian berubah menjadi fase pertumbuhan yang cepat, karena semakin banyak pengadopsi yang berbagi pengalaman dengan kumpulan besar pengadopsi potensial. Seiring berjalannya waktu, tingkat penyerapan melambat lagi karena kumpulan pengadopsi potensial dan yang bersedia menurun. Pada akhirnya, titik batas ketahanan tercapai di mana semua individu yang telah terpapar inisiatif telah mengadopsinya, atau menolak inisiatif dalam desainnya saat ini.[182] Meskipun demikian, sulit untuk memprediksi bagaimana adopsi akan berjalan dan seberapa kuat penyerapan akan didasarkan pada tingkat penyerapan awal (lambat). Faktanya, studi baru-baru ini tentang program konservasi berbasis masyarakat tidak menemukan contoh inisiatif yang mencapai penyerapan cepat dan adopsi skala besar, mengungkapkan pertukaran yang nyata antara kecepatan penyerapan dan proporsi akhir pengadopsi.[182] Hal ini menyiratkan bahwa penyerapan yang luas membutuhkan waktu, yang sejalan dengan apa yang kita ketahui tentang pentingnya dan waktu yang dibutuhkan untuk membangun kepercayaan dan hubungan.

Tingkat dan pola difusi biasanya bergantung pada tiga faktor utama: 1) karakteristik dari praktik pengelolaan sumber daya alam, 2) masyarakat itu sendiri, dan 3) konteksnya.[188] Sebagai contohnya, difusi tampaknya terjadi lebih cepat dengan praktik sederhana yang konsisten dengan nilai dan sistem kepercayaan masyarakat, yang dapat diuji dan disesuaikan agar sesuai dengan konteks lokal, dan jika keuntungan relatif dari praktik tersebut sangatlah besar. Difusi juga lebih mungkin terjadi di mana komunitas sudah terbiasa dengan praktik tersebut, terhubung dengan baik ke dunia luar dan satu sama lain, dan di mana ada persaingan untuk mengembangkan praktik baru. Akhirnya, difusi berjalan lebih cepat jika ada kondisi politik yang memungkinkan untuk mendukung praktik tersebut, dan di mana konteks geografis dan budaya selaras dengan praktik tersebut.[69,188-189]

Tabel 8: *Contoh kegiatan yang mendukung faktor difusi.*[69]

Faktor Kunci untuk Difusi	Contoh Kegiatan
Praktek pengelolaan sumber daya alam	Desain pendukung dan implementasi praktik dengan cara yang sesuai dengan nilai, kebutuhan, dan pengalaman hidup masyarakat; Mensintesis dan mengutamakan informasi tentang praktik dengan cara yang mudah dipahami dan diterapkan; Tingkatkan visibilitas atau dorong komunitas untuk berbagi informasi tentang praktik dan hasilnya untuk memfasilitasi proses pembelajaran sosial
Komunitas	Memfasilitasi pertukaran pembelajaran antarmasyarakat tentang peluang pengelolaan sumber daya alam; Mendukung pengembangan jaringan antar komunitas dan komunitas praktik; Memfasilitasi dan membangun kapasitas untuk dialog multi pemangku kepentingan
Konteks	Mendukung penerapan undang-undang yang memungkinkan pelaksanaan konservasi yang dipimpin oleh masyarakat; Jika memungkinkan, dukunglah identifikasi kompatibilitas antara praktik dan konteks[m]

Tabel 8 menjelaskan beberapa tindakan yang mungkin dilakukan oleh praktisi konservasi untuk mendukung perluasan dan penyebaran praktik konservasi berbasis masyarakat. Dukungan jaringan antar-komunitas dan pertukaran pembelajaran patut disoroti, karena merupakan sarana penting untuk mendorong perluasan dan difusi yang memanfaatkan keterampilan berkumpul yang kuat yang dimiliki oleh banyak organisasi konservasi. Mengingat kembali teori "difusi inovasi", investasi dalam jaringan antar komunitas dan pertukaran pembelajaran meningkatkan kemungkinan pengadopsi yang sukses berhubungan dengan pengadopsi potensial dan dapat berbagi pengalaman, mendidik, dan mempengaruhi untuk meningkatkan tingkat difusi. Ini adalah kasus yang terjadi di Amerika Utara, di mana Jaringan Masyarakat Adat Pembakaran (IPBN) dimulai pada tahun 2015 dengan satu lanskap di wilayah leluhur gabungan Suku Yurok, Hoopa, dan Karuk di California Utara, dan sejak itu berkembang dengan menyertakan peserta dari beberapa pueblos di New Mexico, pengelola lahan dari Lintah Lake Band of Ojibwe di Minnesota, Suku Klamath di Oregon, dan Suku Alabama-Coushatta di Texas. IPBN adalah jaringan pendukung di antara komunitas penduduk asli Amerika yang merevitalisasi praktik kebakaran tradisional mereka dalam konteks kontemporer. Kegiatan-kegiatannya termasuk perencanaan strategis untuk revitalisasi budaya api, pelatihan api termasuk kualifikasi federal dan pembakaran terkendali berbasis budaya, dan mempromosikan pembelajaran antargenerasi. Langkah pertama sering kali melibatkan orang-orang dari satu suku mengunjungi tanah air orang lain. Yang lain terlibat melalui acara di mana hubungan budaya dengan api diintegrasikan ke dalam pelatihan kebakaran. Berakar pada penentuan nasib sendiri, tim kepemimpinan IPBN memandu pertumbuhan jaringan dan mengadaptasi struktur jaringan untuk menyambut lanskap suku baru.

m. Perhatikanlah, beberapa karakteristik kontekstual tidak dapat atau tidak boleh diubah, sehingga penilaiani kondisi ekologi, budaya, dan politik lokal dan penerapan praktik dalam kondisi tersebut selama analisis situasi adalah penting.

© NICK HALL

Studi kasus

Konservasi berkelanjutan Melalui Komitmen Politik, Koordinasi Regional, dan Keuangan Berkelanjutan di Mikronesia

Tantangan Mikronesia mencakup 2,5 juta mil persegi (1 juta hektar) lautan, area yang hampir seukuran benua AS, dan mendukung sekitar 450.000 orang di 2.000 pulau, 12 bahasa, dan lima yurisdiksi. Pada tahun 2006, Kepala Eksekutif dari lima negara dan wilayah di kawasan secara kolektif berkomitmen pada Tantangan Mikronesia (MC), "untuk secara efektif melestarikan setidaknya 30 persen sumber daya laut dekat pantai dan 20 persen sumber daya terestrial di seluruh Mikronesia." Mereka menandai tahun 2020 sebagai tanggal target untuk mencapai tujuan bersama ini, yang telah membentuk upaya konservasi regional selama dekade terakhir.

Komitmen Politik Daerah

Komitmen politik tingkat tinggi kepada MC memungkinkan negara-negara pulau yang kecil, tersebar, dan terpencil ini untuk bersatu di bawah inisiatif menyeluruh yang didanai yang meningkatkan visibilitas secara global, memberikan komitmen politik untuk mendorong prioritas, dan memfasilitasi upaya kolektif (dan kompetitif) untuk mencapai keuntungan konservasi. Komitmen ini telah mengalami beberapa transisi politik dan memungkinkan organisasi dan lembaga untuk memberikan bantuan teknis dan keuangan yang lebih efektif secara regional daripada ke yurisdiksi individu masing-masing. Tiga dari lima yurisdiksi telah melembagakan MC melalui kebijakan, undang-undang, atau peraturan Jaringan Kawasan Lindung (PAN), dan kantor PAN untuk mempertahankan upaya MC. Dua lainnya adalah dibawah perlindungan AS dan telah menerapkan pendekatan pengelolaan pesisir terpadu yang selaras dengan hukum dan sistem AS.

KETERANGAN GAMBAR
Bioma Kerangka VCA

TERESTRIAL **AIR TAWAR** **PESISIR**

Pembiayaan Berkelanjutan di Tingkat Regional dan Yurisdiksi

Seiring dengan komitmen konservasi politik, dana abadi didirikan, dan Micronesia Conservation Trust (MCT) ditunjuk untuk mengelola dana sumbangantersebut. Pendekatan regional memungkinkan adanya pengurangan biaya pengelolaan untuk dinegosiasikan, menghasilkan pilihan investasi yang lebih beragam, membantu mempertahankan keterlibatan dan komitmen di antara para eksekutif kepala, dan mendapatkan janji langsung oleh TNC dan Conservation International (CI) yang membangun kredibilitas dalam upaya tersebut. Rencana keuangan berkelanjutan kemudian dikembangkan untuk setiap yurisdiksi yang mengidentifikasi sumber pendanaan yang ada dan potensial dibandingkan dengan total biaya awal dan manajemen untuk mencapai tujuan MC. Telah ditentukan bahwa celah tersebut dapat diisi oleh minat investasi dari dana sumbangan $56 juta, untuk melengkapi sumber-sumber lokal yang akan dikembangkan atau diamankan di setiap yurisdiksi. Pada Desember 2020, total dana sumbangan yang tumbuh menjadi hampir $25 juta.

Setiap yurisdiksi telah melakukan kegiatan untuk mengamankan dana tambahan. Palau telah membentuk mekanisme untuk mencairkan dana MC ke situs PAN, yang biasanya dikelola oleh masyarakat lokal, organisasi berbasis masyarakat, atau LSM, jika memenuhi kriteria tertentu. Green Fee dari pariwisata Palau juga telah ditetapkan untuk menghasilkan dana tambahan. Model serupa tengah dikembangkan di Negara Federasi Mikronesia dan Republik Kepulauan Marshall. Di seluruh kawasan, mekanisme keuangan tambahan di tingkat masyarakat telah dikembangkan di wilayah proyek tertentu, seperti dana abadi dan pelepasan konservasi, dan sembilan perjanjian konservasi "Satu Karang" yang memberikan dukungan keuangan berkelanjutan kepada masyarakat yang berpartisipasi untuk pengelolaan sumber daya laut dekat pantai.

Sejak peluncuran MC, perkiraan konservatif menunjukkan bahwa mendukung mitra LSM (MCT dan TNC) memanfaatkan sekitar $45 juta dana sumbangan untuk mendukung pelaksanaan MC di seluruh wilayah, dan yurisdiksi memanfaatkan jugasekitar $17,5 juta dana sumbangan.

Kemajuan dan Hasil

Evaluasi yang dilakukan pada tahun 2020 mengidentifikasi beberapa peluang untuk memperkuat kemajuan dan implementasi MC. Seperti misalnya, investasi yang lebih besar untuk infrastruktur MC akan meningkatkan koordinasi, komunikasi, dan kolaborasi di tingkat regional. Hal ini termasuk kepemimpinan eksekutif yang berdedikasi untuk mekanisme koordinasi, persyaratan dan peran yang didefinisikan dengan jelas, proses tata kelola yang diperkuat di seluruh platform regional, dan pendekatan atau rencana yang lebih terkoordinasi secara formal untuk mencapai tujuan MC di antara lembaga, organisasi, dan mitra yurisdiksi. Selain daripada itu, pendekatan perencanaan yang lebih dari bawah ke atas dapat meningkatkan keterlibatan para pemimpin yurisdiksi—termasuk legislatif/kabinet, kepemimpinan lembaga, dan pemimpin tradisional—dalam desain dan peluncuran awal, memperkuat keselarasan dengan prioritas lokal dan masyarakat, dan mempercepat pelembagaan MC di seluruh yurisdiksi. Terakhir, sistem pelaporan dan komunikasi yang lebih kuat dan transparan terkait keuangan berkelanjutan yang memberikan tinjauan tahunan kepada setiap yurisdiksi atas dana sumbangan mereka, manfaat yang diperoleh, dan kegiatan penggalangan dana dan pengembangan kapasitas lainnya dapat membantu mengatasi kegagalan karena tidak memenuhi tujuan dari rencana keuangan berkelanjutan baik lokal maupun regional.

Esensi yang dipelajari untuk studi kasus ini didasarkan pada evaluasi Tantangan Mikronesia yang diselesaikan oleh penulis utama Meghan Gombos setelah mencapai jangka waktu 2020. Dokumen evaluasi dan ringkasan didanai oleh TNC dan Komunitas Kawasan Dikelola dan Dilindungi Kepulauan Pasifik, dan merupakan produk dari Komite Pengarah Tantangan Mikronesia.

Alat dan Sumber Daya

ALAT 18: PANDUAN—PANDUAN KEUANGAN KONSERVASI

Aliansi Keuangan Konservasi (CFO) Panduan Keuangan Konservasi Panduan menawarkan definisi rinci tentang mekanisme pendanaan konservasi; panduan terperinci tentang bagaimana menerapkan mekanisme keuangan tertentu, termasuk perangkat lembar kerja perencanaan strategis, perangkat lembar kerja penilaian kelayakan, perangkat lembar kerja desain mekanisme keuangan, dan informasi penilaian sumber daya; studi kasus; dan panduan perencanaan bisnis, templat, dan repositori.

ALAT 19: DIAGNOSTIK—FITUR UTAMA DAN KONDISI PENDUKUNG UNTUK PEMBIAYAAN EFEKTIF

Sejumlah kondisi yang memungkinkan serta fitur strategi dan desain adalah kunci untuk pembiayaan konservasi Masyarakat Adat dan masyarakat lokal yang efektif. Dengan menghasilkan tanggapan untuk setiap item dalam daftar periksa, praktisi dapat menggunakan alat ini untuk menilai keberadaan kondisi dan fitur pendukung utama ini untuk pembiayaan yang efektif. Pada gilirannya hal ini dapat mendukung upaya untuk menilai kelayakan peluang pembiayaan, menginformasikan desain strategi dan mekanisme keuangan, dan menentukan prioritas untuk mendukung kegiatan pengembangan kapasitas yang sesuai dalam kemitraan dengan Penduduk Pribumi dan masyarakat lokal. Alat ini harus digunakan dalam diskusi dan kolaborasi dengan masyarakat, atau lembaga perwakilannya, serta pakar terkait.

Appendix

Sumber daya tambahan

Mengamankan Hak Atas Tanah, Air dan Sumber Daya

LandMark

Sebuah platform global interaktif online yang diselenggarakan oleh World Resources Institute (WRI) dan Rights and Resources Initiative (RRI) untuk menyediakan peta dan informasi penting lainnya tentang lahan yang secara kolektif dimiliki dan digunakan oleh Masyarakat Adat dan komunitas lokal. Mencakup data kepemilikan formal vs. informal, indikator keamanan hokum lahan, tekanan pembangunan, dan informasi relevan lainnya.

Indeks Bentuk Kepemilikan Global (Prindex)

Sebuah indikator global mengenai persepsi warga negara terhadap keamanan Bentuk kepemilikan, sebuah inisiatif bersama dari Aliansi Tanah Global dan Lembaga Pembangunan Luar Negeri. Hal yang ditujukan untuk memantau dan mendorong tata kelola yang baik dari Bentuk kepemilikan, dan berfokus pada persepsi, tidak serta-merta mencerminkan status hukum.

Panduan Fasilitator Perlindungan Lahan Komunitas NAMATI: Pemetaan dan Pendaftaran Lahan Masyarakat

Bagian berjudul “Menyelaraskan Batas dan Mendokumentasikan Lahan Masyarakat,” halaman 133-176. Bab ini menjelaskan bagaimana caranya mendukung masyarakat untuk membuat peta sketsa partisipatif lahan mereka; menyelesaikan sengketa batas dan konflik pertanahan yang berkaitan dengan tanah masyarakatnya; kemudian mendokumentasikan batas-batas yang disepakati dengan berbagai bentuk bukti fisik, termasuk perjanjian yang ditandatangani dengan tetangga, pohon batas atau penanda lainnya, dan koordinat lokasi.

Kepemimpinan yang Kuat, Tata Kelola, dan Kapasitas Manajemen

Kartu Skor Komunitas CARE (CSC) dan Pendekatan Analisis dan Tindakan Sosial (SAA)

Sumber daya ini disarankan oleh para peninjau dari berbagai sektor (kesehatan, pendidikan, dan pembangunan) dari proyek Kerangka Kerja VCA dan Rantai Hasil serta Basis Bukti sebagai potensi yang berguna bagi program untuk menerapkan pendekatan akuntabilitas berbasis masyarakat untuk penilaian dan peningkatan penyampaian program (CSC); dan pendekatan partisipatif untuk mengeksplorasi faktor-faktor sosial yang berdampak negatif terhadap anggota masyarakat, dengan tujuan untuk mendorong kesetaraan gender dalam rancangan dan implementasi program (SAA). Pendekatan tersebut dapat menumbuhkan kepercayaan antara komunitas dan praktisi konservasi dengan menggambarkan pertimbangan penting untuk desain dan implementasi proyek seperti: Prioritas siapa yang dihargai dan ditindaklanjuti? Apakah ada konsensus tentang prioritas di antara seluruh badan pemangku

kepentingan? Apakah prioritas yang diidentifikasi beresonansi dengan komunitas yang lebih besar? Apakah mereka termasuk dalam keragaman kebutuhan dan prioritas yang diungkapkan? Apakah mereka menangkap kebutuhan dan kepentingan yang paling terpinggirkan dan kurang terwakili dalam masyarakat?

Panduan Fasilitator Perlindungan Lahan Masyarakat NAMATI

Sumber daya ini berisi panduan praktik terbaik tentang banyak tindakan potensial yang disarankan di bagian alat dan sumber daya pengembangan kapasitas (Pilar 2), termasuk cara bekerja dengan tokoh masyarakat, melibatkan perempuan dan kelompok terpinggirkan, melakukan visi masyarakat, mendukung perencanaan penggunaan lahan, mendokumentasikan tanah masyarakat, menyelesaikan konflik, dan mengejar pendaftaran dan formalisasi klaim tanah masyarakat.

Penilaian Mandiri Kelembagaan: Alat untuk Memperkuat Organisasi Nirlaba

Selain pengembangan kapasitas masyarakat, TNC memiliki sejarah panjang dalam mendukung kapasitas organisasi masyarakat sipil dan organisasi nirlaba di dalam negeri yang pekerjaannya berdampak langsung pada Penduduk Pribumi dan komunitas lokal. Sumber daya ini dapat digunakan untuk menilai kapasitas kita sendiri serta organisasi masyarakat sipil mitra dan organisasi nirlaba, termasuk evaluasi visi dan perencanaan strategis mereka, kepemimpinan, manajemen organisasi, sumber daya manusia, pengembangan sumber daya, manajemen keuangan, pembangunan/penjangkauan konstituen, dan kapasitas program.

Sumber Daya Praktisi TNC dari Rantai Hasil dan Basis Bukti (RCEB) Proyek: Rantai hasil interaktif dan narasi untuk pilar-pilar tertentu dari Kerangka SPA

Sumber daya ini memberikan tiga rantai hasil yang relevan untuk pengembangan kapasitas (serta mata pencaharian yang berkelanjutan), dan berisi rincian tambahan, menu indikator potensial, dan alat dan sumber yang disarankan untuk menilai dan memperkuat kepercayaan dengan dan di dalam masyarakat (halaman 24-33), serta efektivitas tokoh dan lembaga masyarakat (hlm. 34-42).

Alat Penilaian Mandiri Tata Kelola TNC

Sumber daya ini menyediakan alat yang dikembangkan oleh Tim TNC Australia Utara untuk digunakan oleh mitra masyarakat dalam menilai efektivitas pemimpin dan lembaga masyarakat mereka sendiri.

Dialog Multi-Stakeholder dan Pengambilan Keputusan yang Efektif

Panduan MSP: Bagaimana Merancang dan Memfasilitasi Kemitraan dengan Multi-Stakeholder Panduan ini menawarkan peta jalan untuk merancang dan memfasilitasi kemitraan multi-stakeholder (MSP). Ini bukan buku resep; sebaliknya, ini merupakan garis besarnya. Kekuatan panduan ini berasal dari kerangka dasarnya untuk memahami dan memfasilitasi MSP. Kerangka kerja ini menghubungkan teori dengan praktik dan menyediakan model dan seperangkat prinsip untuk memandu desain MSP, saran-saran mengenai fasilitasi, dan seperangkat alat proses partisipatif.

Panduan Alat MSP: Enam Puluh Alat untuk Memfasilitasi Kemitraan Multi-Stakeholder

Sebagai pendamping Panduan MSP tentang cara merancang dan memfasilitasi kemitraan multi-stakeholder yang efektif, panduan alat ini menawarkan 60 alat proses yang melayani tujuan berbeda yang dikuratori oleh penulis sebagai alat yang mereka anggap sangat berguna untuk mendukung proses MSP.

Menuju Kontrak Sosial Baru: Menggunakan Proses Dialog untuk Mempromosikan Perubahan Sosial

Perangkat ini dirancang untuk mendorong refleksi seputar potensi dan batasan proses multi-stakeholder dalam mempromosikan perubahan sosial-politik dan menyediakan alat dan sumber daya praktis untuk memfasilitasi penggunaan proses dialog dengan cara baru. Perangkat ini terutama ditujukan untuk masyarakat sipil, khususnya organisasi kecil yang beroperasi di tingkat lokal, dan berusaha menambahkan perspektif masyarakat sipil ke inisiatif multi-stakeholder. Juga tersedia untuk diunduh dalam Bahasa Perancis, Bahasa Spanyol, dan Bahasa Arab.

Kolaborasi Lintas Sektor untuk Mengatasi Deforestasi Hutan Tropis

Inti dari dokumen ini adalah serangkaian pertanyaan diagnostik support untuk membantu program yurisdiksi merancang dan menilai kolaborasi lintas sektor dan dukungan tulang punggungnya. Pertanyaan-pertanyaannya dibagi menjadi enam bagian: kondisi awal, hasil, dinamika kolaborasi, struktur kolaborasi, dukungan backbone, dan akuntabilitas.

Peluang Mata Pencaharian Berkelanjutan

Perencanaan Wilayah yang Sehat

Perencanaan Wilayah yang Sehat (HCP) adalah suatu bentuk adaptasi dari Standar Terbuka (OS) yang dikembangkan untuk digunakan dalam situasi partisipatif dan lintas budaya—biasanya dengan komunitas Pribumi. Untuk dapat menjalankan ini dengan lebih baik, bahasa OS telah diterjemahkan ke dalam istilah yang lebih sederhana, sistem kode warna yang diadopsi, dan diagram alur tentang bagaimana semua langkah cocok bersama ditambahkan untuk kejelasan. Hal ini telah dikembangkan dan diuji di seluruh Australia, dan pelatih yang paling berpengalaman dalam penggunaannya adalah orang Australia, tetapi telah digunakan dengan sangat sukses di Amerika dan Asia. Kumpulan lengkap file PowerPoint dan latihan terkait untuk menjalankan lokakarya pelatihan HCP dapat diakses di atas.

Evaluasi Usaha Berbasis Masyarakat yang Mendukung Penghidupan Berkelanjutan dalam Kemitraan dengan Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mensintesis pembelajaran dari contoh-contoh perusahaan dan investasi yang berfokus pada masyarakat yang mendukung penghidupan ekonomi, kesejahteraan manusia, dan hasil lingkungan bagi Masyarakat Adat dan komunitas lokal di berbagai belahan dunia. Pelajaran yang dipetik dari contoh-contoh ini memberikan panduan dalam merancang dan mendanai model mata pencaharian masyarakat dan membantu organisasi yang ingin memperkuat upaya yang ada atau memulai inisiatif baru terkait mata pencaharian berkelanjutan.

Manual Peningkatan dan Diversifikasi Penghidupan Berkelanjutan (SLED)

Manual ini menyediakan seperangkat pedoman untuk pengembangan dan praktisi konservasis untuk mendukung masyarakat dalam meningkatkan dan mendiversifikasi mata pencaharian mereka. SLED melakukan hal ini dengan bekerja sama dengan Masyarakat Adat dan komunitas

lokal untuk mengidentifikasi dan mengembangkan peluang untuk perubahan yang positif dalam mata pencaharian mereka, berdasarkan pada kekuatan dan kapasitas mereka, memperhitungkan faktor-faktor yang membantu dan menghambat perubahan mata pencaharian sambil mencerminkan aspirasi dan harapan masyarakat untuk masa depan. Walaupun metodologi ini ditulis dengan mempertimbangkan terumbu karang dan perikanan pesisir, metodologi ini dapat diterapkan secara luas di mana pun sumber daya alam menghadapi degradasi karena pemanfaatan oleh manusia yang tidak berkelanjutan.

Pohon Berbasis Masyarakat dan Usaha Hasil Hutan–Pedoman Analisis dan Pengembangan Pasar dan Pedoman Fasilitator Lapangan

Analisis dan Pengembangan Pasar (MA&D) sesuai untuk perusahaan yang berbasis pada produk sumber daya alam yang perlu dilindungi atau dikonservasi, karena menghubungkan pengelolaan sumber daya alam partisipatif dan kegiatan konservasi dengan peluang menghasilkan pendapatan. (MA&D) yang menyeluruh dapat memberikan cakupan yang luas untuk memahami sistem pasar yang relevan dan dengan demikian membantu menghindari kegagalan bisnis. Meskipun metodologi ditulis dengan fokus pada hutan, pendekatan ini juga telah berhasil diterapkan pada proyek-proyek yang terkait dengan pariwisata berbasis masyarakat, produk pertanian, inisiatif peternakan, dan perikanan pesisir.

Komunitas, Konservasi dan Mata Pencaharian

Buku ini mencerminkan hasil studi lebih dari satu dekade yang berfokus pada masyarakat, konservasi, dan mata pencaharian, melalui Jaringan Penelitian Konservasi Masyarakat (CCRN), sebuah inisiatif global yang melibatkan berbagai organisasi masyarakat adat, akademik, masyarakat dan non-pemerintah (LSM). Seperti yang akan terlihat dalam buku ini, keterkaitan antara konservasi dan mata pencaharian muncul dalam sistem 'sosial-ekologis' yang mendasarinya, mereka berakar pada berbagai makna dan motivasi untuk konservasi, mereka dipengaruhi oleh masalah kekuasaan dan tata kelola, dan mereka mengarah pada berbagai hasil keanekaragaman hayati dan mata pencaharian.

Praktik Baik untuk Terlibat dengan Komunitas yang Terkena Dampak Proyek Pengembangan Komersial: Dokumen Panduan Internal tentang Pelajaran yang Dipetik untuk The Nature Conservancy

Laporan ini ditujukan sebagai dokumen panduan internal bagi para praktisi TNC yang sedang mempertimbangkan, atau terlibat aktif, dalam proyek-proyek Development by Design (DbD) atau proyek-proyek berbasis masyarakat lainnya yang sedang menghadapi pembangunan yang diusulkan atau sedang berlangsung. Laporan ini terdiri dari empat bagian utama termasuk (1) tinjauan posisi dan komitmen dari Conservancy terkait kesejahteraan manusia dan keterlibatan masyarakat, (2) tinjauan pustaka singkat yang menyoroti praktik terbaik yang diterima untuk melibatkan masyarakat dalam proyek ekstraktif, (3) perwakilan Studi kasus Conservancy merangkum pengalaman dan pelajaran tentang keterlibatan dengan masyarakat selama proyek pembangunan, dan (4) rekomendasi keseluruhan untuk praktisi konservasi berdasarkan tinjauan literatur terkemuka dan pengalaman Conservancy.

Keadilan Manfaat, Dampak, dan Inklusi

Panduan Pembelajaran dan Aksi Partisipatif Institut Internasional untuk Lingkungan dan Pembangunan tentang **Keanekaragaman hayati dan budaya: Menjelajahi protokol, hak, dan persetujuan komunitas.** Lihat khususnya bagian 16, halaman 179-183, untuk artikel tentang "Memahami dan memfasilitasi proses protokol komunitas biokultural" oleh Holly Shrumm dan Harry Jonas.

Selain tiga fase integrasi gender dalam konservasi, staf konservasi juga harus menyadari prevalensi kekerasan berbasis gender di seluruh dunia, dan diberi tahu tentang bagaimana merespons, serta bagaimana mengambil pendekatan yang adil yang tidak akan secara tidak sengaja menciptakan atau memperburuk situasi kekerasan. IUCN dan Departemen Luar Negeri AS memiliki informasi mengenai **Apa itu Kekerasan Berbasis Gender?**, dan RAINN menyediakan informasi mengenai Korban **Tips Berbicara dengan Pelecehan Seksual.** Kedua sumber daya juga tersedia di Bahasa Cina, Bahasa Perancis, Bahasa Indonesia, Bahasa Mongol, Bahasa Portugis, Bahasa Spanyol, dan Bahasa Swahili.

Sebagaimana ditekankan di seluruh dokumen ini, bahwa mengambil pendekatan yang responsif secara budaya terhadap integrasi kesetaraan gender adalah yang terpenting, menggarisbawahi pentingnya analisis gender partisipatif yang kuat. Terdapat juga sumber daya bermanfaat lainnya tentang responsivitas budaya dalam integrasi kesetaraan gender, misalnya: **Catatan Pengarahan Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Gender dan Masyarakat Adat.**

Berkenaan dengan mengamankan kesetaraan gender dalam hal lahan, air, dan hak sumber daya alam secara khusus: Inisiatif Hak dan Sumber Daya **Situs web Keadilan Gender** yang mencakup praktik terbaik legislatif dalam mengamankan hak perempuan atas lahan masyarakat, menguraikan faktor-faktor yang berkontribusi pada keberhasilan penguatan hak perempuan adat dan pedesaan untuk mengatur tanah masyarakat, dan menjelaskan bagaimana menggunakan hukum internasional untuk memajukan hak kepemilikan perempuan dalam REDD+. World Resources Institute menyediakan **case study report** mengenai faktor-faktor pendukung bagi keamanan perempuan dan peraturan pertanahan yang dipegang secara kolektif, tersedia dalam bahasa Inggris, Spanyol, Prancis, Arab, Indonesia, dan Nepal.

Koneksi yang Erat ke Pengetahuan dan Wilayah

Institut Living Tongues untuk Bahasa yang Terancam Punah

Sebuah organisasi yang mendukung penutur yang menyelamatkan bahasa mereka dari kepunahan melalui aktivisme, pendidikan, serta teknologi. Tim peneliti mendokumentasikan bahasa dan praktik budaya yang terancam punah, menerbitkan studi ilmiah, menjalankan lokakarya pelatihan digital untuk memberdayakan aktivis bahasa, dan berkolaborasi dengan komunitas untuk menciptakan sumber daya bahasa yang akan menjadi dasar revitalisasi bahasa.

Pedoman untuk Mempertimbangkan Pengetahuan Tradisional dalam Inisiatif Perubahan Iklim

Pedoman ini dimaksudkan untuk menguji signifikansi Pengetahuan Tradisional (TK) dalam kaitannya dengan perubahan iklim dan potensi risiko bagi Penduduk Asli di Amerika Serikat sebagai contoh untuk berbagi TK di federal dan inisiatif perubahan iklim non-Pribumi lainnya. Pedoman ini harus digunakan untuk menginformasikan pengembangan protokol khusus dalam konsultasi langsung dan erat dengan Masyarakat Adat.

Institut Sains dan Kesehatan Integratif—Melihat dengan Kedua Mata

Situs web ini mencakup artikel, presentasi, video, dan contoh untuk memahami dan menerapkan kerangka kerja “Melihat dengan Kedua Mata” Sesepuh Dr. Albert Marshall. Melihat dengan kedua mata mengacu pada belajar melihat dari satu mata dengan kekuatan pengetahuan Pribumi dan cara mereka mengetahui, dan dari mata yang lain dengan kekuatan pengetahuan Barat dan cara mereka mengetahui... dan belajar menggunakan kedua mata ini bersama-sama, untuk kepentingan bersama.

Hasil yang lestari untuk Masyarakat dan Alam

Pembiayaan Konservasi untuk Program Konservasi dengan Masyarakat Adat dan Masyarakat Lokal

Tujuan umum dari studi ini adalah untuk mengeksplorasi pilihan untuk menghasilkan tingkat keuangan yang cukup selama periode waktu yang berkelanjutan sehingga Masyarakat Adat dan masyarakat lokal memiliki kapasitas keuangan untuk terus mengelola sumber daya alam mereka secara efektif. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi model dan contoh pembiayaan berkelanjutan yang digunakan dalam proyek konservasi yang terkait dengan masyarakat adat dan masyarakat lokal di seluruh dunia dan menilai contoh-contoh yang ada ini untuk memfasilitasi replikasi dan adaptasi. Studi ini juga dimaksudkan untuk berbagi pengetahuan tentang model pembiayaan berkelanjutan yang berhasil di antara Penduduk Asli dan komunitas lokal dan memberikan panduan tentang sumber investasi publik dan swasta dalam mengembangkan model ini.

Sumber Daya dari Pembiayaan Utama Tambahan

Folder ini menawarkan kumpulan sumber daya tambahan untuk mendukung pembiayaan konservasi Masyarakat Adat dan masyarakat lokal. Hal ini mencakup sumber daya pelatihan serta perpustakaan informasi tentang solusi pembiayaan di berbagai jenis instrumen, geografi, ekosistem, dan sektor. Sebuah dokumen ringkasan di dalamnya memberikan gambaran tentang sumber daya yang ditawarkan.

Paket R: Pemain utama

Sumber daya ini menyediakan fungsi perpustakaan bagi pengguna R (perangkat lunak pemrograman gratis) untuk melakukan analisis jaringan sosial sebagai sarana untuk mengidentifikasi simpul jaringan utama di antara para pemimpin masyarakat yang ada dan titik injeksi kritis untuk mempromosikan kegigihan dan penyebaran program konservasi.

Konservasi Air Tawar Berbasis Komunitas

Petunjuk Pelaksana bagi Praktisi Air Tawar di dalam Kerangka Kerja SPA

Pelestarian keanekaragaman hayati sistem air tawar dunia sangat mendesak bagi masyarakat dan komunitas di seluruh penjuru dunia. Namun sifat alamiah dari sumber daya air tawar memberikan tantangan unik untuk pengelolaan berkelanjutan itu sendiri, terutama di bawah kondisi tertekan. Neraca yang tipis, variabilitas beserta ketidakpastian sumber daya dan apapun yang berinteraksi dengannya dianggap menakutkan. Penambahan ke dalam kompleksitas mendasar ini berupa faktor-faktor seperti persaingan klaim sumber daya, alokasi berlebih atas ketersediaan sumber daya, dinamika politis dan kekuasaan, kesenjangan sosial dan budaya, dan kendala perekonomian. Petunjuk pelaksana ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang bagaimana komunitas-komunitas dapat mengelola sumber daya air tawar berkelanjutan dengan menerapkan Kerangka Kerja SPA. Catatan, petunjuk pelaksana ini telah diikutsertakan ke dalam penulisan SPA 2.0 untuk memastikan cakupan dan inklusi yang memadai akan konteks dan perspektif air tawar, dan konsep utama yang tercermin di dalamnya. Juga tersedia dalam Bahasa Perancis, Portugis, dan Spanyol.

Evaluasi akan Efektivitas Konservasi Sumber Daya Air Tawar Bebasis Komunitas

Tinjauan sistematis ini mengkaji literatur peer-review untuk menilai efektifitas beberapa pendekatan berbasis komunitas di dalam ekosistem yang berkaitan dengan air tawar. Tinjauan dari kajian tersebut menunjukkan bahwa studi mengenai konservasi air tawar berbasis komunitas masih memiliki keterbatasan dalam jumlah dan keterwakilannya. Di selang waktu pelaporan hasil positif untuk keanekaragaman hayati dan kesejahteraan manusia pada umumnya, keterbatasan tersebut disebabkan oleh desain penelitian yang membatasi kemampuan untuk menyimpulkan signifikansi atau hukum kausalitas dari efek ini. Secara keseluruhan, analisis ini menunjukkan bahwa ada beberapa kesenjangan dalam penelitian yang tersedia: lintas wilayah geografis, jenis ekosistem air tawar, jenis intervensi, dan jenis- jenis hasil luaran dari lingkungan dan kesejahteraan manusia. Mengingat nilai penting sumber daya air tawar bagi Masyarakat Adat dan komunitas lokal, tinjauan ini menyoroti kebutuhan kritis untuk melahirkan bukti-bukti di seluruh konteks yang lebih beragam untuk menjangkau kejelasan yang lebih berarti tentang bagaimana dan proyek berbasis komunitas manakah yang dapat menjadi paling efektif.

Kerangka Kerja di Sektor Perencanaan Listrik

Salah satu dampak paling signifikn terhadap ekosistem air tawar dan masyarakat yang mengandalkan jasa ekosistemnya adalah pembangunan bendungan. Kami mengevaluasi bermacam peluang bagi komunitas-komunitas untuk memiliki suara dala perencanaan di sektor energi dan menjelaskan kerangka sebuah kerangka kerja bagi partisipasi komunitas.

Berperan serta dengan Komunitas dalam Pembentukan dan Pengelolaan Kawasan Lindung Air Tawar

Laporan ini dikembangkan untuk meninjau praktik terbaik dalam bekerja sama dengan Masyarakat Adat dan komunitas-komunitas lokal dalam membangun dan mengelola kawasan lindung air tawar bersama-sama. Hal ini mencakup praktik-praktik terbaik dalam mengidentifikasi dan melibatkan para pemangku kepentingan; menetapkan berbagai aturan, pemantauan, penegakan dan resolusi konflik; mengembangkan struktur kepemimpinan; dan mempertimbangkan unsur keamanan tenurial air.

Konservasi Berbasis Komunitas di Wilayah Kelangkaan Persediaan Air

Setengah dari jumlah populasi di penjuru dunia tinggal di tempat-tempat yang beresiko kekurangan air. Sepertiga dari seluruh bantaran sungai, danau, dan akuifer sedang dieksploitasi secara besar-besaran, dengan setidaknya 75 persen air digunakan untuk kebutuhan manusia. Kolonisasi dan perampasan akses tanah dan air secara tidak wajar mempengaruhi Masyarakat Adat dan komunitas lokal. Dalam laporan internal ini kami mengeksplorasi beberapa atribut kelangkaan air dan menyelami lima studi kasus dari India, Amerika Serikat, Peru dan Australia untuk mengidentifikasi praktik terbaik untuk meningkatkan suara komunitas dalam pengambilan keputusan kelangkaan air dan menimbang kemenangan yang adil untuk manusia dan alam. Kami menyimpulkan bersamaan dengan sebuah analisis pembelajaran yang dipetik dari kasus-kasus ini dan kunci pertimbangan utama bagi praktisi konservasi.

---

n. Sebuah manuskrip telah diserahkan untuk diterbitkan pada Januari tahun 2022. Untuk draf terakhir, mohon menghubungi Nathan Karres (nkarres@tnc.org).

o. Untuk mengakses seluruh laporan internal, mohon menghubungi Caitlin Doughty (caitlin.doughty@tnc.org).

Referensi

1. The Nature Conservancy. (2022). “Penilaian Karakteristik Komunitas Lokal dalam Peta Geografi Konservasi Berbasis Masyarakat Prioritas.”

2. Martinez Cobo, J. R. (1982). *Studi mengenai Permasalahan atas Diskriminasi terhadap Penduduk Asli/Masyarakat Adat*. Dewan Ekonomi dan Sosial PBB, Komisi Hak Asasi Manusia. https://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/MCS_v_en.pdf

3. Persatuan Bangsa-Bangsa. (2007). *Deklarasi Persatuan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Masyarakat Adat*. https://www.un.org/development/desa/indigenouspeoples/wp-content/uploads/sites/19/2018/11/UNDRIP_E_web.pdf

4. Garnett, S.T., Burgess, N.D., Fa, J.E., Fernández-Llamazares, Á., Molnár, Z., Robinson, C.J., ... Leiper, I. (2018). Sebuah tinjauan spasial tentang pentingnya tanah Adat untuk konservasi di tingkat global. *Nat. Sustain.*, 1, 369–374.

5. Hak Inisiatif dan Sumber Daya. (2020). Perkiraan luas tanah dan wilayah Masyarakat Adat, komunitas lokal, dan keturunan Afro yang belum diakui hak-haknya, 1–32.

6. Hak Inisiatif dan Sumber Daya, Pusat Penelitian Woods Hole, dan Institut Sumber Daya Dunia. (2016). Menuju sebuah Garis Dasar Penyimpanan Karbon Global di Lahan Kolektif: Sebuah Analisis Terkini tentang Kontribusi Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal dalam Mitigasi Perubahan Iklim.

7. Sobrevila, Claudia.(2008). Peran Masyarakat Adat di dalam Konservasi Keanekaragaman Hayati: Mitra Alami namun Sering Diabaikan. Washington, DC: Bank Dunia.

8. Grup Bank Dunia.(2012). *Hasil Panen Tersembunyi: Kontribusi Global Perikanan Tangkap (Bahasa Inggris)*. Washington, D.C. http://documents.worldbank.org/curated/en/515701468152718292/Hidden-harvest-the-global-contribution-of-capture-fisheries

9. Stevens, C., Winterbottom, R., Springer, J., & Reytar, K. (2014). *Hak-Hak Perlindungan, Menangkal Perubahan Iklim*.

10. Schuster, R., Germain, R. R., Bennett, J. R., Reo, N. J., & Arcese, P. (2019). Keanekaragaman hayati vertebrata di lahan yang dikelola oleh Masyarakat Adat di Australia, Brasil, dan Kanada setara dengan yang berada di kawasan lindung. *Kebijakan dan Sains Lingkungan Hidup*, 101, 1-6.

11. Detoeuf, D., Wieland, M, Cowles, P. dan Wilkie, D. (2020). Perangkat Sumber Daya Alami Pemerintahan – Versi 2. WCS Bronx, NY dan USAID Washington, D.C. USA

12. Chaskin, R. J. (2001). Membangun Kapasitas Masyarakat. *Ulasan Seputar Urusan Perkotaan*, 36(3), 291–323. doi: 10.1177/10780870122184876

13. Moore, S. A., Severn, R. C., & Millar, R. (2006). Model konseptual kapasitas komunitas untuk konservasi keanekaragaman hayati. *Penelitian Geografis*, 44(4), 361–371. doi: 10.1111/j.1745-5871.2006.00407.

14. Wongbusarakum, Supin, Erin Myers Madeira, Herlina Hartanto. (2014). Memperkuat Dampak Sosial pada Program Bentang Alam Berkelanjutan: Buku panduan bagi praktisi untuk memperkuat dan memantau hasil luaran kesejahteraan hidup manusia. The Nature Conservancy. Arlington, VA.

15. Berkes, F., Folke, C., & Colding, J. (Eds.). (2000). *Menyambungkan sistem sosial dan ekologis: praktik pengelolaan dan mekanisme sosial untuk membangun ketangguhan sistem sosial*. Cambridge University Press.

16. Fariss B, DeMello N, Powlen KA, Latimer CE, Masuda Y, Kennedy CM. (2021). Mengidentifikasi Katalisator Keberhasilan dalam Konservasi Berbasis Komunitas. Konservasi Biologi: Dalam ulasan.

17. Wildcat, D. R. 2009. *Peringatan keras!: Menyelamatkan planet dengan Pengetahuan Adat*. Golden, Colo: Fulcrum.

18. Intitusi Pertama Penduduk Asli Alaska. (2017). 2017-2021 Rencana Strategis. https://firstalaskans.org/wp-content/uploads/2021/03/FAI-2017-2021-Strategic-Plan-files.pdf

19. Schlager, E., & Ostrom, E. (1992). Rezim Hak-Hak Properti dan Sumber Daya Alam: Sebuah Konsep Analisis. *Lahan Ekonomi*, 68(3), 249–262. https://doi.org/10.2307/3146375

20. Organisasi Amerika Serikat. Majelis Umum. Sidang Umum. (46th: 2016: Santo Domingo, Republik Dominika).

21. FAO. (2002). Apa itu Kepemilikan Tanah? Dalam M. Cox (Ed.), *Kepemilikan Tanah dan Pembangunan Daerah*. Roma: Organisasi Pangan dan Agrikultural.

22. FAO. (2012). Garis Pedoman Sukarela mengenai Penanggung Jawab Kepemilikan Tanah, Perikanan, dan Hutan Dalam Rangka Ketahanan Pangan Nasional. Roma: Organisasi Pangan dan Agrikultural.

23. Sjaastad, E., & Bromley, D. W. (2000). Prasangka hak milik: Mengenai individualisme, kekhususan, dan keamanan dalam rezim kepemilikan. *Ulasan Kebijakan Pembangunan*, 18(4), 365–389. https://doi.org/10.1111/1467-7679.00117

24. Sikor, T., He, J., & Lestrelin, G. (2017). Rezim Hak Milik dan Sumber Daya Alam: Sebuah Tinjauan Kembali Analisis Konseptual. *Pembangunan Dunia*, 93, 337–349. https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2016.12.032

25. Arnot, C. D., Luckert, M. K. K., & Boxall, P. C. C. (2011). Apa yang dimaksud dengan jaminan kepemilikan? Implikasi konseptual bagi analisis empiris. *Lahan Perekonomian*, 87(2), 297–331. https://doi.org/ISSN 0023-7639

26. *Masuda, Y. J., Kelly, A., Robinson, B. E., Holland, M. B., Bedford, C., Childress, M., ... Veit, P. (2019). Bagaimana para praktisi mengkarakterisasi keamanan kepemilikan lahan?*

27. Tseng, T.-W. J., Robinson, B. E., Bellemare, M. F., BenYishay, A., Blackman, A., Boucher, T., ... Masuda, Y. J. (2021). Pengaruh intervensi kepemilikan lahan terhadap kesejahteraan manusia dan hasil lingkungan. *Keberlanjutan Alam*, 4(3), 242–251. https://doi.org/10.1038/s41893-020-00648-5

28. Hajjar, R., Oldekop, J. A., Cronkleton, P., Newton, P., Russell, A. J., & Zhou, W. (2021). Sebuah analisis global dari hasil sosial dan lingkungan dari hutan masyarakat. *Keberlanjutan Alam*, 4(3), 216-224.

29. Seymour, F., La Vina, T., & Hite, K. (2014). Bukti yang menyambungkan kepemilikan di tingkat komunitas dan kondisi hutan: sebuah catatan bibliografi. *Perserikatan pemanfaatan iklim dan tanah*.

30. Blackman, A., & Veit, P. (2018). d komunitas penduduk asli Amazon memutus jalur emisi hutan karbon. *Ekonomi Ekologis*, 153, 56-67.

31. Alchian, A. A., & Demsetz, H. (1973). Paradigma Hak-hak Kepemilikan Properti. *Jurnal Sejarah Ekonomi*, 33(1), 16–27. https://doi.org/10.1017/S0022050700076403

32. Joireman, S. F. (2008). Misteri Formasi Kapital di Wilayah Afrika Sub-Sahara: Perempuan, Hak Kepemilikan Properti, dan Hukum Adat. *Pembangunan Dunia*, 36(7), 1233–1246. https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2007.06.017

33. Robinson, B. E., Masuda, Y. J., Kelly, A., Holland, M. B., Bedford, C., Childress, M., ... Veit, P. (2017). Menerapkan Keamanan Kepemilikan Tanah ke dalam Konservasi. *Berkas-berkas Konservasi*. https://doi.org/10.1111/conl.12383

34. Soto, H. de. (2001). Misteri Kapital. *Pendanaan dan Pembangunan, Publikasi Pertigabulan Dana Moneter Internasional*, 38(1), 29–30. Diterima dari http://www.imf.org/fandd

35. Easterly, William. (2008). "Institusi: Pendekatan Dari Atas ke Bawah atau Bawah ke Atas?" *Ulasan Ekonomi Amerika*, 98 (2):95-99.

36. Jayachandran, S., De Laat, J., Lambin, E. F., Stanton, C. Y., Audy, R., & Thomas, N. E. (2017). Pembiayaan untuk karbon: Sebuah percobaan acak atas pembiayaan jasa ekosistem demi mengurangi deforestasi. *Sains*, 357(6348), 267–273. https://doi.org/10.1126/science.aan0568

37. Zhang, W., ElDidi, H., Swallow, K. A., Meinzen-Dick, R. S., Ringler, C., Masuda, Y. J., & Aldous, A. (2020). *Pengelolaan Sumber Daya Air Tawar Berbasis Komunitas: Petunjuk pelaksana bagi praktisi untuk menerapkan kerangka kerja suara, pilihan dan kerja TNC*. https://doi.org/10.2499/p15738coll2.133692

38. Hale, L.Z. and J. Rude (eds.). (2017). Belajar dari Pengalaman 30 Tahun Selandia Baru Mengelola Perikanan dengan Sistem Manajemen Kuota. The Nature Conservancy, Arlington, Virginia, USA.

39. FAO dan WorldFish. (2021). *Karakteristik dan kinerja pengelolaan perikanan Bersama di Asia; Sintesis pengetahuan dan studi kasus: Bangladesh, Kamboja, Filipina dan Sri Lanka*. Bangkok. https://doi.org/10.4060/cb3840en

40. Perserikatan Kawasan Northern Rangeland (2018) Rencana Strategis Perserikatan Kawasan Northern Rangeland. 2018-2022. Kenya. https://static1.squarespace.com/static/5af1629f12b13f5ce97ca0b5/t/5bc5f774e2c483f6ec5eafd4/1539700631074/Strategic+Plan.2018-22.FINAL_LOWRES.pdf

41. Agrawal, A., & Ostrom, E. (2001). Tindakan kolektif, hak milik, dan desentralisasi pemanfaatan sumber daya di India dan Nepal. *Politik dan Masyarakat*, 485–514.

42. Bodin, Ö. (2017). Lingkungan Kepemerintahan Kolaboratif: Menjangkau aksi kolektif di tingkat sistem sosial-ekologis. Pada Ilmu Sains. doi: 10.1126/science.aan1114

43. Colfer, C. J. P. (2007). *Peraturan Sederhana untuk Mengkatalisasi Aksi Kolektif dalam Konteks Pengelolaan Sumber Daya Alam*. 19. Diterima dari http://www.cifor.cgiar.org/Knowledge/Publications/Detail.htm?&pid=2252&pf=1

44. Olson, M. (1965). *Logika Berpikir dari Aksi Kolektif: Barang milik publik dan teori kelompok*. Cambridge, MA: Harvard University Press.

45. Ostrom, E., Gardner, R., & Walker, J. (1994). *Aturan, Permainan, dan Himpunan Sumber Daya Milik Bersama* (E. Ostrom, R. Gardner, & J. Walker (eds.)). Ann Arbor: University of Michigan Press.

46. Berkes, F., Folke, C., & Colding, J. (Eds.). (2000). Menyambungkan sistem sosial dan ekologis: praktik manajemen dan mekanisme sosial untuk membangun ketangguhan. Cambridge University Press.

47. North, D. C. (1991). Institusi-intitusi. *Jurnal Perspektif Ekonomi*, 5(1), 97–112.

48. Brooks, J. S. (2017). Era Fitur Desain dan Proyek Berkontribusi pada Keberhasilan Bersama dalam Hasil Sosial, Ekologis, dan Ekonomi dari Proyek Konservasi Berbasis Masyarakat. *Berkas-berkas Konservasi*, 10(1), 23–32. doi: 10.1111/conl.12231

49. Campbell, B. M., Sayer, J. A., & Walker, B. (2010). Menavigasi pertukaran: Bekerja untukpencapaian konservasi dan pembangunan. *Sosial dan Ekologis*, 15(2), 2. doi: 10.5751/ES-03380-150216

50. Adams, W. M., Aveling, R., Brockington, D., & Dickson, B. (2004). Konservasi keanekaragaman hayati dan pemberantasan kemiskinan. *pengetahuan*, 306, 1146–1149. Diterima dari https://science.sciencemag.org/content/306/5699/1146.short

51. Hartanto, H., Tomy, S., Hidayat, Y., & Hidayat, T. (2014). *SIGAP-REDD+: Menggagas Aksi Masyarakat untuk Perubahan di REDD+*. Program Indonesia.

52. Tallis, H., Kareiva, P., Marvier, M., & Chang, A. (2008). Kerangka kerja pelayanan ekosistem untuk mendukung konservasi praktis dan pembangunan ekonomi. *Tindak Lanjut Ilmu Sains Akademi Nasional*, 105, 9457–9464. Diterima dari https://www.pnas.org/content/105/28/9457.short

53. Meinzen-Dick, R., Janssen, M. A., Kandikuppa, S., Chaturvedi, R., Rao, K., & Theis, S. (2018). Bermain permainan untuk menyelamatkan air: Permainan aksi kolektif untuk pengelolaan air tanah di Andhra Pradesh, India. *Pembangunan Dunia*, 107, 40–53.

54. Wilkie, D. S., & Painter, M. (2021). Faktor faktor keberhasilan pada komunitas konservasi hutan. *Ilmu Sains dan Praktik Konservasi*, e388, Manuskrip telah diserahkan untuk tujuan publikasi. Diterima dari https://conbio.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/csp2.388

55. Agrawal, A., & Benson, C. (2011). Teori properti milik Bersama dan sumber daya institusi kepemerintahan: menguatkan penjabaran hasil luaran ganda. *Konservasi Lingkungan Hidup*, 38, 199–210.

56. Knight, R., Brinkhurst, M., & Vogelsang, J. (2016). *Petunjuk pelaksanaan fasilitator perlindungan lahan*. Diterima dari namati.org/communityland

57. Persha, L., Agrawal, A., & Chhatre, A. (2011). Sosial sinergi dan ekologis: penyusunan aturan lokal, penghidupan hutan, dan konservasi keanekaragaman hayati. *Sains*, 331, 1606–1608.

58. Tai, H. (2007). Pembangunan Melalui Konservasi: Sebuah Analisis Institusional tentang Konservasi Berbasis Komunitas Adat di Taiwan. *Pembangunan Dunia*, 35(7), 1186–1203. doi: 10.1016/j.worlddev.2006.09.015

59. Pretty, J., & Smith, D. (2004). Sosial Kapital di dalam Konservasi dan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati. *Konservasi Biologi*, *18*(3), 631–638.

60. Olsson, P., Folke, C., & Berkes, F. (2004). Distribusi manajemen adaptif untuk membangun ketangguhan pada sistem sosial – ekologis. *Manajemen Lingkungan Hidup*, *34*, 75–90.

61. Ostrom, E., Gardner, R., & Walker, J. (2009). Kerangka Kerja Kepemilikan Bersama untuk Menganalisis Sistem Sosial – Ekologis Berkelanjutan. *Sains*, *325*(5939), 419–422.

62. Pretty, J. (2003). Pengelolaa sumberdaya kolektif dan sosial kapital. *Sains*, *302*, 1912–1914.

63. Ferrin, D. L., & Dirks, K. T. (2002). Kepercayaan di dalam Kepemimpinan: Penemuan Meta Analisis dan Implikasi terhadap Penelitian dan Praktik. *Jurnal Psikologi Terapan*, *87*(4), 611–628. doi: 10.1037//0021-9010.87.4.611

64. Lockwood, M. (2010). Pemerintah Tata Kelola yang Baik bagi Kawasan Terestrial Terlindungi: Sebuah kerangka kerja, nilai-nilai prinsipil dan kinerja hasil luaran. *Jurnal Manajemen Lingkungan Hidup*, 91(3), 754–766. doi: 10.1016/j.jenvman.2009.10.005

65. Glowacki, L., & von Rueden, C. (2015). Kepemimpinan mengatasi permasalahan aksi kolektif di lingkup lingkar kecil masyarakat. *Transaksi Filosofis B*, *370*.

66. *Stein, C., Ernston, H., & Barron, J. (2011). Sebuah pendekatan jejaring sosial untuk menganalisa tata kelola air: Kasus wilayah tangkapan Mkindo, Tanzania. Simposium WaterNet/WARFSA/GWP-SA ke-11: IWRM untuk Integrasi Nasional dan Regional melalui pendekatan berbasis Sains, Kebijakan dan Praktis*, 36(14–15), 711–1208.

67. Mascia, M. B., & Mills, M. (2018). Di saat konservasi tersebar luas: Persebaran kebijakan dan praktik konservasi keanekaragaman hayati. *Berkas-berkas Konservasi*, *11*(3), 1–9. doi: 10.1111/conl.12442

68. Valente, T. W., & Davis, R. L. (1999). Mengakselerasi persebaran inovasi dengan memanfaatkan tanggapan para pimpinan. *Sejarah Ilmu Sosial dan Sains Perguruan Tinggi Akademi Amerika*, 566, 55–67.

69. Mahajan, S. L., Arundhati, J., Glew, L., Ahmadia, G., Becker, H., Fidler, R. Y., ... Mascia, M. B. (2021). Kerangka kerja berbasis teori untuk memahami pembentukan, kesungguhan, dan persebaran konservasi berbasis komunitas. *Praktik dan Sains dalam Konservasi*, *3*(1).

70. Ostrom, E. (1990). *Menata kelola Publik Umum: evolusi terhadap institusi bagi aksi kolektif*. New York, NY: Cambridge University Press.

71. Ostrom, E. (2010). Menganalisa aksi kolektif. *Perekonomian Agrikultur, 41*(155–166). Diterima dari.

72. Manfredo, M. J., Teel, T. L., Sullivan, L., & Dietsch, A. M. (2017). Nilai-nilai, kepercayaan dan hantaman budaya dalam pemerintahan tata kelola konservasi: Kasus pengelolaan margasatwa di Amerika Serikat. *Konservasi Biologi*, *214*(Februari), 303–311. doi: 10.1016/j.biocon.2017.07.032

73. Stern, M. J., & Baird, T. D. (2015). Percaya terhadap ekologi dan ketangguhan manajemen institusi sumber daya alam. *Ekologi dan Masyarakat*, *20*(2).

74. Dembling, S. (2019). Bantaran Sungai adalah Ruang Spiritual dalam Kehidupan Masyarakat Adat Cherokee. *Kemanusiaan*, *40*(3).

75. Stevenson, G. (1991). *Perekonomian Properti Milik Bersama: Penerapan teori kepemilikan bersama dan pemanfaatan lahan*. Cambridge, MA: Cambridge University Press.

76. Berkes, F. (1989). *Sumber Daya Properti Milik Bersama: Pembangunan ekologi dan sumber daya berkelanjutan berbasis komunitas*. London: Bellhaven Press.

77. Berkes, F., Feeny, D., McCay, B., & Acheson, J. (1989). Kemaslahatan Milik Bersama. *Alam*, *340*, 91–93.

78. McKean, M. A. (2000). Properti Milik Bersama: Apa artinya, apa manfaatnya, dan apa yang menjadikannya berfungsi? In C. Gibson, M. McKean, & E. Ostrom (Eds.), Masyarakat dan Hutan: Pelbagai komunitas, institusi dan Pemerintah. Cambridge, MA: MIT Press.

79. Netting, R. M. (1997). Ketidaksetaraan kepemilikan komunal dan hak kepemilikan pribadi. Properti dan komunitas di antara petani kecil. *Ekologis*, *27*, 28–33.

80. Corrigan, C., Bingham, H., & Van Montfort, J. (2021). *Laporan teknis keadaan Masyarakat Adat dan Lahan Milik Komunitas Lokal: Kontribusi mereka terhadap konservasi keanekaragaman hayati global dan jasa ekosistem, ancaman terhadap upaya ini, dan rekomendasi terhadap ajakan bertindak*. Gland, Switzerland.

81. Garnett, S. T., Burgess, N. D., Fa, J. E., Fernández-Llamazares, Á., Molnár, Z., Robinson, C. J., ... Leiper, I. (2018). Gambaran spasial tentang desakan global atas tanah Masyarakat Adat untuk konservasi. *Alam Berkelanjutan*, *1*(7), 369–374. doi: 10.1038/s41893-018-0100-6

82. Kothari, A., Corrigan, C., Jonas, H., Neumann, A., & Shrumm, H. (2012). *Mengakui serta Mendukung Kawasan dan Area yang telah dikonservasi oleh Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal: Tinjauan luas di lingkup global dan studi kasus nasional*. Montreal, Kanada.

83. Fa, J. E., Watson, J. E. M., Leiper, I., Potapov, P., Evans, T. D., Burgess, N. D., ... Barnett, S. T. (2020). Pentingnya Tanah Masyarakat Adat untuk Konservasi Lanskap Hutan Utuh. *Perbatasan di konteks Lingkungan dan Ekologis*, *18*(3), 135–140.

84. Frechette, A., Ginsburg, C., & Walker, W. (2018). *Menuju Garis Dasar Penyimpanan Karbon Global di Lahan Kolektif: Keikutsertaan Penduduk Asli dan komunitas lokal terhadap mitigasi perubahan iklim*. Washington, DC. Diterima dari https://rightsandresources.org/wp-content/uploads/2018/09/A-Global-Baseline_RRI_Sept-2018.pdf.

85. Walker, W. S., Gorelik, S. R., Baccini, A., Aragon-Osejo, J. L., Josse, C., Meyer, C., ... Schwartzman, P. (2020). Peran konversi hutan, degradasi, dan gangguan di dalam dinamika karbon wilayah adat dan kawasan lindung hutan Amazon. *Tindak lanjut Akademi Nasional Ilmu Sains*, *117*, 3015–3025.

86. Zander, K. K., & Garnet, S. T. (2011). Nilai Ekonomi Layanan Jasa Lingkungan atas Kepemilikan Tanah Adat di Australia. *PLoS ONE*, 6(e23254).

87. Hardin, G. (1968). Tragedi Kepemikan Bersama. *Sains*, *162*(3859), 1243–1248.

88. Dodds, Felix dan Emily Benson. (2015). Perangkat Tata Kelola Partisipatif CIVICUS: Dialog Multistakeholder. Johannesburg, Afrka Selatan. http://www.civicus.org/images/PGX_D_Multistakeholder%20Dialogue.pdf

89. Ros-Tonen, M. A. F., M. Derkyi, and T. F. G. Insaidoo. (2014). Dari Pengelolaan Bersama hingga Tata Kelola Lanskap: Sistem Taungya telah dimodifikasi oleh Whither Ghana? Hutan-Hutan (5): 2996–3021.

90. Kusters, K., L. Buck, M. de Graaf, P. Minang, C. van Oosten, dan R. Zagt. (2017). Perencanaan Partisipatoris, Pemantuan dan Evaluasi Platform dari Multi-Stakeholder dalam Inisiatif Lanskap Terpadu. *Manajemen Lingkungan* (Mar. 21): 1–12.

91. Warner, Jeroen. (2005). Kerangka Kerja Multi-Stakeholder: Mengintegrasikan Masyarakat ke dalam Manajemen Sumber Daya Air?. *Ambiente & Sociedade* 8(2)(July/Dec.): 4–28.

92. Serikat Internasional untuk Konservasi Alam (IUCN). (2012). Kolaborasi dan Dialog Antar Multi-Stakeholder: Sebuah Ulasan Kepustakaan. IUCN, Gland, Switzerland. https://www.iucn.org/sites/dev/files/import/downloads/collaboration_and_multi_stakeholder_dialogue.pdf

93. Kahane, Adam. (2017). *Berkolaborasi Dengan Lawan: Cara Bertugas dengan Orang yang Tidak Sependirian dengan Anda, Tidak Anda Sukai, Tidak Anda Percaya*. Oakland, California: Berrett-Koehler.

94. Lawlor, Kathleen, dan Brooke Lovingood. (2016). Strategi Partisipatoris Konservasi: Memahami Apa yang Berfungsi untuk Lingkungan dan Masyarakat. Laporan yang Dipersiapkan untuk Konservasi Alam (TNC).

95. Chiaravalloti, R., dan M. Dyble. (2019). *"Akses Terbuka dalam Sistem Sosial-Ekologis yang Terbatas: Bagaimana Komunitas-Komunitas Menghadapi Ketidakpastian Lingkungan?"* Berkas-Berkas Konservasi (Oktober 2019): 1–7.

96. Shirley, E., dan M. Gore. (2019). "*Kepercayaan terhadap ilmuwan dan taraf ketidakpatuhan kepada peraturan perikanan di Pantanal Brasil*," PloS one 14 (3).

97. Mitra Reos. 2013. Laboratorium Perubahan Reos: Menangani Tantangan yang Rumit melalui Inovasi Sosial. Demi Kebutuhan Panggung Berbagi Pengetahuan Innoweave dan J. W. Yayasan Keluarga McConnell.

98. Meyers, D., Bohorquez, J., Cumming, T., Emerton, L., Heuvel, O. v., Riva, M., & Victurine, R. (2020). *Pendanaan Konservasi: Sebuah Kerangka Kerja*. Aliansi Pendanaan Konservasi. doi:10.13140/RG.2.2.14186.88000

99. EcoAdvisors. (2020). Pendanaan Konservasi untuk Program Konservasi Bersama Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal. Laporan dipersiapkan untuk Konservasi Alam (TNC), Juli 2020..

100. Namati. (2016). Panduan Pengguna Komunitas Perlindungan Tanah. Namati: Innovasi di lingkar Pemberdayaan Hukum.

101. Bonine, Kim, Natalia Sanin, Erik Wallsten, dan Thais Vilela. (2020). Evaluasi Usaha Berbasis Masyarakat yang Mendukung Penghidupan Berkelanjutan dalam Kemitraan Bersama Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal. Laporan dipersiapkan untuk The Nature Conservancy.

102. Wright, J.H., N.A.O. Hill, D. Roe, J.M. Rowcliffe, N. F. Kumpel, M. Day, ... E.J. Milner-Gulland. (2016). Membingkai Ulang Konsep Penghidupan Alternatif. *Konservasi Biologi* 30(1): 7-13.

103. Fauna dan Flora International (FFI). (2013). 'Penghidupan Alternatif' Mengapa Tidak? Pertimbangan Kami Mendukung Pengembangan Penghidupan Berkelanjutan Dibanding Mempromosikan 'Penghidupan Alternatif' dalam Program-Program Konservasi Kami. Laporan oleh Konservasi FFI, Program Tata Kelola dan Penghidupan.

104. Torell E., B. Crawford, D. Kotowicz, M.D. Herrera, dan J. Tobey. 2010. Memoderasi Ekspektasi Kami tentang Penghidupan di ICM: Pengalaman dari Thailand, Nikaragua, dan Tanzania. *Manajemen Pesisir* 38: 216–237.

105. Lindsay, A. R., Sanchirico, J. N., Gilliland, T. E., Ambo-Rappe, R., Taylor, J. E., Krueck, N. C., & Mumby, P. J. (2020). Mengevaluasi kebijakan pembangunan berkelanjutan dalam ekonomi pesisir pedesaan. *Tindak Lanjut Ilmu Sains Akademi Nasional*, *117*(52), 33170-33176.

106. Li, B. V., Kim, M. J., Xu, W., Jiang, S., & Yu, L. (2021). Meningkatkan penggembalaan ternak, konsekuensi yang tidak direncanakan dari pendanaan pembangunan masyarakat di habitat panda raksasa. *Konservasi Biologis*, *257*, 109074.

107. Cundill, G., Shackleton, S., dan Larsen, H.O. (2011). Menghimpun Informasi Kontekstual. Termuat dalam Larsen, H. O., Lund, J. F., Smith-Hall, C., & Wunder, S. (Eds.), *Mengukur Penghidupan dan Lingkungan yang Ketergantungan* (pp. 71). Earthscan.

108. Lund, J. F., & Saito-Jensen, M. (2013). Meninjau ulang isu perangkap elit dalam spektrum keterlibatan inisiatif. *World development*, *46*, 104-112.

109. Friedman, R. S., Law, E. A., Bennett, N. J., Ives, C. D., Thorn, J. P., & Wilson, K. A. (2018). Berlaku adil dan adil yang seperti apa? Sebuah tinjauan sistematis mengenai keadilan sosial di dalam penelitian konservasi. *Berkas Penelitian Lingkungan*, *13*(5), 053001. https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/aabcde/pdf

110. Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia. Apa itu hak asasi manusia?

111. Chaudhury, A., & Colla, S. (2021). Tahap berikutnya dalam peran mengentaskan diskriminasi: Rangkaian pembelajaran dari ekologi dan konservasi sains. *Berkas-Berkas Konservasi*, *14*(2), e12774. https://conbio.onlinelibrary.wiley.com/doi/pdfdirect/10.1111/conl.12774

112. Worell, J. (Ed.). (2001). *Ensiklopedia tentang perempuan dan gender, dua jilid sekaligus: Persamaan dan Perbedaan jenis kelamin dan imbas masyarakat terhadap gender* (Vol. 1). Penerbitan Akademis. Bab mengenai "Identitas Sosial" oleh Kay Duex. https://www.rhnet.org/site/handlers/filedownload.ashx?moduleinstanceid=5006&dataid=24349&FileName=social%20identity.pdf

113. USAID. (2015). Panduan Pembelajaran dan Penerapan Perangkat Tata Kelola Sumber Daya (NRGT) Di Bentang Alam dan Laut," https://rmportal.net/biodiversityconservation-gateway/projects/closed-global-projects/scapes-1/guidelines-learning-applying-nrgt-landscapes-seascapes/view.

114. TNC. (2016). ""Konservasi dengan Desain 2.0. Dokumen Panduan—Versi 1.0." https://www.conservationgateway.org/ConservationPlanning/cbd/Pages/default.aspx.

115. Leisher, C., Temsah, G., Booker, F., Day, M., Samberg, L., Prosnitz, D., Agarwal, B., ... Wilkie, D. (2016). Apakah komposisi gender dalam kelompok pengelolaan hutan dan perikanan mempengaruhi tata kelola sumber daya dan hasil konservasi? Sebuah Peta Sistematis. *Bukti Lingkungan*, 5(6). https://doi.org/10.1186/s13750-016-0057-8

116. Agarwal B. (2009). Konservasi hutan dan gender: Dampak partisipasi perempuan dalam pemerintahan tata kelola hutan kemasyarakatan. *perekonomian ekologis*, 68(11), 2785-2799. https://EconPapers.repec.org/RePEc:eee:ecolec:v:68:y:2009:i:11:p:2785-2799

117. Crenshaw, K. (1989). Demarginalisasi persimpangan ras dan jenis kelamin: Kritik feminis kulit hitam terhadap doktrin antidiskriminasi, teori feminis, dan politik antirasis. *Forum Hukum Universitas Chicago*, 1989(1), Pasal 8. http://chicagounbound.uchicago.edu/uclf/vol1989/iss1/8

118. Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat. (n.d.). *Lembar Fakta: Kepemilikan tanah dan pemberdayaan perempuan*. LandLinks. https://www.land-links.org/issue-brief/fact-sheet-land-tenure-womens-empowerment/

119. Landesa. (2012). Hak Aman Perempuan atas Tanah: Manfaat, Hambatan, dan Praktik Terbaik. Seattle, WA.

120. The Nature Conservancy. (2020-a). *Glosarium istilah-istilah utama*. Panduan Hak Asasi Manusia The Nature Conservancy untuk Bekerja dengan Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal. https://www.tnchumanrightsguide.org/appendix-ii-glossary-of-key-terms/

121. The Nature Conservancy (2020-b). *"Rasa Hormat, timbal balik, dan integrasi:" Menjunjung kepemimpinan Masyarakat Adat di konservasi*. https://www.nature.org/en-us/what-we-do/our-insights/perspectives/elevating-indigenous-leadership-conservation/

122. The Nature Conservancy. (2020-c). *Persetujuan Bebas, Dikedepankan dan Diinformasikan*. Panduan Hak Asasi Manusia The Nature Conservancy untuk Bekerja dengan Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal. https://www.tnchumanrightsguide.org/module-2-free-prior-informed-consent/

123. Boyce, J.K. (2002). Ekonomi Politik Lingkungan. Edward Elgar, Cheltenham.

124. Konservasi Alam (TNC). (2020-e). *Konflik Resolusi*. Panduan Hak Asasi Manusia The Nature Conservancy untuk Bekerja dengan Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal. https://www.tnchumanrightsguide.org/module-3-conflict-resolution/

125. Kusters, K., L. Buck, M. de Graaf, P. Minang, C. van Oosten, and R. Zagt. (2017). Perencanaan Partisipatif, Pemantauan dan Evaluasi Kerangka Kerja Multi-stakeholder dalam Inisiatif Lanskap Tepadu. Manajemen Lingkungan (Mar. 21): 1–12.

126. Maynard, Bill, and Dawn Robinson. (1998). Perdagangan Etis dan Penghidupan Pedesaan Berkelanjutan: Sertifikasi Studi Kasus Hutan Quintana Roo. Laporan oleh Sumber Daya Alam, Perdagangan Etis dan Institut Sumber Daya Alam.

127. Kariuki, J. & Birner, R. (2015). Apakah skema konservasi yang berbasis pasar awam tentang gender? Sebuah studi kualitatif tentang tiga kasus dari Kenya. *Masyarakat & Sumber Daya Alam*, 29, 432-447. https://doi.org/10.1080/08941920.2015.1086461

128. Westholm, L. & Arora-Jonsson, S. (2015). Mendefinisikan solusi, menemukan permasalahan: Deforestasi, gender, dan REDD+ di Burkina Faso. *Konservasi & Masyarakat*, 13(2), 189-199. DOI: 10.4103/0972-4923.164203.

129. Bandiaky-Badji, S. (2011). Kesetaraan gender dalam sejarah tata kelola di hutan Senegal: Mengapa kebijakan dan representasi penting. *Ulasan Kehutanan Internasional*, 13(2), 177–194. https://doi.org/10.1505/146554811797406624

130. Organisasi Kesehatan Dunia. (n.d.). Nilai-nilai penentu kesehatan sosial: Kesetaraan perempuan dan gender.

131. Bank Dunia. (2011). Laporan Pembangunan Dunia 2012: Kesetaraan gender dan pembangunan. https://doi.org/10.1596/978-0-8213-8810-5

132. Ardoin, N. M. (2006). Menuju pemahaman interdisipliner atas ruang: Pembelajaran bagi edukasi lingkungan. Jurnal Canada tentang Edukasi Lingkungan (CJEE), 11(1), 112-126.

133. Kukutai, T., & Taylor, J. (2016). *Data penduduk pribumi berdaulat: Menuju satu rangkaian agenda*. ANU Press.

134. Fernández-Llamazares, Á., & Cabeza, M. (2018). Menemukan kembali potensi periwayatan adat untuk praktik konservasi. *Berkas-Berkas Konservasi*, *11*(3), e12398.

135. Cajete, G. (2000). *Ilmu Pengetahuan Penduduk Asli: Hukum alam yang saling ketergantungan*. Clear Light Pub.

136. Proshansky, H. M., Fabian, A. K., & Kaminoff, R. (1983). Identitas-tempat: Sosialisasi dunia fisik mengenai kedirian. *Jurnal Psikologi Lingkungan*, 3, 58-83.

137. Semken, S., & Brandt, E. (2010). Implikasi pendidikan kesadaran akan tempat dan berbasis ruang bagi integritas ekologis dan budaya berkelanjutan di beragam tempat. Termaktub dalam Studi Kebudayaan dan Pelestarian Lingkungan Hidup (pp. 287-302). Springer, Dordrecht.

138. Low, S. M. (1992). Ikatan simbolis yang mengikat. Termuat di Kelekatan tempat (pp. 165-185). Springer, Boston, MA.

139. Relph, E. (1976). *Tempat dan Ketidakberadaan*. London: Pion Limited.

140. Twigger-Ross, C. L., & Uzzell, D. L. (1996). Proses identitas dan ruang. Jurnal Psikologi Lingkungan, 16, 205–220.

141. Clayton, S. (2003). Identitas lingkungan: Satu konseptual dan satu rangkaian definisi operasional. Identitas dan lingkungan alam: Relevansi psikologis atas alam, 45-65. MIT Press, Cambridge, Massachusetts.

142. Low, S. M. (1990). Kemelakatan ruang lintas budaya: sebuah pendahuluan tipologi. Termuat di Y. Yoshitake, R. B. Bechtel, T. Takahashi, & M. Asai (Eds.), Isu-isu terkini di dalam penelitian perilaku-lingkungan. Tokyo: Universitas Tokyo/University of Tokyo.

143. Muhar, A., Raymond, C. M., van den Born, R. J., Bauer, N., Böck, K., Braito, M., ... & Mitrofanenko, T. (2017). Sebuah model yang mengintegrasikan konsep-konsep pendekatan sosial-budaya alam lingkungan ke dalam runtutan kerangka kerja mengenai interaksi antara kehidupan sosial dan sistem yang bersifat alamiah. Jurnal Perencanaan dan Manajemen Lingkungan Hidup, 61(5-6), 756-777. https://doi.org/10.1080/09640568.2017.1327424

144. Schultz, K., Walters, K. L., Beltran, R., Stroud, S., & Johnson-Jennings, M. (2016). "Saya lebih kuat dari yang saya pikirkan": Perempuan pribumi kembali terhubung dengan tubuh, kesehatan dan ruang. Kesehatan & ruang, 40, 21-28. https://doi.org/10.1016/j.healthplace.2016.05.001

145. Turner, N. J., & Turner, K. L. (2008). "Dimana tempat bagi kelompok perempuan kami terbiasa memperoleh makanan": dampak kumulatif dan sirnanya pengetahuan dan praktik etnobotani; studi kasus yang berasal dari daerah pesisir British Columbia. Botani, 86(2), 103-115.

146. Barbaro, N., & Pickett, S. M. (2016). Berkesadaran penuh hijau: Mengamati pengaruh keterhubungan dengan alam terhadap relasi antara kesadaran penuh dan keterlibatan perilaku pro-lingkungan. *Kepribadian dan Perbedaan Individu*, 93, 137-142. https://doi.org/10.1016/j.paid.2015.05.026

147. Beery, T. H., & Wolf-Watz, D. (2014). Alam kepada Tempat: Berpikir ulang terhadap cara berpikir keterhubungan dengan lingkungan. *Jurnal psikologi lingkungan*, 40, 198-205. https://doi.org/10.1016/j.jenvp.2014.06.006

148. Davis, J. L., Green, J. D., & Reed, A. (2009). Kondisi saling bergantung dengan lingkungan setempat: Komitmen, saling terhubung, dan perilaku sadar lingkungan. *Jurnal psikologi lingkungan*, 29(2), 173-180. https://doi.org/10.1016/j.jenvp.2008.11.001

149. Geng, L., Xu, J., Ye, L., Zhou, W., & Zhou, K. (2015). Terhubung dengan alam dan perilaku sadar lingkungan. *PloS one*, 10(5). https://doi.org/10.1371/journal.pone.0127247

150. Kals, E., Schumacher, D., & Montada, L. (1999). Kedekatan emosional terhadap alam sebagai dorongan dasar untuk melindungi alam. Lingkungan hidup dan perilaku, 31(2), 178-202. https://doi.org/10.1177/00139169921972056

151. Mayer, F. S., & Frantz, C. M. (2004). Kondisi terhubung dengan neraca alam: Suatu tindakan terukur mengenai perasaan perseorangan di dalam lingkungan komunitas alam. *Jurnal psikologi lingkungan*, 24(4), 503-515. https://doi.org/10.1016/j.jenvp.2004.10.001

152. Rosa, C. D., Profice, C. C., & Collado, S. (2018). Pengalaman alam lingkungan dan insan dewasa yang secara mandiri dilaporkan oleh beragam perilaku pro-lingkungan: peran dari keterhubungan kepada alam dan pengalaman alam lingkungan di masa kecil. *Perbatasan di dalam psikologi*, 9, 1055. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2018.01055

153. Schultz, P. W., Shriver, C., Tabanico, J. J., & Khazian, A. M. (2004). Hubungan tersirat dengan alam. *Jurnal psikologi lingkungan*, 24(1), 31-42. https://doi.org/10.1016/S0272-4944(03)00022-7

154. Tam, K. P. (2013). Keselarasan dan perbedaan. Keselarasan dan perbedaan. *Jurnal psikologi lingkungan*, 34, 64-78. https://doi.org/10.1016/j.jenvp.2013.01.004

155. Vaske, J. J., & Kobrin, K. C. (2001). Kemelekatan tempat dan perilaku bertanggung jawab terhadap lingkungan. *Jurnal Pendidikan Lingkungan*, 32(4), 16-21. https://doi.org/10.1080/00958960109598658

156. Whitburn, J., Linklater, W., & Abrahamse, W. (2020). Meta-analisis hubungan manusia dengan alam dan perilaku pro-lingkungan. Konservasi Biologi, 34(1), 180-193. https://doi.org/10.1111/cobi.13381

157. Kellert, S. R., & Wilson, E. O. (1993). *Hipotesis Biophilia*. Washington, D.C: Island Press.

158. Hay, R. B. (1998). Suatu kesadaran akan tempat yang mengakar dalam perspektif lintas budaya. *Ahli Ilmu Bumi dari Kanada*, 42, 245–266.

159. Hernández, B., Hidalgo, M. C., Salazar-Laplace, M. E., & Hess, S. (2007). Kemelekatan tempat dan identitas tempat bagi penduduk asli dan pendatang. *Jurnal psikologi lingkungan*, *27*(4), 310-319.

160. Thornton, T. F. (2011). *Anasir dan Tempat di antara Masyarakat Adat Tlingit*. Seattle: University of Washington Press.

161. Ellis, N. R., & Albrecht, G. A. (2017). Para keluarga petani merasa kesadaran mereka akan ruang hidup dan kesehatan mentalnya terancam sebab adanya perubahan iklim: Sebuah studi kasus berasal dari Wheatbelt, Barat Australia. *Sosial Sains & Pengobatan Medis*, 175, 161-168. https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2017.01.009

162. Big-Canoe, K., & Richmond, C. A. (2014). Persepsi anak muda Anashinaabe mengenai kesehatan komunitas: Menuju Toward environmental repossession. *Sehat & Tempat*, 26, 127-135. https://doi.org/10.1016/j.healthplace.2013.12.013

163. Cunsolo Willox, A., Harper, S. L., Ford, J. D., Landman, K., Houle, K., & Edge, V. L. (2012). "Dari tempat ini dan bertumpu di tempat ini:" Perubahan iklim, kesadaran rasa akan tempat, dan kesehatan di Nunatsiavut, Canada. *Sosial Sains & Pengobatan Medis*, 75(3), 538-547. https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2012.03.043

164. Gosling, E., & Williams, K. J. (2010). Keterhubungan kepada alam, kemelekatan tempat dan perilaku konservasi: Menguji coba teori keterhubungan di antara para petani. Jurnal Psikologi Lingkungan, 30(3), 298-304. https://doi.org/10.1016/j.jenvp.2010.01.005

165. Berkes, F. (1999). Ekologi yang Dikeramatkan: Pengetahuan Tradisional Ekologis dan Pengelolaan Sumber Daya. Taylor & Francis.

166. Sangha, K. K., Preece, L., Villarreal-Rosas, J., Kegamba, J. J., Paudyal, K., Warmenhoven, T., & Rama Krishnan, P. S. (2018). Kerangka kerja layanan ekosistem untuk mengevaluasi kedekatan penduduk Asli dan lokal dengan alam. *Pelayanan ekosistem*, 31, 111-125. https://doi.org/10.1016/j.ecoser.2018.03.017

167. Turner, N. J., Ignace, M. B., & Ignace, R. (2000). Pengetahuan tradisional ekologis dan kearifan masyarakat aborigin/penduduk asli di Inggris, Kolombia. Penerapan berbasis ekologis, 10(5), 1275-1287.

168. Kimmerer, R. W. (2013). *Mengepang tumbuhan rumput manis/Braiding sweetgrass: Kearifan Adat, pengetahuan ilmiah dan wejangan tumbuh-tumbuhan* Milkweed Editions.

169. Gadgil, M., Berkes, F., & Folke, C. (1993). Pengetahuan Adat untuk konservasi keanekaragaman hayati. *Ambio*, 151-156.

170. Wane, N., & Chandler, D. J. (2002). Perempuan Afrika, pengetahuan budaya dan pendidikan lingkungan dengan memusatkan perhatian kepada perempuan penduduk asli Kenya. Jurnal Pendidikan Lingkungan Masyarakat Kanada/Canadian Journal of Environmental Education (CJEE), 7(1), 86-98.

171. Oraftik, C. (2020). Sebuah pengkajian mengenai patahan Bahasa Adat dan penjaga lingkungan. The Nature Conservancy.

172. Smith, L. T. (2021). *Mendekolonisasi rangkaian metodologi: Penelitian dan Masyarakat Adat*. Zed Books Ltd..

173. Kimmerer, Robin. (2018). "Mishkos Kenomagwen, Pembelajaran Utama dari Rerumputan" (p. 35) in Pengetahuan tradisional ekologis: Belajar dari Praktik-Praktik Adat bagi Lingkungan Berkelanjutan oleh Melissa K. Nelson dan Dan Shilling.

174. Pember, M.A. (2019). Kematian oleh Peradaban. *Kehidupan Atlantis*. https://www.theatlantic.com/education/archive/2019/03/traumatic-legacy-indian-boarding-schools/584293/

175. Kulchyski, P. (2016) Situs-Situs Semak Belukar / Kisah Semak Belukar: Politik akan Ruang dan Ingatan di Masyarakat Adat Kanada Wilayah Bagian Utara. *MLA Profession*. https://profession.mla.org/bush-sites-bush-stories-politics-of-place-and-memory-in-Indigenous-northern-canada/

176. Brockington, D., & Igoe, J. (2006). Penggusuran untuk konservasi: sebuah tinjauan global. *Konservasi dan masyarakat*, 424-470.

177. Poirier, R., & Ostergren, D. (2002). Menggusur warga dari alam: Hak-hak tanah adat dan sejumlah taman nasional di Australia, Rusia, dan Amerika Serikat. *Sumber Daya Alam J.*, 42, 331.

178. Greer, A. (2012). Kepemilikan Bersama dan pematokan lahan di masa kolonialisasi di wilayah bagian Utara Amerika. *Tinjauan Historis Penduduk Amerika*, 117(2), 365-386.

179. Persatuan Alam. (nd). Perangkat SEAS: Sumber Daya untuk Anda guna Merancang Program Berbasis Lahan bagi Pemuda Adat setempat. Kanada.

180. EcoAdvisors dan The Nature Conservancy (2020). Pendanaan konservasi untuk program-program konservasi bersama Masyarakat Adat dan Komunitas-Komunitas Lokal. Arlington, VA.

181. Strang, D. (1991). Menyertakan struktur sosial kepada model-model penyebaran: Sebuah kerangka kerja sejarah peristiwa. *Sociological Methods & Research*, *19*(3), 324-353.

182. Mills, M., Bode, M., Mascia, M. B., Weeks, R., Gelcich, S., Dudley, N., ... Possingham, H. P. (2019). Bagaimana inisiatif konservasi berkembang. *Keberlanjutan Alam*, 2(10), 935-940.

183. Hatcher, J., Owen, M., & Yin, D. (2021). Kegagalan: Pendanaan Donor untuk Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal demi Mengamankan Hak Tenurial dan Mengelola Hutan di Negara Tropis (2011-2020). Yayasan Hutan Hujan Norwegia.

184. Salerno, J., Romulo, C., Galvin, K. A., Brooks, J., Mupeta-Muyamwa, P., & Glew, L. (2021). Adaptasi dan evolusi institusi-institusi dan pemerintah tata kelola konservasi berbasis komunitas. Ilmu Sains dan Praktik Konservasi, 3(1), e355.

185. Gonzales Tovar, J., Sarmiento Barletti, J. P., Larson, A. M., Barnes, G., & Tucker, C. M. (2021). Dapatkah forum multistakeholder memberdayakan Masyarakat Adat dan lokal serta menaikkan program konservasi hutan? Sebuah analisis komparatif mengenai perencanaan wilayah di dua negara bagian Brasil dengan membenturkan konteks yang bertolak belakang. *Konservasi Sains dan Praktik*, *3*(1), e326.

186. Nelson, F., Muyamwa-Mupeta, P., Muyengwa, S., Sulle, E., & Kaelo, D. (2021). Kemajuan atau Kemunduran? Evolusi institusional pada konservasi berbasis komunitas di kawasan timur dan selatan Afrika. *Konservasi Sains dan Praktik*, 3(1), e302.

187. Marshall, G. R. (2007). Peningkatan kualitas, prinsip subsidi, dan tata kelola lingkungan berbasis komunitas melampaui tingkat lokal. *Jurnal Kepemilikan Bersama Internasional*, *2*(1), 75-97.

188. Rogers, E. M. (2003). Penyebaran ragam inovasi (edisi ke-5.). New York, NY: Free Press.

189. Mascia, M. B., & Mills, M. (2018). Di saat konservasi tersebar luas: Peleburan kebijakan dan praktik konservasi keanekaragaman hayati yang inovatif. *Berkas-Berkas Konservasi*, *11*(3), e12442.

The Nature Conservancy

tncvoicechoiceaction.org